

**PROSES *SOCIAL CAPITAL* DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS)
Di Jalan Kartini Kota Semarang)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik**



Oleh :

HENI RUSMIATI
S241008008

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2012


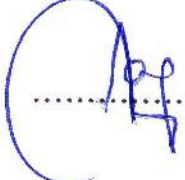
PROSES SOCIAL CAPITAL DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS)
Di Jalan Kartini Kota Semarang)

TESIS

Oleh :

HENI RUSMIATI

S241008008

Jabatan	Nama/NIP	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Drs. Sudarmo, MA. PhD NIP. 19631101 199003 1 002		12-12-2011
Pembimbing II	Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si. NIP. 19601009 198601 1 001		12-12-2011

Telah dinyatakan memenuhi syarat
Pada tanggal 12 Desember 2011

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik






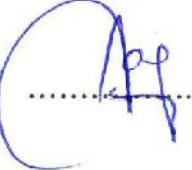
Drs. Sudarmo, MA. PhD
NIP. 19631101 199003 1 002

PROSES *SOCIAL CAPITAL* DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS)
Di Jalan Kartini Kota Semarang)

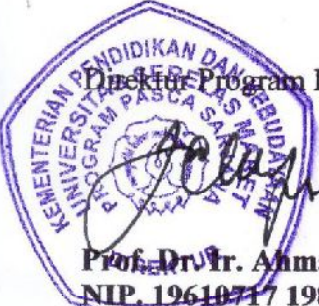

TESIS

Oleh
HENI RUSMIATI
S241008008

Tim Penguji

Jabatan	Nama/NIP	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Drs. Yulius Slamet, M.Sc., Ph.D. NIP. 19480316 197612 1 001		26-01-2012
Sekretaris	Drs. Wahyu Nurhardjarno, M.Si. NIP. 19641123 198803 1 001		01-02-2012
Anggota Penguji	1. Drs. Sudarmo, MA. Ph.D. NIP. 19631101 199003 1 002		31-01-2012
	2. Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si. NIP. 19601009 198601 1 001		27-01-2012

Mengetahui:


 Direktur Program Pascasarjana UNS

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 19610717 198601 1 001


 Ketua Program Studi Magister
 Administrasi Publik

Drs. Sudarmo, MA. Ph.D.
NIP. 19631101 199003 1 002

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Suami dan Puteriku (Namira Khoirunnisa) tercinta yang telah memberikan inspirasi dan semangat untuk mencapai kesuksesan.
- Keluarga besar yang tak putus-putusnya selalu memberikan do'a dan semangat kepada Penulis sehingga semua keinginan dapat tercapai termasuk terselesaikannya penulisan tesis ini.

PERNYATAAN

Nama : HENI RUSMIATI

NIM : S241008008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : ***“Proses Social Capital Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG (P3BS) Di Jalan Kartini Kota Semarang)”*** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 12 Januari 2012

Yang membuat pernyataan

(Heni Rusmiati)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “PROES *SOCIAL CAPITAL* DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) Di Jalan Kartini Kota Semarang”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penulisan tesis ini serta member kesempatan dan memfasilitasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, motivasi serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan penulisannya.

4. Mas Wahyudi beserta anggota P3BS, Dewan Penasehat, Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang, yang telah memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca yang budiman, Amin.

Surakarta, 12 Januari 2012

Heni Rusmiati
S241008008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. <i>Social Capital dan Governance</i>	13
<i>commit to user</i>	
2. Definisi <i>Social Capital</i>	18

3. Konsep <i>Social Capital</i>	21
a. <i>The Scope of Social Capital</i>	21
b. <i>The Form of Social Capital</i>	27
c. <i>Channels of Social Capital</i>	30
4. Unsur-unsur <i>Social Capital</i>	32
5. Jenis-Jenis <i>Social Capital</i>	37
6. Kajian Teori tentang <i>Network</i> , Konflik dan Resolusi Konflik	43
a. Definisi Konflik	43
b. Faktor Pemicu dan Resolusi Konflik Konvensional	49
c. Pendekatan dan Implikasi Manajemen Konflik	54
d. <i>Networks</i> dalam Resolusi Konflik	57
7. Penelitian Terdahulu	64
B. Kerangka Pikir	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	67
1. Jenis Penelitian	67
2. Pendekatan Penelitian	68
B. Setting dan Objek Penelitian	73
C. Subjek Penelitian	74
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Validitas Data	80
F. Teknik Analisis Data	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	88
1. PKL dan Relokasi	88
2. <i>Networks (Bonding, Bridging dan Linking)</i> sebagai Resolusi Konflik	94
B. Pembahasan	133
1. <i>Bonding</i>	133
2. <i>Bridging</i>	136
3. <i>Linking</i>	138
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Implikasi	143
C. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tabel Karakteristik Konflik Konstruktif dan Destruktif	49
Tabel 3.1	Penjabaran Fokus Penelitian Mengenai Peranan <i>Social Capital</i> Dilihat Dari Interaksi-Interaksi Pada Tataran <i>Bonding</i> , <i>Bridging</i> , Dan <i>Linking</i> Yang Ada Di Lingkungan PKL Kartini Semarang Sebagai Resolusi Konflik	74
Tabel 4.1	Kerangka Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penerapan <i>Social Capital</i> Dalam Resolusi Konflik Dan Pemicu Konflik Dari Interaksi-Interaksi Pada Tataran <i>Bonding</i> , <i>Bridging</i> , Dan <i>Linking</i> Yang Ada Pada Lingkungan PKL Kartini Semarang	140

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka <i>Social capital Relationship</i>	27
Gambar 2.2 Bagan Konsep <i>Social Capital</i>	31
Gambar 2.3 Sumber-Sumber Konflik	54
Gambar 2.4 Kerangka Gaya Manajemen Konflik	57
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pikir	65
Gambar 3.1. Kerangka Konsep Pengumpulan Data Dalam Metode Fenomenologi	77
Gambar 4.1 Foto P3BS bersama Masyarakat sekitar pada perayaan HUT RI	116
Gambar 4.2 Foto Ketua P3BS dengan Ketua DPP GRASI Pusat	120
Gambar 4.3 Foto P3BS dengan Sukawi Sutarip pada saat peresmian jembatan Kartini	124
Gambar 4.4 Foto P3BS saat berbuka puasa dengan Sumarmo	130

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Pedagang Burung Memprotes Penertiban	152
Lampiran 2	Pasar Burung Waru Mangkrak	153
Lampiran 3	Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpolinmas	154
Lampiran 4	Akta Notaris Pendirian P3BS	155
Lampiran 5	Pedagang Karimata Tolak Pindah ke Gunungpati	168
Lampiran 6	AD/ART P3BS	169
Lampiran 7	Puluhan PKL Minta Kejelasan Tempat Relokasi	180
Lampiran 8	Pemkot Diminta Siapkan Tempat Relokasi	181
Lampiran 9	SK Walikota Semarang Tentang Penetapan Lahan atau Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang	183
Lampiran 10	Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL	200
Lampiran 11	Transkrip Hasil Interview dengan Ketua P3BS tanggal 4 Maret 2011	207
Lampiran 12	Transkrip Hasil Interview dengan Ketua P3BS tanggal 25 Maret 2011	217
Lampiran 13	Transkrip hasil interview dengan Kabid PKL Dinas Pasar Pemkot Semarang pada tanggal 13 April 2011, Pukul 13.30 WIB	226
Lampiran 14	Transkrip Hasil interview dengan Dewan Penasehat P3BS pada tanggal 13 April 2011, Pukul 15.00 WIB	233
Lampiran 15	Transkrip hasil interview dengan Bendahara P3BS pada tanggal 18 September 2011, Pukul 08.30 WIB	244

ABSTRAK

Heni Rusmiati, S. 241008008, 2011, **“Proses Social Capital Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Paguyuban Pesona Pedagang Burung Semarang (P3BS) Di Jalan Kartini Kota Semarang”**, Pembimbing I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph. D., Pembimbing II: Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik. Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2012.

PKL erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Mereka berprofesi sebagai PKL karena tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain. PKL selalu dihadapkan pada permasalahan relokasi. Hal ini dikarenakan secara umum keberadaan PKL diabaikan. Pemerintah cenderung bertindak represif dan legalistik terhadap sektor informal ini. PKL akan tetap *survive* dan dapat keluar dari masalah kemiskinan hanya jika mereka masuk atau mempunyai *network* sebagai modal bagi mereka. PKL P3BS di Jalan Kartini selalu menolak kebijakan pemerintah mengenai relokasi terhadap mereka. Pada akhirnya PKL P3BS di Jalan Kartini membentuk suatu Paguyuban (P3BS) sebagai modal mereka yang di dalamnya terdapat interaksi-interaksi dari interaksi lokal dengan lokal maupun lokal dengan eksternal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses *social capital* dalam resolusi konflik dan untuk mempertahankan eksistensi PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dilihat dari *bonding*, *bridging*, dan *linking*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan, menafsirkan serta menginterpretasikannya. Penulis menggunakan metode fenomenologi dengan menekankan pengumpulan data melalui observasi non partisipan dan *in-depth interview* sebagai teknik pengumpulan data. Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sebagai validitas data, penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interpretatif dan intersubjektif dengan komponen utama mengolah data mentah ke dalam tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian dan disajikan dalam hasil penelitian dan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan pada tataran *bonding*, interaksi-interaksi yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan konflik karena kerjasama dan *trust* yang rendah; pada tataran *bridging*, interaksi-interaksi yang dapat meresolusi konflik adalah kerjasama yang dibangun dengan masyarakat dan perparkiran. Namun, dalam tataran ini potensi konflik timbul dari tidak ada atau lemahnya kerjasama dengan kelompok komunitas sejenis; tataran *linking*, *interpersonal relationship* dan kerjasama yang saling menguntungkan merupakan faktor utama dalam resolusi konflik yang menimbulkan diskresi-diskresi yang menguntungkan PKL. Namun, kuatnya ikatan ini resisten terhadap timbulnya konflik karena adanya kecemburuan sosial dari kelompok komunitas sejenis yang merasa terabaikan kepentingan-kepentingannya.

Penulis memberikan beberapa saran kepada PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang diantaranya : (1) memperbaiki manajemen keuangan paguyuban, (2) usahakan untuk menjalin komunikasi dengan Pedagang Karimata untuk mencari solusi terbaik dan demi kepentingan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, (3) meminta kejelasan mengenai kepastian relokasi kepada Pemerintah sehingga masih PKL tidak terombang-ambing.

commit to user

Kata kunci : *modal sosial, bonding, bridging, dan linking.*

ABSTRACT

Heni Rusmiati S. 241008008, 2011, "*Social Capital Processes In Organizing Street Vendor (A Case Study At Paguyuban Pesona Pedagang Burung (P3BS) On Jalan Kartini Semarang City*", Advisor I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph. D., Advisor II: Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si. Master Study Program of Public Administration. Post-Graduate Program Sebelas Maret University Surakarta, January 2012.

Street vendor is closely related to the poverty problems. They are working as street vendors because they have no other profession choice. Street vendor is always meet with relocation. Generally, the existence of street vendor is ignored. The government inclined to repressive and legalistic with this sector. Street vendor can survive and go out from their poverty problem if they come into network as their capital. P3BS street vendor is always refusing government relocation program and they are forming a network as their capital from local-local connection and local-external connection. The purpose of this research is explaining about Social Capital Processes in Organizing Street Vendor (A Case Study at PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) On Jalan Kartini Semarang City.

Type of this research is descriptive qualitative which is used to read, explain, and interpret the existing data. In collecting data, the writer takes phenomenology method. This method includes non participant observation and in-depth interview as collecting data technique. The writer chooses informant by using purposive sampling and snowball sampling. To minimize possible errors, the writer takes triangulation as data validation. In analyzing data, the writer uses interpretative and intersubjective analysis by meaning intersubjective construction.

The findings, P3BS Street Vendor make an organization as their umbrella to facilitate coordination and collective action. Social capital in Organizing P3BS Street Vendor is viewed into three dimensions; they are bonding, bridging, and linking. In bonding ties, P3BS Street Vendors make relationship in internal parties; in bonding ties, they coordinate to assemble money from P3BS community members as operational donation. In collecting money for operational donation, P3BS community has low awareness. It resistance to conflict already happened. Beside that, the norm of trust that is low in P3BS community is also resistance to make conflict. Bridging is essential to use in problem solving. In P3BS community, they are making relationship with the society surrounded and parking place organizer. This relationship is mutual benefit for the society and parking place organizer. But, there is also already factor in conflict sourcing. The factor is about no communication and relationship between P3BS Street Vendor and Community of Trader surrounded. In linking ties, there is mutual benefit relationship between P3BS Street Vendor and Government. The strong ties between P3BS Street Vendor, LBH, and someone who has authority in Semarang City make P3BS Street Vendor saves. P3BS Street Vendor is given discretion from this tie. They can do trading activity on Jalan Kartini for a long time or uncertain time. But, linking ties make Community Trader surrounded Jalan Kartini feel jealous. It is because the community of trader surrounding Jalan Kartini interest is becoming ignored.

There are some suggestions to P3BS Street Vendors, they are: (1) changing financial management, (2) try to communicate and find a good solution that is mutually beneficial with Karimata's traders, (3) Asking to the government about relocation certainty.

commit to user

Key words: social capital, bonding, bridging, and linking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industrialisasi menyebabkan lahan pertanian di desa berkurang. Hal ini dikarenakan lahan pertanian berubah menjadi lahan industri sehingga banyak petani kehilangan mata pencahariannya. Perubahan lahan pertanian menjadi gedung-gedung industri mengakibatkan banyak pengangguran atau setengah pengangguran karena kesempatan bekerja di sektor pertanian semakin berkurang. Alternatif lepas dari kemiskinan di desa adalah pergi keluar desa dengan melakukan migrasi. Petani masuk sektor informal diperkotaan dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang asongan, buruh bangunan, tukang becak, petugas kebersihan, dan sebagainya; hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya pilihan peluang kerja lain. Sementara itu, sebagian penduduk yang masih bertahan di desa mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan terlibat pada kegiatan industri kecil-kecilan dan industri rumah tangga karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian. Jadi, Kemiskinan kota sebagian merupakan persoalan yang dibawa dari desa. Masyarakat miskin kota kebanyakan adalah orang-orang urban. Mereka banyak menjadi PKL di perkotaan karena merasa tidak ada pilihan lain sehingga dengan menjadi PKL merupakan pilihan untuk bertahan hidup.

Pendidikan kaum migran miskin yang umumnya rendah dan tidak memiliki keterampilan yang memadai membuat mereka tidak mampu masuk atau mendapat pekerjaan di sektor formal sehingga mereka memilih membuat usaha kecil, kebanyakan sektor perdagangan dan jasa : Pedagang keliling/asongan/PKL, petugas

kebersihan, tukang becak, dan sebagainya; karena sektor perdagangan merupakan sektor yang paling mudah dimasuki maka umumnya mereka memilih sektor ini. Hal ini dikarenakan sektor perdagangan bisa dimasuki meskipun tidak memiliki modal yang besar selain itu juga karena daya serapnya yang luar biasa yaitu bisa menampung orang dalam jumlah tak terbatas. Nasikun (1980:17) mengatakan “sektor perdagangan paling mudah dimasuki karena modal tidak harus besar, daya serapnya luar biasa, dan bisa menampung orang dalam jumlah tak terbatas”.

Selain karena hal di atas juga karena maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ketidakmampuan Pemerintah menyediakan lapangan kerja, banyaknya Perusahaan-Perusahaan yang tidak mampu menyerap tenaga kerja akhir-akhir ini membuat pengangguran semakin banyak. Akhirnya, karena tidak adanya solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah membuat Masyarakat lari ke sektor informal hanya untuk sekedar mencari sesuap nasi, karena merasa tidak mendapatkan dan sulit mencari pekerjaan di sektor formal.

Angka pengangguran yang meningkat ini membuat banyak bermunculan PKL (Pedagang Kaki Lima) di perkotaan yang merupakan bagian dari sektor informal. Usaha informal merupakan pilihan alternatif sebagai lahan pekerjaan baru dikarenakan lebih mudah dimasuki, dengan modal kecil dapat berjualan untuk mendapatkan penghasilan. Dapat dikatakan bahwa sektor informal justru dapat membantu Pemerintah dalam menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama timbulnya PKL diperkotaan adalah karena adanya urbanisasi yang dilakukan *commit to user*

penduduk dari desa ke kota. Hal ini senada dengan pendapat Bromley (1991:230, Mulyanto, 2007:74) yang mengatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi yang padat modal, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan”.

Umumnya keberadaan PKL sering diabaikan, dikesampingkan bahkan tidak didukung oleh Pemerintah meskipun pada kenyataannya jika PKL berada di bawah naungan SK Walikota maka hal ini dapat menambah PAD (Pendapat Asli Daerah) dengan menarik retribusi dari PKL. Namun dalam perkembangannya, keberadaan PKL sering dipandang ilegal dan liar sebagai kelompok marginal (pinggiran) di perkotaan yang sering menimbulkan berbagai persoalan. PKL sering diidentikkan dengan kekumuhan, mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat, liar, merusak keindahan, seakan hal ini sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah Kota/Kabupaten berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dianggap sebagai bagian dari masalah. Upaya penertiban sebagaimana sering diekspose oleh media televisi maupun cetak sering kali berakhir bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen Masyarakat lainnya, tidak jarang PKL pun melakukan unjuk rasa.

Keberadaan PKL terkadang juga diperlukan oleh sebagian masyarakat. Dengan alasan, harga yang ditawarkan lebih rendah jika dibandingkan dengan yang

commit to user

ditawarkan oleh sektor formal terhadap barang yang sama. PKL mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah dengan keberadaan PKL maka akan bisa menggerakkan ekonomi daerah karena dari sisi ini mereka boleh dikatakan bisa mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan bahkan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Kadang mereka dikatakan sebagai pahlawan pengentasan kemiskinan jika hal ini dari sisi positifnya sedangkan sisi negatifnya adalah mereka (PKL) sering membuat *traffic jam* (lalu lintas macet), kumuh, dan merusak keindahan lingkungan. Hal ini terkait dengan pendapat Widodo (dalam Tri Widodo W. Utomo. *PKL masalah atau solusi www.gmail.com*) mengatakan bahwa “keberadaan PKL menawarkan banyak keuntungan. Yang terpenting adalah menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi kaum miskin dan pengangguran. Sebagian dari mereka juga berjasa dalam memperbaiki atau mengolah kembali barang-barang bekas atau buangan seperti elektronik, pakaian, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian, mereka juga menawarkan barang dengan harga sangat murah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. Di sisi lain, mereka memiliki daya fleksibilitas (waktu, tempat, komoditas, harga, dsb) yang tinggi sebagai kunci untuk dapat bertahan hidup di tengah persaingan antar PKL yang sedemikian ketat”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Bab I yang berisi Ketentuan umum, Pasal 1 mengatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan atau *commit to user*

mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain”. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi sektor informal ini, karena Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, serta menata masyarakatnya. Dalam buku yang berjudul *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance For the Poor (2001)* (dalam Widodo: 2010) Robinson mengatakan bahwa munculnya Pedagang kecil informal merupakan konsekuensi dari disfungsi kebijakan ekonomi. Mengacu pada pendapat ini maka permasalahan PKL akan hilang dengan sendirinya jika program pembangunan ekonomi Pemerintah mampu menghidupkan dinamika usaha kecil dan menengah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jadi, jelaslah bahwa yang semestinya paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Pemerintah (Tri Widodo W. Utomo. *PKL masalah atau solusi. www.gmail.com*).

Masalah PKL bukan hanya tanggung jawab Pemerintah dalam menyelesaikannya tetapi juga merupakan urusan semua komponen yang ada seperti masyarakat di sekitar PKL itu sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha, akademisi. Singkatnya, semua *stakeholder* yang ada di lingkungan PKL tidak boleh menutup mata terhadap fenomena merebaknya PKL di lingkungan mereka tetapi diharapkan mampu dan berkontribusi untuk ikut terlibat dalam pemecahan masalah PKL. Hal ini dikarenakan orang-orang yang terjun dan memilih mata pencaharian sebagai PKL pada umumnya memiliki modal yang terbatas sehingga tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain sehingga PKL merupakan tanggung jawab semua pihak dan perlu ditangani dengan bijaksana dan tidak harus *commit to user* selalu berakhir dengan kekerasan. Pada umumnya PKL diperlakukan secara tidak

manusiawi bahkan dalam hal penanganannya selalu dengan kekerasan. Pemerintah cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan PKL.

Ketidakpedulian Pemerintah dapat dilihat dengan timbulnya konflik antara Pemerintah dengan PKL seperti yang diberitakan pada sebuah media massa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 pukul 03.00 WIB dimana ada unjuk rasa ratusan Pedagang Kaki Lima yang memprotes larangan berjualan di Jalan Kartini Semarang, Jawa tengah yang nyaris ricuh. Pedagang tetap menggelar dagangan saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melarang berjualan dengan membuat barikade di Jalan Kartini.

Aksi Pedagang itu dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengumumkan larangan berjualan di kawasan hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 2 ayat 2 mengenai Pengaturan Tempat Usaha. Pedagang burung dan sangkar burung lalu berorasi menuntut Pemerintah Kota Semarang mencabut Peraturan Daerah (Perda) tersebut atau memberikan lahan pengganti lokasi berjualan para Pedagang. Aksi sempat berubah tegang saat terjadi keributan antara sesama pedagang. Baku hantam bisa dihindari setelah mereka dipisah. Pedagang mengatakan tetap akan berjualan di Jalan Kartini sampai tuntutan mereka dipenuhi (Metrotvnews.com), berita terkait dapat dilihat pada lampiran halaman 151.

Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di atas nyaris ricuh karena PKL mengadakan perlawanan. Akibat dari posisi yang tertekan maka pada akhirnya muncullah Keberanian PKL untuk melakukan perlawanan sebagai akibat dari adanya sebuah proses akumulasi

dari berbagai fenomena yang melatar belakanginya. Alisjahbana (2004, dalam ringkasan disertasi Alisjahbana “*PKL Versus Kebijakan Pemkot Surabaya (Sebab-Sebab dan Strategi Perlawanan Kelompok Marginal di Perkotaan)*”, yang diakses melalui www.facebook.com pada tanggal 15 Januari 2012 pk. 08.30 wib) mengatakan bahwa “Fenomena yang melatar belakanginya timbulnya keberanian untuk melakukan perlawanan PKL terhadap Pemerintah di antaranya ; pertama, adanya tindakan penertiban atas nama penataan yang pada kenyataannya selalu menggunakan pendekatan represif dan bukan persuasif. Pendekatan represif sudah dapat dipastikan selalu memakai tindakan kekerasan dalam penertiban para PKL. Para pelaku penertiban umumnya terdiri dari aparat Satpol PP, para Preman, Polisi dan Anggota Militer (AD) yang memang diberi tugas untuk penataan. Kedua, sikap tidak peduli dari pihak Pemerintah Kota terhadap keberadaan PKL serta kontribusi sektor informal khususnya PKL terhadap perekonomian kota juga menjadi penyebab yang lain. Bahkan proses marginalisasi terhadap kelompok ini terus berlangsung. Kucuran segar dari berbagai sumber kredit usaha tidak pernah sampai apalagi dinikmati oleh para PKL. Pendek kata mereka merasa tidak pernah diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kota. Para PKL ini juga belum pernah merasakan kebijakan Pemerintah Kota yang memperhatikan dan menguntungkan dirinya, alih-alih menguntungkan, diakui eksistensinya saja belum pernah. Akibatnya, relasi antara Pemerintah Kota dengan para PKL menjadi tidak harmonis dan dari sisi kekuasaan, jelas PKL tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ketiga, Suara dan aspirasi para PKL tidak pernah ditanggapi atau didengar oleh Pemerintah Kota. Setiap perumusan kebijakan yang menyangkut PKL sudah dapat dipastikan Pemkot tidak akan mengikut sertakan kelompok ini. Tetapi

commit to user

anehnya, para PKL selalu dipaksa untuk mentaati semua peraturan yang mengatur dirinya. Keempat, adanya stigma negatif yang selama ini sengaja diekspos oleh Pemerintah Kota tentang keberadaan PKL”.

Banyak pemerintah kota yang tidak memahami, tidak menyadari dan tidak mengakui peran dan kontribusi sektor informal. Kebijakan penanganan cenderung bersifat represif dan legalistis yaitu membersihkan dari wajah kota dengan paksaan atas dasar pertimbangan penertiban umum; memilih penertiban ketimbang penataan. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang dengan melakukan penertiban atau penggusuran terhadap PKL Kartini (istilah umum yang sering dipakai oleh masyarakat Semarang untuk menyebut PKL atau Pedagang Burung di Jalan Kartini) seperti yang diberitakan Metrovnews di atas.

Pada umumnya orang yang menjadi PKL adalah orang miskin karena terbatasnya modal dan ketidakmampuan memasuki sektor formal sehingga PKL identik dengan miskin. Orang miskin akan tetap *survive* dan keluar dari perangkap kemiskinan apabila mereka memiliki jaringan atau kelembagaan sosial yang dapat melindungi mereka. Orang miskin hanya mungkin keluar dari perangkap kemiskinan melalui proses perubahan struktural yang mendasar.

Else Oyen (2002:14) mengatakan bahwa “*if a majority of the poor are neither able to develop useful networks for increasing their own social capital on a large scale, nor given entry into those networks where social capital flourishes, how can social capital then be an efficient instrument for poverty reduction? The conclusion must be that at present social capital formation is not useful instrument for poverty reduction*”. Jika mayoritas orang miskin tidak mampu membangun atau masuk ke

dalam suatu *network* dalam skala yang besar untuk meningkatkan modal sosial yang mereka miliki maka pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil. Hal ini dikarenakan modal sosial merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik, dan kesempatan-kesempatan kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kaum miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan bukannya mendesak dan menekan mereka ke pinggir atau ke posisi ketergantungan.

Dalam permasalahan PKL diperlukan adanya peran serta dari semua pihak. Masyarakat sekitar dapat berperan serta dengan cara berinteraksi dengan PKL dan menerima keberadaan PKL di sekitar mereka karena bagaimanapun keberadaan PKL tidak selalu negatif tetapi juga ada sisi positifnya. Sisi positif PKL dapat dilihat dengan adanya PKL di sekitar tempat-tempat usaha seperti pusat perbelanjaan. Sektor swasta atau privat diharapkan memberikan ruang yang lebih luas kepada PKL untuk berpartisipasi untuk mencari nafkah dengan diizinkan untuk mengais rezeki di sekitar tempat usaha mereka. Di sekitar pusat perbelanjaan keberadaan PKL sangat diperlukan contohnya penjual makanan; para pekerja di pusat perbelanjaan biasanya menggunakan jasa penjual makanan atau makan di kedai milik PKL hal ini dikarenakan keterbatasan dan ketidakmampuan mereka untuk makan di restoran. Ini merupakan salah satu contoh sisi positif keberadaan PKL. Pihak-pihak lain seperti kalangan terpelajar diharapkan mampu memberikan bantuan berupa pemikiran-pemikiran atau masukan-masukan kepada *policy maker* untuk merumuskan dan

menetapkan kebijakan yang relevan dengan kondisi PKL yang tidak hanya mengedepankan penggusuran namun memberikan solusi untuk jangka panjang dan memikirkan keberlangsungan hidup PKL sebagai kaum lemah dan keberadaannya selalu dipandang sebelah mata.

Di wilayah Semarang para PKL tersebar di berbagai daerah, di pusat-pusat keramaian, di tempat-tempat publik seperti rumah sakit, pasar-pasar tradisional. Hal ini pun menimbulkan beberapa persoalan seperti kemacetan lalu lintas ataupun dipandang sebagai *stakeholders* yang merusak keindahan kota. Termasuk di Jalan Kartini Semarang, yang kondisinya belum tertata dengan baik, masih banyak PKL P3BS yang berjualan di median Jalan Kartini. Tidak hanya untuk berjualan burung namun juga pakaian, sepatu dan lainnya. Penggunaan median jalan untuk berjualan berpotensi memicu konflik antara PKL dengan stakeholder lainnya karena perebutan sumber daya yang langka. PKL P3BS Jl. Kartini dianggap mematikan pasar burung Karimata yang merupakan Pasar Burung yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah.

Komunitas PKL P3BS di Jalan Kartini Semarang jumlahnya cukup banyak, sehingga koordinasi di antara mereka menjadi sangat dibutuhkan. Koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan suatu perkumpulan maupun suatu paguyuban PKL. Kekompakan, kerukunan antar PKL sangat penting dilakukan, tetapi ketika kekompakan di antara mereka memudar konflik-konflik di antara mereka akan bermunculan, baik konflik antar pedagang maupun konflik dengan Pemerintah. Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, Penulis melihat adanya suatu proses terbentuknya *social capital* di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya **PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS)**.

Oleh karena hal di atas Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana proses *social capital* yang ada di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang untuk menjawab segala problema atau konflik-konflik yang dihadapi oleh PKL Kartini sebagai resolusi konflik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah “Bagaimana proses *social capital* dalam penataan Pedagang Kaki Lima PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses *social capital* dalam penataan Pedagang Kaki Lima PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang.
2. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran yang spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat meliputi: *commit to user*

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi *stakeholders* dalam resolusi konflik.
2. Tersedianya informasi tentang peranan *social capital* di dalam sebuah komunitas PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dan interaksi-interaksi yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi mereka di Jalan Kartini.
3. Memperkaya khasanah informasi akademik, khususnya berupa hasil permasalahan yang terjadi, demi mewujudkan alternatif pemecahan masalah yang timbul karena keberadaan PKL.
4. Pada akhirnya penelitian ini tidak semata-mata diorientasikan pada kepentingan akademik, namun juga diorientasikan kepada kepentingan praktis bagi peningkatan hubungan interaksi antara PKL dengan *stakeholders'* terkait.
5. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan peluang bagi penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Social Capital dan Governance*

Menurut Sofian Effendi (Sofian Effendi staff ugm.ac.id), istilah “*government*” dan “*governance*” di dalam kamus seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau Negara. *Government* atau Pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara.

Definisi *government* dan *governance* dalam Kamus Webster membuktikan pendapat Sofian Effendi di atas. *Government* diartikan sebagai “*the exercise of authority over a state, organization, etc; a system of ruling, political administration, etc; those who direct the affairs of a state; administration*”. Sedang *governance* diartikan sebagai “*the action, function, or power of government*” (dalam Sofian Effendi, *membangun good governance : tugas kita bersama*, sofian effendi.staff.ugm.ac.id).

Sesungguhnya *governance* memiliki arti yang berbeda dengan *government*. *Governance* mempunyai makna yang lebih luas daripada *Government*. *Governance* adalah proses atau fungsi ke pemerintahan yang melibatkan peran banyak actor di lingkup Negara, bisnis maupun masyarakat sipil.

Ada beberapa pendapat mengenai makna *governance* :

UNDP dan World Bank (dalam Sofian Effendi staff ugm.ac.id) *commit to user*
Governance merupakan sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku,

jaringan dan institusi di pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan public. Dalam *governance* aktor-aktor, unsur-unsur masyarakat memiliki kewenangan untuk ikut mempengaruhi dan terlibat dalam proses kebijakan untuk merespon masalah dan kepentingan publik.

Konsep "*governance*" merupakan perluasan dari konsep "*government*". Konsep *government* (pemerintah) sebagai lembaga yang selama ini memonopoli penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas yang dihadapi oleh Negara dalam kegiatan penyelenggaraan urusan public. Konsep *governance* menunjuk pada pelibatan lembaga lain non-negara (pasar dan masyarakat) dalam penyelenggaraan urusan publik. Dengan memberikan peran dan ruang yang lebih luas pada lembaga non-pemerintah, kegiatan pemerintahan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel pada kepentingan publik (Dwiyanto, 2003).

Menurut Sofian Efendi perbedaan paling utama antara konsep "*government*" dan "*governance*" terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep "pemerintahan" berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuatan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan. Menurut Sofian Effendi mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-*capture*

makna tersebut yakni *“the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development”*. Suatu proses dimana elemen-elemen yang ada pada suatu komunitas mempunyai *power* dan *authority* dan juga memiliki pengaruh serta peranan dalam pembuatan kebijakan terkait dengan kehidupan ekonomi dan *social development*.

Menurut Bowles dan Gintis (2002:21) *“communities are part of a good governance because they address certain problems that cannot be handled either by individuals acting alone or by markets and government”*. Selanjutnya Bowles dan Gintis juga mengatakan bahwa *“community governance is the set of small group social interaction that, with market and state, determine economic outcomes (2002:21)*. Jadi, komunitas merupakan bagian dari *good governance* karena mereka menunjuk pada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat ditangani baik oleh individu-individu secara individual maupun oleh sektor swasta dan Pemerintah. Oleh karena itu *community governance* merupakan sekelompok kecil masyarakat yang melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. *Community governance* erat kaitannya dengan *social capital* karena dalam aktualisasinya *social capital* berkenaan dengan bagaimana suatu komunitas mengelola diri mereka sendiri atau *community governance*.

Social capital generally refers to trust, concern for one’s associates, a willingness to live by norms of one’s community and to punish those who do not (Bowles and Gintis, 2002:419). *Social capital* pada umumnya sering dikaitkan pada *trust* (kepercayaan), urusan tentang organisasi atau paguyuban, kesediaan

untuk hidup dengan norma-norma kepercayaan yang ada dalam suatu komunitas, dan menghukum mereka yang tidak mengindahkan norma-norma tersebut, meskipun bentuk hukuman atau sanksi tersebut tidak selalu dalam bentuk fisik tetapi bisa saja hukuman sosial atau psikologis, seperti dikucilkan dari kelompoknya atau tidak dihargai oleh rekan-rekan yang ada di dalam komunitasnya.

Uphoff (2000) mengatakan bahwa "*the analysis delineates two main categories of social capital : structural (roles, precedents, and procedures), and cognitive (norms, values, attitudes, and beliefs)*" jadi *social capital* bisa dipahami dalam dua pengertian yang berbeda tetapi keduanya saling terkait satu sama lain, yakni dipahami dalam pengertian struktural dan kognitif. Selain itu Uphoff (dalam Krishna dan Shrader, 2000:5) juga mengatakan bahwa "*cognitive element predispose toward mutually beneficial collective action, structural elements of social capital facilitate such action*". Elemen-elemen yang ada pada *cognitive* memiliki pengaruh yang besar dalam *collective action* untuk kepentingan bersama, sedangkan *structural elements social capital* mempermudah dalam melakukan *action* tersebut. Kategori *social capital* dalam pengertian struktural ditujukan pada berbagai organisasi sosial beserta peran dan aturan-aturan, sedangkan kategori *social capital* dalam pengertian kognitif didasarkan pada proses mental dan psikologis dalam domain ide-ide dan mencakup norma-norma, nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan.

Grafton (2005:133) mengatakan bahwa "*as a type of "capital", social capital can be added to (by volunteering) and subtracted from (by criminal*

behavior) on an individual level, by collective actions (such as public education), and is also affected by a range of socio-economics factors (such as per capita income, age structure, ethno linguistic divisions, rule of law, etc). Social capital can only exist at a group or community level". Sebagai salah satu jenis "capital atau modal", dapat ditambahkan juga bahwa di dalam *social capital* ada sikap sukarela (*volunteer*) dan juga dapat mengurangi tingkah laku kriminal pada level individu yaitu dengan melakukan tindakan secara kolektif. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (pendapatan, peraturan perundangan, dan lain-lain. *Social capital* hanya dapat eksis dalam suatu kelompok atau level *community*. Oleh karena pengertian *social capital* tidak hanya bisa mengacu pada berbagai organisasi social, maka *social capital* sering diidentikkan dengan pengertian *networks*, karena di dalamnya mengandung berbagai makna jaringan yang masing-masing memiliki lingkup tersendiri, meskipun memungkinkan masing-masing lingkup jaringan tersebut saling berinteraksi. Melalui jaringan atau *networks* suatu komunitas yang tergabung dalam *network* akan mampu memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi sendiri yaitu dengan bantuan dari *network* yang dibangun sehingga kemudian muncul istilah *governance* tanpa *government*; yang artinya bahwa komunitas (PKL) bisa menata dirinya bersama kelompoknya untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara mandiri tanpa campur tangan dari Pemerintah.

Senada dengan pendapat Grafton di atas lebih lanjut Putnam (2000; dalam Mark Smith, 2005:3, diakses melalui www.infed.org/biblio/social_capital.htm) mengatakan *social capital* memiliki arti yang sangat penting bagi suatu komunitas

ia berpendapat bahwa “*why social capital is important: first, social capital allows citizens to resolve collective problems more easily; second, social capital greases the wheels that allow communities to advance smoothly. Where people are trusting and trustworthy; third, social capital improves our lot is by widening our awareness of many ways in which our fates are linked; besides, the networks that constitute social capital also serve as conduits for the flow of helpful information that facilitates achieving our goals.* *Social capital* memiliki arti penting karena *social capital* membuat masyarakat dapat dengan mudah menyelesaikan masalahnya secara bersama; *social capital* ibarat minyak pelumas roda yang membuat suatu komunitas dapat melangkah maju secara perlahan dengan sifat saling percaya; *social capital* memperluas kesadaran kita akan segala cara yang menyatukan takdir; kemudian melalui interaksi atau *network* memudahkan komunitas untuk memperoleh akses informasi yang memudahkan mereka untuk meraih tujuannya. *Social capital* penting dalam upaya kemungkinan memecahkan suatu masalah melalui interaksi-interaksi yang dilakukan. Karena *social capital* pada intinya mengacu pada hubungan di antara orang-orang yang ada dalam suatu komunitas.

2. Definisi *Social Capital*

Dalam literatur ilmu politik, sosiologi dan antropologi yang kesemuanya bisa dijadikan sebagai pendekatan dalam bidang administrasi Negara (*public*) dalam memahami hubungan horizontal antara individu dalam sebuah komunitas/organisasi atau antar komunitas dan hubungan vertikal antara komunitas dengan pemerintah. Putnam mengatakan bahwa:

“Social capital merupakan “Whereas physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of individuals, social capital refers to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them. In that sense social capital is closely related to what some have called “civic virtue.” The difference is that “social capital” calls attention to the fact that civic virtue is most powerful when embedded in a sense network of reciprocal social relations. A society of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in social capital. (Putnam, 2000: 19)”. Modal sosial pada intinya merupakan hubungan antara individu-individu yang di dalamnya ada empat unsur penting yang merekatkan mereka menjadi satu kesatuan. Ke empat unsur tersebut adalah *social networks*, *norms of reciprocity*, *trustworthiness* dan *reciprocal social relations*.

Dari pendapat Putnam di atas dikatakan bahwa *civic virtue* lebih *powerful* dibandingkan dengan *social capital*. *Civic virtue*, such as *solidarity*, *reprocity*, *trust* and *cooperation for mutual benefit* (Miguel Darcy De Oliveira, dalam UNESCO 2002:18). *Civic virtue* seperti *solidaritas*, *saling berbagi*, *trust* dan *cooperation* untuk kepentingan bersama. Pendapat ini relevan dengan apa yang dikatakan Putnam di atas bahwa *civic virtue* lebih *powerful* dibandingkan dengan *social capital* itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan fondasi dari *social capital* merupakan *civic virtue* (seperti *solidaritas*, *saling berbagi*, *trust* dan *cooperation*) itu sendiri. Jika fondasi yang dibangun tidak kokoh maka bangunan *social capital* akan runtuh.

Menurut James Coleman (1994:302), “*social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions individuals who are within the structure*”. Coleman lebih melihat *social capital* sesuai dengan fungsinya. Karena *social capital* mempunyai dua karakteristik yang mana semuanya terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan dengan *social capital* ini memudahkan para aktor yang terlibat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan struktur atau aturan yang ada dan telah disepakati bersama.

Woolcock (2001) menambahkan pengertian *social capital* lebih mendalam dilihat dari aspek apa yang mendasari terbentuknya *social capital* itu sendiri. Woolcock mengatakan bahwa *social capital* merupakan “*the norms and networks that enable people to act collectively*”. Terinspirasi dari berbagai definisi dan pendapat dari berbagai pihak untuk kepentingan kajian hubungan antar individu dan institusi dimana individu berada dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang kemudian diadopsinya, World Bank mendefinisikan *social capital* secara lebih lengkap sebagai “*the institutions, relationships and norms that shape the quality and quantity of society’s social interactions... [it] is not just the sum of institutions which underpin a society it is the glue that holds them together*” (The World Bank 1999, dalam Stefanie B Hib, 2006:84). Definisi inilah yang kemudian diadopsi untuk kepentingan penelitian ini untuk mengawali penjelasan konsep *social capital*.

3. Konsep *Social Capital*

Dengan definisi-definisi *social capital* yang dibahas pada sub bab di atas, sejumlah pendekatan telah dilakukan oleh para penulis terdahulu terhadap gagasan *social capital*. Pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan horizontal dan vertikal, dan kombinasi keduanya. Agar mudah difahami Penulis mencoba menyusun atau mengkerangkakan *social capital* mulai dari konsep dan aktualisasi dari *social capital* itu sendiri. Pada tataran konsep *social capital* dapat dilihat dari 3 (tiga dimensi) yaitu : ruang lingkup atau cakupannya, bentuk atau wujud *social capital*, dan dari *channels social capital* itu sendiri seperti yang diutarakan oleh Grootaert dan Van Bastelaer (2001:4) “*the concept of social capital can be viewed along three dimensions. They are its scope (or unit of observation), its forms (or manifestations), and the channels through which it affect development*”.

a. *The Scope of Social Capital*

The scope of social capital ranges from the micro to the macro level (Grootaert and Van Bastelaer, 2001). Cakupan *social capital* disusun dari tahapan mikro ke level makro. Krishna dan Shrader (2000:4) memperjelas pendapat Grootaert dan van Bastelaer tersebut, Ia mengatakan bahwa “*sociologist generally agree the shape of any network horizontal or vertical, homogenous or heterogenous, formal or informal - does not by itself indicate much about the nature of human relationship within that network*”. Para sosiolog berpendapat bahwa apapun bentuk *network* yang dibangun baik *commit to user* itu horizontal atau vertikal, homogen atau heterogen, formal atau informal

tidak hanya mengacu pada bentuk *network* itu sendiri namun lebih pada hubungan secara alamiah yang terbangun antar manusia atau individu yang ada pada *network* tersebut.

Analysis of social capital at the micro level is usually associated with face to face interaction between and among individuals (Turner, 1999; dalam Hyung Jun Park dan Richard C. Feiock, diakses melalui www.spaef.com/file.php). Di lain pihak, Putnam memperjelas pendapat Turner, Ia mengatakan “*and those features of horizontal relationship, such as networks of individuals or households, and the associated norms and trust, that generate externalities for the community as a whole*” (Putnam, 1993; dalam Hyung Jun Park dan Richard C. Feiock, dalam Hyung Jun Park dan Richard C. Feiock, diakses melalui www.spaef.com/file.php). *Social capital* pada level mikro biasanya melihat pada hubungan atau interaksi di dalam dan antar individu yang biasanya dalam bentuk hubungan horizontal seperti network atau interaksi antar individu-individu dan hubungan norma-norma dan *trust* yang menyatukan suatu *community* sebagai satu- kesatuan. Penulis mencoba menjabarkan cakupan atau *scope social capital* tersebut dengan melihat hubungan atau pendekatan-pendekatan yang ada dilihat dari pendekatan horizontal, horizontal dan vertikal serta kombinasi antara keduanya.

Sudarmo (2011:195) mengatakan “ada 3 pendekatan sosial kapital yaitu pendekatan horizontal, pendekatan horizontal dan vertikal serta kombinasi antara keduanya”. Pendekatan pertama yaitu pendekatan

horizontal. Pendekatan horizontal yang merupakan pendekatan yang sangat sempit dalam memandang *social capital* adalah terkait dengan karya Putnam (1993) yang memusatkan perhatian utama pada hubungan-hubungan horizontal yang terdiri dari jaringan-jaringan sosial (*social networks*) dan hubungan-hubungan norma yang memiliki efek terhadap produktivitas komunitas dan kesejahteraan. Pada tingkatan ini *social capital* memudahkan koordinasi dan kerjasama.

No doubt the mechanism through which civic engagement and social connectedness produce such result "social capital" refers to features of social organization such a networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit (Putnam, 1995). Putnam memperjelas lagi dengan mengatakan bahwa tidak dapat diragukan lagi atau sudah sangat pasti jika melalui mekanisme membangun keterlibatan sipil dan hubungan sosial maka "*social capital*" akan menghasilkan sesuatu yang perhatian utamanya mengarah pada *social organization* seperti *networks*, *norms*, dan *social trust* yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama (komunitas yang ada membangun *social capital*).

Untuk kepentingan penelitian ini, pemahaman *social capital* dilakukan dengan melihat hubungan antar PKL dalam kelompoknya dan hubungan antar kelompok Pedagang Kaki Lima.

Kedua, pendekatan horizontal dan vertikal. Pendekatan terhadap *social capital* kedua adalah terkait dengan karya Coleman (1988:5) ia mengatakan bahwa "*commit to user* *unlike other forms of social capital, social capital*

inheres in the structure of relations between actors and among actors.

Pendapat Coleman ini memperluas konsep *social capital* mencakup hubungan *vertical* dan *horizontal* antar orang-orang. *Social capital* didalamnya terdapat struktur dari hubungan yang dibangun di antara aktor-aktor yang terlibat. Pendekatan horizontal dan vertikal berguna selain untuk memberikan rasa kebersamaan, tujuan bersama, identitas tetapi juga untuk menyatukan hubungan antar komunitas karena ada bagian-bagian sosial yang terpecah seperti etnisitas, agama, status sosial ekonomi. Jika hubungan atau ikatan yang dibangun hanya terpaku pada ikatan-ikatan horizontal maka tujuan-tujuan yang dapat dicapai hanya tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan sempit semata karena ikatan ini membuat akses informasi menjadi terhambat sebagai akibat tidak adanya komunikasi maupun interaksi dengan dunia atau komunitas di luar komunitas. Ikatan atau hubungan maupun interaksi dengan dunia luar atau komunitas lain sangat diperlukan bagi keberlangsungan dan kemajuan komunitas yang dibangun. Dengan menjalin hubungan antar komunitas maka akan mempermudah akses informasi yang kemungkinan akan memberikan bantuan atau masukan yang sangat penting bagi komunitas, seperti masalah permodalan. Melalui interaksi dengan komunitas lain dimungkinkan masalah permodalan dapat diatasi seperti dengan bantuan permodalan.

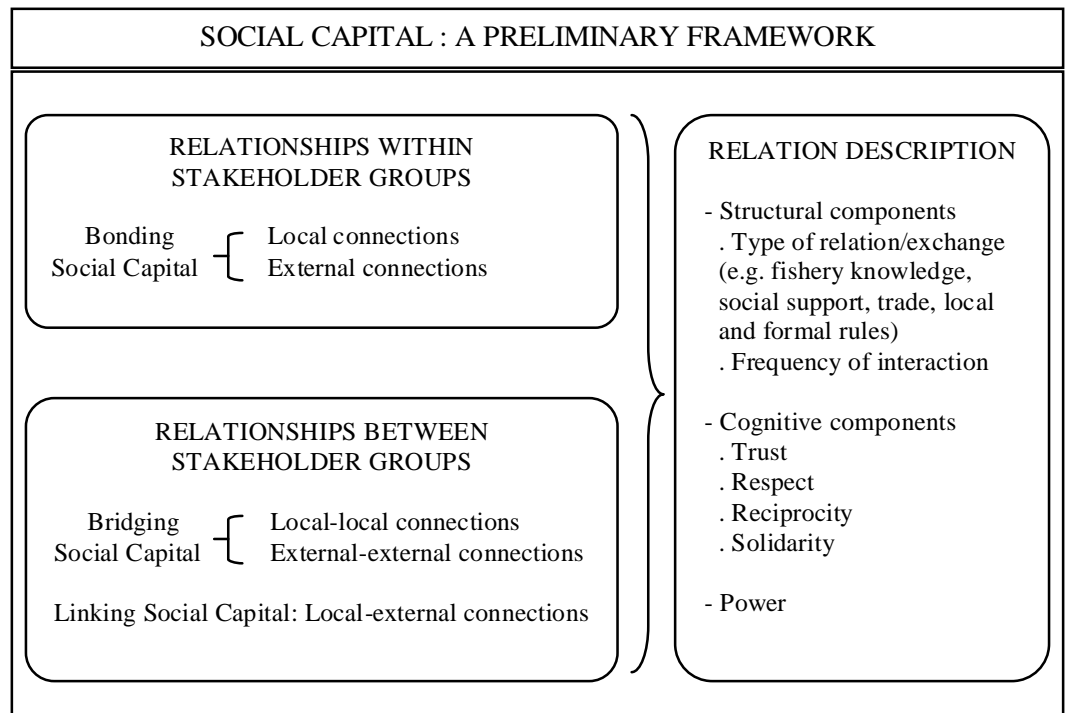
Terkait dengan pendapat Sudarmo (2011:196) pendekatan *social capital* yang ketiga yaitu pendekatan cara memandang *social capital* secara *commit to user* luas yang mencakup lingkungan sosial dan politik yang membentuk struktur

social dan memungkinkan norma-norma menjadi berkembang. Pendekatan seperti ini mencakup pentingnya *social capital* bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur institusional seperti pemerintah, rejim politik, aturan hukum, sistem peradilan, kebebasan sipil dan politik. Pendekatan terakhir atau *scope of social capital* yang terakhir ini merupakan *social capital* pada level makro karena seperti yang telah dijelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya bahwa pada level atau pendekatan terakhir ini di dalam *social capital* eksis atau melibatkan hal-hal yang bersifat politik yang membentuk struktur sosial dan memungkinkan norma-norma yang ada menjadi berkembang. Grootaert dan Van Bastelaer (2001) mengatakan bahwa “*a macro view of social capital includes the social and political environment that shapes structure and enables norms to develop. This view includes the most formalized institutional relationship and structures, such as the rule of law, the political regime, the court system, and civil and political liberties.* Pada tahapan ini ketiga pilar *governance* baik itu dari Pemerintah, swasta, maupun sipil dapat berjalan beriringan. Hal ini membuat suasana menjadi lebih kondusif karena dapat menggerakkan suatu tindakan secara kolektif atau bersama-sama dalam hal pembangunan masyarakat marginal dalam hal ini PKL maupun sektor informal lainnya.

Pretty dan Ward (2001:211, dalam Micaela Trimble dan Fikret Berkes diakses melalui www.sefdec.or.th/) mengatakan hubungan-hubungan yang ada dalam *social capital* yang diistilahkan pendekatan-pendekatan dalam *commit to user social capital* seperti yang telah dijelaskan di atas. Pretty dan Ward

mengatakan ada 5 jenis hubungan atau pendekatan di dalam *social capital* yaitu : (1) *local connection among individuals within local groups and communities* (hubungan antara individu-individu di dalam kelompok dan komunitasnya); (2) *local-local connection: horizontal connection between groups within communities between communities* (hubungan lokal-lokal: hubungan horizontal antara kelompok di dalam komunitas atau antara komunitas); (3) *local-external connections: vertical connections between local groups and external agencies or organizations* (hubungan lokal-eksternal: hubungan-hubungan vertical antara kelompok-kelompok local dan agen-agen di luar organisasi atau dengan organisasi-organisasi lain); (4) *external-external connections: horizontal connections between external agencies* (hubungan eksternal-eksternal: hubungan horizontal antara agen-agen di luar organisasi); (5) *external connections: strong connections between individuals within external agencies* (hubungan eksternal: hubungan-hubungan yang kuat antara individu-individu dengan agen-agen di luar organisasi).

Kelima pendapat Pretty dan Ward di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka *Social Capital Relationship*

Sumber : Micaela Trimble dan Fikret Berkes

Participation in local networks and attitudes of mutual trust make it easier for a group to reach collective decisions and implement collect action (Grootaert dan van Bastelaer, 2001). Di dalam *social capital* juga terdapat partisipasi karenanya pendapat Grootaert dan van Bastelaer ini relevan dengan penelitian ini. Ia mengatakan bahwa partisipasi dalam interaksi-interaksi local dan sikap saling percaya membuat suatu komunitas dalam *social capital* lebih mudah untuk membuat keputusan secara kolektif dan juga melakukan tindakan secara kolektif.

b. The Forms of Social Capital

Uphoff (2000, dalam Hyung Jun Park dan Richard C. Feiock diakses melalui www.spaef.com/file.php) mengatakan bahwa “two dimension of

social capital—structural and cognitive. Dimensi sosial kapital dibagi menjadi dua yaitu struktural sosial kapital dan kognitif sosial kapital. Uphoff (2000:218) menambahkan bahwa “*the structural category is associated with various forms of social organization, particularly roles, rules, precedents and procedures as well as a wide variety of networks that contribute to cooperation, and specifically to mutually beneficial collective action (MBCA), which is the stream of benefits that result from social capital. The cognitive categories derives from mental processes and resulting ideas, reinforced by culture and ideology, specially norms, values, attitudes, and beliefs that contribute cooperative behavior and mutually beneficial collective action (MBCA)*”. Secara struktural *social capital* meliputi hal-hal seperti prosedur, aturan-aturan, tugas, dan interaksi-interaksi yang memudahkan pertukaran informasi, tindakan secara kolektif dan pembuatan keputusan dalam hal pelaksanaan tugas. Interaksi-interaksi sosial dan struktur sosial lainnya dikendalikan dengan aturan-aturan, prosedur, yang merupakan acuan dalam melakukan tindakan-tindakan. Kognitif *social capital* merupakan proses mental dan menghasilkan ide-ide yang diperkuat dengan kultur dan ideologi khususnya norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan sebagai tindak-tanduk di lingkungan mereka dan melakukan tindakan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

Menurut Grootaert dan van Bastelaer (2001) Lebih lanjut mengatakan bahwa “*cognitive social capital at the micro level (i.e. endogenous social capital) such as trust, shared norms, and informal sanction reduce* *commit to user*”

transaction costs. Reputations built through trust and reciprocity reduce information, monitoring, and enforcement costs and thus facilitate cooperation and collective action). Pendapat Grootaert dan van Bastelaer yang pertama yaitu : Kognitif *social capital* pada level mikro (*endogen social capital*) seperti *trust*, norma-norma, dan sanksi yang bersifat non formal. Reputasi dibangun berdasarkan *trust* dan saling bertukar informasi, monitoring, dan hal-hal tersebut memudahkan kerjasama dan tindakan secara kolektif.

Second, structural social capital such as associations, networks, and institutions provide an informal and formal framework to organize information sharing, coordination of activities, and collective decision making. Lebih lanjut Grootaert dan van Bastelaer mengatakan bahwa *social capital* secara struktural seperti hubungan-hubungan, interaksi-interaksi, institusi-institusi sebagai suatu kerangka yang menyediakan informal dan formal untuk saling berbagi informasi, koordinasi berbagai aktivitas, dan membuat keputusan secara kolektif.

Krishna dan Uphoff (dalam Grootaert dan van Bastelaer 2001:9) mengatakan bahwa “*rely primarily on membership in networks as a measure of structural social capital, structural social capital proxied by associational activity; cognitive social capital is proxied by measures of trust and the strength of norms of reciprocity and sharing* (Pagal, Huq and Gilligan, dalam Grootaert dan van Bastelaer, 2001:9). Jadi yang menjadi pondasi atau alasan utama pentingnya membangun keanggotaan di dalam suatu network adalah *commit to user*

melakukan interaksi-interaksi yang bersifat institusional sebagai barometer sosial kapital secara struktural didasari dengan *cognitive social capital* diwakili oleh ukuran dari *trust* dan kekuatan norma-norma dan hubungan timbal-balik antar anggota di dalam suatu komunitas. Grootaert dan van Bastelaer (2001:10) juga mengatakan bahwa “*a central of cognitive social capital is interpersonal trust*”. *Cognitive social capital* adalah *interpersonal trust*. Karena hanya dengan *trust* suatu komunitas dapat bersatu. Mereka atau dalam hal ini PKL khususnya menjalin kebersamaan, saling membantu dan melakukan tindakan secara *collective* untuk kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan dengan *trust* yang kuat sebagai fondasi hubungan mereka, mereka akan merasa “senasib sepenanggungan”.

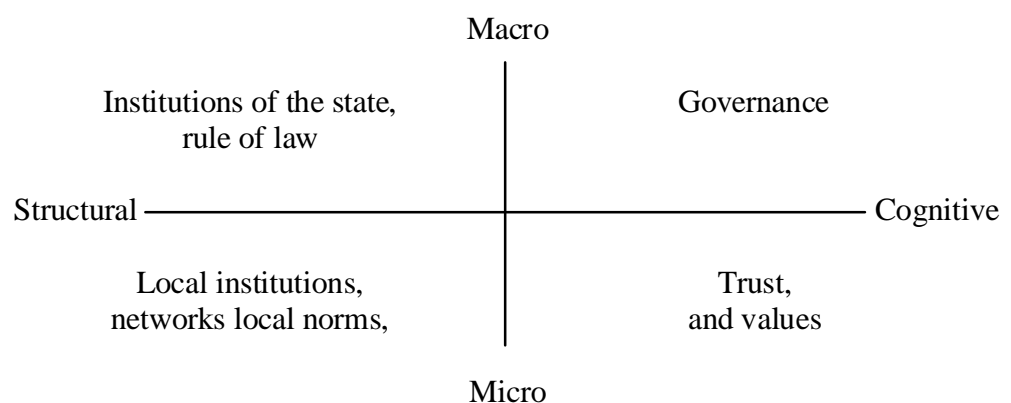
c. *Channels of Social Capital*

Grootaert dan Van Bastelaer (2001:6) mengatakan bahwa *Channels of social capital* merupakan “*Any form of social capital-material or non material-represents an asset or a class of assets that produces a stream of benefits. The stream of benefits from social capital – or the channels through it affects development-includes several related elements, such as information sharing and mutually beneficial collective action and decision making*”. Saluran atau *channels social capital* dapat dilihat dari bentuk-bentuk *social capital* baik itu material maupun non material yang menunjukkan suatu modal atau suatu jenis asset yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang berupa saluran dalam *social capital* atau *channel* ini memiliki dampak dalam pembangunan *social capital* itu sendiri

yang didalamnya terdapat beberapa elemen-elemen yang saling berhubungan seperti berbagi informasi dan *collective action* maupun pembuatan keputusan untuk kepentingan bersama. Pendapat Grootaert dalam Coleman (1988:104) lebih spesifik mengatakan bahwa “*information channels : an important form of social capital is the potential for information that inheres in social relations*”. Jadi secara spesifik *information channels* merupakan sesuatu yang penting dalam *social capital* karena potensial untuk berbagi informasi dalam hubungan sosial. Dalam hal ini *information channels* merupakan *networks* karena didalamnya sama-sama terdapat tujuan untuk mengakses informasi maupun berbagi informasi. Di dalam *network* hal tersebut merupakan keuntungan dari adanya network atau jaringan (*channels*).

Konsep *social capital* dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dengan melihat *scope* dan *form*-nya. Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Bagan Konsep Sosial Kapital



commit to user

Source : reorganized Grootaert and Van Bastelaer (2001:20).

4. Unsur-unsur *Social Capital*

Pembentukan *social capital* dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya tertentu hal ini dikarenakan berkembangnya hubungan antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta yang melakukan tindakan secara kolektif. Bentuk-bentuk *social capital* tidak pernah terbentuk dalam sebuah isolasi ataupun terpisah dari elemen-elemen pembentuknya karena bentuk-bentuk *social capital* merupakan hubungan dari ketiga elemen atau pilar *governance* tersebut (*state, private, dan society*). Tindakan kolektif yang dilakukan merupakan campuran interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika dirunut lebih jauh maka bentuk-bentuk budaya yang ditemukan dalam masyarakat yang ikut membentuk *social capital* antara lain : budaya *teposeliro* (menghargai kepentingan orang lain tetap berjalan dan cenderung memperbolehkan terus berjalan atau melakukan aktivitasnya karena pertimbangan-pertimbangan moral atau etika tertentu; misalnya membiarkan atau permisif terhadap orang berjalan yang tidak seharusnya/dilarang oleh peraturan pemerintah karena desakan kebutuhan ekonomi); budaya *ngemong roso* (berusaha bersikap ramah dan tidak menyinggung perasaan orang lain meskipun dia atau orang lain tidak setuju dengan kenyataan yang dihadapi tetapi masih dalam batas toleransi atau bisa diterima secara logika) (Sudarmo, 2008c).

Grafton (2005:754) mengatakan “*social capital has three components (trust, civic engagement and cooperation, social networks) commonly associated with its measurement*”. Menurut Grafton, *social capital* memiliki tiga komponen yaitu *trust, civic engagement dan cooperation*, serta *social network*. Ketiga

komponen ini biasanya dikaitkan sebagai ukuran *social capital* itu sendiri. Namun, dari ketiga komponen tersebut yang memiliki arti sangat penting dibandingkan dua komponen lainnya adalah *trust*. Karena hanya dengan *trust* orang akan dan mau untuk berinteraksi, bekerja sama kemudian pada akhirnya melakukan tindakan secara kolektif. Liebler dan Ferri (2004:24) mengatakan "*trust is an essential element of any sustainable network*". *Trust* merupakan elemen utama yang menopang suatu network sehingga interaksi-interaksi yang dilakukan untuk kepentingan bersama dapat diwujudkan. Dasgupta (2002, dalam Supriyono, Sasli Rais, dan Dance J. Flassy diakses melalui www.scribd.com) dengan lebih tegas mendefinisikan, *trust* sebagai daya atau semangat kemanusiaan yang jujur (altruism), berupa keinginan masyarakat untuk saling menghormati, mencintai, dan memperhatikan antar sesama manusia. Melalui *trust* orang-orang dapat bekerjasama secara lebih efektif, oleh karena ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Markus Mobius (2006:1, diakses melalui <http://www.cepr.org/>) mengatakan "*trust between contracting parties is essential for the function-ing of these informal arrangements*". *Trust* di antara pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam program-program atau rencana-rencana yang informal memiliki fungsi yang sangat penting karena hanya dengan sikap saling percaya ini maka segala sesuatu yang direncanakan dapat diimplementasikan. Tanpa adanya sikap saling percaya maka sebaik apapun program dan sekuat apapun ikatan yang dibangun di dalam kelompok atau antar kelompok tidak akan berlangsung lama. Hal ini dikarenakan sikap saling percaya

commit to user

merupakan fondasi utama untuk terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Jika sikap saling percaya tidak ada maka yang timbul adalah saling curiga yang pada akhirnya akan menggerogoti ikatan kerjasama yang dibangun dan berakhir dengan sikap saling bermusuhan atau konflik.

Radius kepercayaan yang luas (*wide-radius trust*) akan menentukan efektivitas dan kualitas hubungan sosial. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa semakin tinggi dan luas tingkat kepercayaan maka semakin efektif dan berkualitas hubungan sosial antara anggota pedagang kaki lima, antar kelompok PKL dan antar kelompok PKL dengan komunitas lain non-PKL dan Pemerintah. Hal ini senada dengan pendapat Putnam (2000, dalam Mark Smith 2005:3 diakses melalui www.infed.org/biblio/social_capital.htm) mengenai arti penting sosial kapital yang terbagi menjadi 3 (tiga) arti penting. *Trustworthy* merupakan arti penting sosial kapital yang ke dua. Hal ini erat kaitannya dengan *trust*. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan hubungan timbal balik dari interaksi antar anggota dan antar kelompok. Putnam mengatakan “*where people are trusting and trustworthy, and where they are subject to repeated interactions with fellow citizens, everyday business and social transactions are less costly...*”.

Social capital yang mengikat hubungan antar orang jika di dalam kelompoknya terdapat sifat layak dipercaya dan kepercayaan yang luas maka hal ini akan menyempurnakan keberadaan *social capital* yang telah dibangun dibandingkan dengan kelompok yang di dalamnya tidak ada sifat layak dipercaya dan kepercayaan. Coleman (1988:100-101) mengatakan bahwa “*social capital* *commit to user* *exists in the relations among persons. A group within which there is extensive*

trustworthiness and extensive trust is able to accomplish much more than a comparable group without that trustworthiness and trust”.

Krishna dan Shrader (2000:4) *“where particular network type is associated with norms of cooperation and social trust, at those times and in those situations it is useful and valid to aggregate such network into the measurement of social capital. Trust memiliki hubungan dengan cooperative yang merupakan unsur ke dua dalam social capital. Krishna mengatakan jika suatu bentuk atau jenis network dihubungkan dengan norma-norma kerjasama dan social trust maka pada saat itu dan situasi itu juga network atau interaksi-interaksi sangat valid dan berguna sebagai bentuk agregasi network dalam mengukur social capital.*

Unsur kedua adalah *cooperative* (kerjasama). Uphoof (2000:222) mengatakan bahwa *“cooperation is desirable and collective action is undertaken not jus for one’s sake – that is, as purely self interested action – but because others can benefit from it in addition to one’s self”*. Kooperatif atau kerjasama sangat diperlukan dalam melakukan tindakan secara kolektif bukan untuk kepentingan pribadi tapi lebih dari itu karena ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Karena dengan kerjasama dan melakukan tindakan secara kolektif dapat meminimalisir bahkan dapat mengatasi konflik yang ada di dalam suatu komunitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Lubell (2002, dalam Hyung Jun Park dan Richard C. Feiock diakses melalui www.spaef.com/file.php) yang mengatakan bahwa *“collaborative or cooperation approaches to environmental and natural resource management provide potential solution to the dilemma of
commit to user
the environment tradeoff”*. Di lingkungan PKL kerjasama atau interaksi biasanya

dilakukan antar PKL itu sendiri (komunitas PKL), PKL dengan masyarakat sekitar (non PKL) atau PKL dengan PKL lain serta kerja sama dapat juga dilakukan dengan Pemerintah. Dengan melakukan interaksi baik di dalam maupun di luar komunitasnya akan membawa dampak positif bagi PKL. Mereka dapat memenuhi keterbatasan sumberdaya yang tidak dapat mereka sediakan sendiri melalui kerjasama dengan masyarakat di lingkungan mereka.

Social network analysis takes relations as well as individuals as primary subject of study. Individuals in a network have relations that allow for the exchange of tangible (information and services) and intangible (social support and authority) goods. When two individuals are connected by a set of relations, a tie is formed. The strength of a tie varies with the frequency, duration, intensity, and reciprocal quality of that relation (Emilie dan Alexander Montgomery, 2006:8). Analisis *social network* yang melakukan pengamatan terhadap hubungan antar individu sebagai subjek dari penelitiannya, mereka mengatakan bahwa orang-orang atau individu-individu yang ada dalam sebuah *network* menjalin hubungan yang memungkinkan mereka untuk bertukar informasi dan pelayanan secara nyata dan tidak nyata seperti dukungan sosial dan otoritas. Ketika dua orang individu menjalin suatu hubungan maka ikatan itu sudah terbentuk. Kekuatan dari suatu ikatan itu tergantung pada frekuensi, durasi, intensitas, dan juga kualitas dari hubungan timbal-balik itu sendiri.

Unsur ketiga dalam *social capital* adalah *social networks*, yang seringkali disebut sebagai model atau pendekatan dalam *social capital*. Berbeda dengan *commit to user* *trust* dan *cooperation*, *social networks* merupakan faktor sebab akibat yang

menentukan *social capital*. Dalam penelitian ini model *social capital* yang diadopsi adalah dengan menggunakan tiga pendekatan yang disebut di muka, yakni pendekatan horizontal, pendekatan vertikal, pendekatan campuran horizontal dan vertikal dalam tingkatan yang luas.

5. Jenis-jenis *Social Capital*

Types of social capital framework based on these two key dimensions: its scope and its form (Grotaert dan Van Bastelaer, 2001). Tipologi *social capital* dapat dilihat melalui dua dimensi utama yaitu dari *scope* dan bentuknya. Dari *scope* nya *social capital* tersusun dari ruang lingkup mikro ke makro sedangkan dari bentuknya *social capital* dibagi menjadi *structural* dan *cognitive*. *Scope* dan *form of social capital* merupakan konsep yang membentuk *social capital* itu sendiri sedangkan aktualisasi dari *social capital* itu sendiri ada pada *network* atau interaksi-interaksi yang ada. Interaksi-interaksi yang ada dilihat dari interaksi internal (*bonding*), antar *bonding* (*bridging*), dan interaksi antar PKL dengan Pemerintah (*linking*).

Untuk kepentingan analisis ini secara lebih spesifik model yang digunakan adalah gagasan tentang (1) *bonding* (yaitu kelompok komunitas sejenis), (2) *bridging* (hubungan antar *bonding*), dan (3) *linking* (yaitu hubungan antara kelompok komunitas yang berbeda tetapi masih dalam tataran komunitas [horizontal] dengan pemerintah setempat, sehingga hubungan ini merupakan hubungan vertical); ketiga gagasan ini merupakan *informal network* karena hanya diikat dengan *trust* atau nilai-nilai yang berupa kesepakatan-kesepakatan tak tertulis yang dihormati bersama sebagai perekat yang menyatukan mereka.

Krishna dan Shrader (2000:7) mengatakan bahwa “*informal networks are more closely associated with trust and trustworthy behavior*”. *Informal networks* sangat erat kaitannya dengan *trust* dan *trustworthy* di lingkungan *network* yang dibangun. Karena hal utama yang menyatukan mereka adalah rasa kebersamaan dan saling percaya sehingga benar apa yang dikatakan Putnam dalam mendefinisikan *social capital* bahwa *civic virtue* atau moralitas lebih powerful dibandingkan *social capital* itu sendiri. Hal tersebut lebih dikarenakan dengan adanya *cognitive social capital* yang di dalamnya ada nilai-nilai seperti *trust*, tenggang rasa, norma-norma sebagai perwujudan dari *civic virtue* atau moralitas. Semakin kuat rasa kebersamaan dan kepercayaan yang ada dalam suatu komunitas akan mempermudah para anggota yang tergabung untuk melakukan tindakan secara kolektif maupun pembuatan keputusan bersama dalam melakukan aktivitas serta resolusi konflik yang ada baik yang datang dari luar komunitas maupun konflik yang ada di dalam komunitas itu sendiri.

Woolcock (2001) mengatakan bahwa “*Bonding, the forms to relations between family members, close friends, and neighbours, the latter to more distant associates and colleagues* (*Bonding* merupakan suatu bentuk hubungan antara anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga, kemudian lebih luas lagi *bonding* bisa merupakan hubungan antara asosiasi dan kolega). *Bridging is essentially a horizontal metaphor, however, broadly similar demographic characteristics, irrespective of how well they know one other* sedangkan *bridging* pada dasarnya merupakan bentuk metaphor dari hubungan horizontal yang meluas pada kesamaan karakteristik,; *linkages, the capacity to leverage resources, ideas, and*

information from formal institutions beyond the community is a key function of linking social capital”.

Warren, Philip, dan Susan (diakses melalui <http://www.socialcapitalresearch.com/types.html>) mengatakan bahwa “ *Local communities can also provide the primary arena for the kind of face to face interactions critical to building trust and common understandings*”. *Bonding Social Capital* merupakan hubungan atau interaksi yang ada di lingkungan komunitas PKL. Dari hasil penelitian Woolcock dan Narayan (2000:8) ditemukan bahwa “*These results have given rise to the logical conclusion that there must be two basic dimensions of social capital at the community level, namely ‘strong’ intra-community ties (“bonds”) and ‘weak’ extra-community networks (“bridges”)*”. Jadi, ada dua dimensi utama dari *social capital* pada level *community* yaitu *bonding* dan *bridging*. Di dalam *bonding* ikatan yang dibangun lebih kuat daripada ikatan *bridging* karena di dalam *bonding* terdapat kesamaan dan kesepahaman antara anggota komunitas yang satu dengan yang lain. Selain itu, mereka yang tergabung di dalam ikatan *bonding* memiliki profesi yang sama atau seprofesi (misalnya PKL). Ikatan yang kuat dalam komunitas terutama adalah sangat bermanfaat dalam konteks PKL karena mereka berkaitan dengan kepercayaan dan kerjasama untuk saling menghormati kepada sesama pedagang kaki lima. Warren, Philip dan Susan mengatakan bahwa “*Strong social bonds and effective organizations within communities provide the foundation on which poor people can develop the capacity to address the problems of poverty, to rebuild* *commit to user* *their communities, and to achieve a measure of control over their lives”* (Mark R.

Warren, J. Phillip Thompson, and Susan Saegert diakses melalui <http://www.russellsage.org/>). Ikatan sosial dan organisasi yang kuat sangat efektif di dalam suatu komunitas sebagai fondasi bagi orang miskin untuk membangun kapasitas yang mereka miliki dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan, untuk membangun ulang komunitas mereka serta sebagai alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam hidup mereka.

Bridging Social Capital berkenaan dengan hubungan antar kelompok. Hubungan yang dibangun antar kelompok ini untuk menyatukan komunitas yang berbeda karena di dalamnya terdapat identitas maupun karakteristik yang berbeda namun ikatan ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan *bonding* seperti yang diutarakan Narayan dan Woolcock di atas. Ikatan antara kelompok yang lemah ini sangat penting untuk menambah pengetahuan dan inovasi karena melalui ikatan ini akan mempermudah akses informasi. Secara individual Granovetter (2001:1373 berpendapat bahwa "*weak ties are an important resource in making possible mobility opportunity. Seen from a more macro-scopic vantage, weak ties play a role in effecting social cohesion*". Ikatan yang lemah ini merupakan sumberdaya yang penting dalam membuat peluang yang memungkinkan mobilisasi di dalam ikatan ini. Dalam skala makro ikatan lemah ini (*bridging*) sangat menguntungkan karena ikatan ini memiliki peranan penting untuk menciptakan kohesivitas sosial. Ikatan sosial yang dibangun dalam konteks *bridging* dapat dilihat dari hubungan PKL dengan komunitas atau PKL lain.

Linking Social Capital ikatan ini merupakan hubungan *social capital* secara vertikal. Ikatan ini mengacu pada hubungan atau pelibatan kelompok-

kelompok atau jaringan-jaringan yang berbeda misalnya hubungan PKL dengan Pemerintah. Woolcock (2001:27) mengatakan bahwa *“the capacity to leverage resources, ideas, and information from formal institution beyond the community is a key function of linking social capital”*. Kapasitas untuk menjalin kerjasama dengan sumber-sumber yang berpengaruh, ide-ide dan informasi dari institusi formal diluar komunitas merupakan kunci utama di dalam *linking social capital*.

States, like individuals, form networks of relational ties in this system through common affiliation. These networks, whether composed of individuals or states, influence the behaviors of their members by endowing some with greater social power and by shaping common beliefs about behavior. These, in turn, make certain strategies of action more rational than other (Jacobson, Reisinger, Mathers (1986, dalam Emilie dan Alexander Montgomery:2006). Negara sama seperti dengan individu-individu, bentuk ikatan hubungan yang ada di dalam system ini lazimnya adalah afiliasi. *Networks* ini apakah itu individu atau Negara maka akan mempengaruhi lingkungan dari para anggotanya dengan memberikan kekuatan social yang lebih besar dan menentukan kepercayaan di lingkungan *network* itu. Dalam hal tertentu strategi-strategi ini lebih rasional digunakan dalam melakukan suatu *action* dibandingkan dengan strategi lainnya. Demikian halnya network yang ada di lingkungan PKL Kartini Semarang diharapkan mampu membangun suatu afiliasi yang *powerful* dan solid baik itu dengan lingkungan komunitasnya sendiri, antar komunitas, maupun dengan Pemerintah agar PKL menjadi kuat dan memiliki posisi tawar terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut permasalahan PKL.

commit to user

Sudarmo (2011:142) mengatakan bahwa “*Diskresi* diperbolehkan karena dimungkinkan peraturan yang ada atau yang diberlakukan dinilai belum mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan suatu kaum/sekelompok orang/orang yang selama ini terabaikan karena bias kebijakan masa lalu sehingga nilai-nilai keadilan belum terimplementasi bagi semua golongan atau semua pihak”. Lebih lanjut Sudarmo (2011:142) mengatakan bahwa “motivasi dilakukannya *diskresi* kebijakan adalah harapan untuk bisa menghasilkan sebuah rasa keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung secara terus-menerus selama ini dalam setiap efek keputusan yang dibuat atau karena bias kebijakan yang terjadi sebelumnya”. Dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan memenuhi hak-hak asasi manusia, *diskresi* bisa diterima. Namun demikian *diskresi* yang berlebihan sehingga seseorang atau sekelompok orang mendapatkan hak-hak istimewa sementara orang atau kelompok lain akibat tindakan itu justru dirugikan baik secara materiil maupun non materiil.

Sudarmo (2011:143) mengatakan bahwa “ada dua macam *diskresi* yang sering didiskusikan : (1) *diskresi* profesional, dan (2) *diskresi* administratif. *Diskresi* profesional berkembang seiring dengan pertumbuhan profesional yang powerful dan mampu mendukung klaim tersebut melalui perkembangan bentuk-bentuk kontrol okupasi (profesi) yang begitu powerful (kuat, susah dibantah, dengan dalih ilmiah dan kadang telah dilegimitasi oleh ikatan mereka yang dipandang hebat dan tak terjamah). *Diskresi* administratif memang dimungkinkan namun sulit dilakukan karena secara karakteristik terhalang oleh aturan-aturan. Para administrator publik membuat keputusan-keputusan dengan mengacu tidak *commit to user*

hanya pada aturan-aturan yang berlaku tetapi juga panduan-panduan lain yang ditujukan untuk membentuk keputusan-keputusan dalam situasi yang tidak tercakup dalam aturan-aturan tersebut”.

6. Kajian Teori tentang *Network*, Konflik dan Resolusi Konflik

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mendiskusikan, mengkaji dan menganalisis konsep dan teori *network* dengan fokus utamanya pada interaksi-interaksi yang dilakukan, konflik dan resolusi konflik; Kekuasaan dan hubungan antara teori yang satu dengan lainnya untuk menegaskan keterkaitan *network* (jaringan) bagi resolusi konflik terkait dengan kerjasama antar PKL dan utamanya dengan pihak otoritas atau Pemerintah, dan bagaimana Kekuasaan memiliki hubungan terhadap eksistensi suatu organisasi atau Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL). Hubungan teori ini lebih lengkap dijelaskan pada sub seksi berikut ini.

a. Definisi Konflik

Konflik adalah suatu ekspresi dua kelompok yang saling bergantung dalam mencapai tujuan merasa ada ketidakcocokan atau saling bertentangan seperti yang dikatakan oleh Wilmot dan Hocker “*an expressed struggle between at least two interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce resources and interference from others in achieving their goals*” (Wilmot & Hocker, 2001, p. 41; dalam Jungbae Hong:2005). Konflik dalam organisasi atau kelompok komunitas bukan hal yang asing, terlebih di sektor informal Pedagang Kaki Lima. Konflik sangat mungkin terjadi mengingat ketika sedikit saja terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan dalam hal-hal

tertentu, maka sejak itu konflik telah terjadi. Terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan yang bervariasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, maka dalam hal organisasi atau kelompok komunitas konflik sangat mungkin untuk terjadi, dengan intensitas yang tentunya berbeda satu sama lain.

Menurut Azize (2007:1, diakses melalui <http://ogrenci.hacettepe.tr/>) *“conflict is a disagreement through which the parties involved perceive a threat to their needs, interests or concerns”*. Konflik merupakan ketidaksepakatan antar kelompok orang-orang yang merasa terancam akan kebutuhan-kebutuhannya, kepentingan-kepentingannya atau tujuan-tujuannya. Lebih lanjut Azize menambahkan bahwa *“Conflict can be substantive or emotional. Substantive conflict is any disagreement over goals, resources, rewards, policies, procedures, and job assignments. Emotional conflict results from feelings of anger, distrust, dislike, dislike, fear and resentment, as well as relationship problems”*. Konflik dibagi menjadi konflik substantive atau emosional. Konflik substantive mencakup ketidaksepakatan tentang suatu hal seperti tujuan, alokasi sumberdaya, distribusi imbalan, kebijakan dan prosedur, dan tugas-tugas organisasi atau kelompok. Konflik emosional terjadi sebagai akibat dari perasaan marah, perasaan tidak percaya, sebal, tidak suka, takut dan jengkel maupun pertentangan-pertentangan pribadi. Azize juga mengatakan bahwa *“A conflict exists when two people wish to carry out acts which are mutually inconsistent”*. Konflik muncul ketika dua orang berkeinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama-sama tidak konsisten. *commit to user* Sekecil apapun konflik yang ada perlu dikelola dengan tepat

karena jika diabaikan bukan tidak mungkin konflik yang kecil dapat berubah menjadi besar dan mengakibatkan masalah yang besar bagi komunitasnya, antar kelompok komunitas. Konflik akan memiliki manfaat jika dikelola dengan baik serta dilihat dari intensitas tinggi-rendahnya konflik itu sendiri.

Azize Ergeneli (2007:7, diakses melalui <http://ogrenci.hacettepe.tr/>) mengatakan *“The ‘good’ or ‘bad’ conflicts are due to the functional and dysfunctional conflict. At this point it is useful to differentiate between the two forms. These are relatively new concepts that integrate with the Interactionist view of conflict”*. Baik buruknya konflik tergantung jenis konflik, konflik fungsional atau disfungsional. Ketepatan dalam mengelola konflik yang disfungsional dapat berubah menjadi fungsional dan sangat produktif. Hal ini dikarenakan konflik substantive jika dikelola dengan benar akan sangat produktif.

Azize (2007:7, diakses melalui <http://ogrenci.hacettepe.tr/>) *“Functional conflict supports the goals of a group and its presence within the organization actually improves performance”*. Konflik fungsional mendukung pencapaian tujuan-tujuan dari kelompok dan hal ini hadir di dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jika dikelola dengan baik konflik akan memberikan banyak manfaat diantaranya :

- *Motivate individual to do better and to work harder. Ones abilities and talents come to the forefront in a conflict situation* (konflik dapat memberikan motivasi kepada individu untuk bekerja keras *commit to user* dan melakukan yang terbaik).

- *Satisfy certain psychological needs like dominance, aggression, esteem and ego, and thereby provide an opportunity for the constructive use and release of aggressive urges* (memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologis tertentu seperti kekuasaan, agresi, ego dan penghargaan, dan kebebasan untuk berinisiatif).
- *Provide creative, constructive and innovative ideas* (memberikan kebebasan untuk menuangkan ide-ide yang kreatif, bermanfaat, dan inovatif).
- *Add variety to ones organizational live* (memberikan variasi bagi kehidupan organisasi).
- *Provide diagnostic information that can generate cues for better organization and management to prevent occurrence of similar problems* (menyediakan informasi yang dapat memberikan petunjuk yang lebih baik untuk organisasi dan manajemen dalam mencegah masalah-masalah serupa).
- *Facilitate an understanding of the problem, people and interrelationships between people, better co-ordination among individuals and departments, in addition to strengthening intra group relationships* (memfasilitasi pemahaman terhadap masalah, orang dan hubungan antar orang, koordinasi yang baik di antara individu-individu dan departemen-departemen, dan selanjutnya untuk memperkuat hubungan-hubungan atau kerjasama di dalam kelompok)

“Dysfunctional conflict, by comparison, acts as a barrier to the performance of the group and frustrates the objectives of the organization (Azize, 2007:8), diakses melalui <http://ogrenci.hacettepe.tr/>”. Konflik disfungsional menurut Azize sebagai pembanding konflik disfungsional merupakan tindakan-tindakan untuk merintangi kinerja kelompok dan menggagalkan tujuan-tujuan dari organisasi. Selanjutnya Azize memaparkan dampak dari konflik disfungsional antara lain:

- *Conflicts affect individual and organizational performance. Resolving conflicts consumes a considerable amount of managerial time and energy which could more productively spent in the absence of conflicts* (konflik-konflik yang ada mempengaruhi individu dan kinerja organisasi. Pemecahan masalah atau konflik menghabiskan waktu dan tenaga yang secara produktif menghabiskan tenaga untuk menghilangkan konflik-konflik yang terjadi).
- *In a conflict situation people may promote their self-interests or personal gains at the cost of others in the organization* (dalam situasi konflik orang mungkin akan mengutamakan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain di dalam organisasi).
- *Intense conflicts over a prolonged period affect individuals emotionally and physically and give rise to psychosomatic disorders.* (intensitas konflik yang terlalu tinggi menghabiskan *commit to user*

waktu dan mempengaruhi emosional dan fisik para individu-individu serta meningkatkan stress).

- *Time spent on conflicts, if costly, could mean considerable amount of money wasted* (konflik-konflik yang ada menghabiskan waktu, jika dinilai maka dapat diartikan hanya membuang-buang uang saja).
- *Conflicts may lead to work sabotage, employee morale problems, and decline in the market share of product / services and consequent loss of productivity.* (konflik-konflik mungkin dapat menimbulkan sabotase, masalah moralitas pegawai, dan berdampak pada penurunan pemasaran produk atau servis dan sebagai akibatnya maka organisasi akan kehilangan daya produksinya).

Menurut Wirawan (2010:59) “konflik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada upaya mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak”. Selanjutnya Wirawan (2010:62) menambahkan bahwa “di dalam konflik *commit to user* destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena

tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain”.

Untuk membedakan karakteristik dari kemanfaatan konflik fungsional (konstruktif) dan konflik disfungsional (destruktif) dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik Konflik Konstruktif dan Destruktif

Konflik konstruktif	Konflik Destruktif
<ul style="list-style-type: none"> • Berusaha menyelesaikan perbedaan mengenai substansi konflik. • Berhasil mendefinisikan dan mengklarifikasi permasalahan konflik. • Komunikasi dan negosiasi intensif untuk menjelaskan posisi masing-masing. • Berupaya mengendalikan emosi, marah, kekhawatiran, dan stress. • Negosiasi <i>give and take</i> • Spiral konflik mengerucut ke arah kompromi atau kolaborasi. • Berupaya mencari win & win solution yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Polarisasi perbedaan • Berkurangnya kerjasama • Konflik tidak berpusat pada substansi konflik. • Terjadi spiral konflik yang makin membesar dan meninggi • Perilaku merendahkan lawan konflik. • Perilaku mengancam. • Perilaku konfrontasi dan mengancam. • Ketegangan, kekhawatiran, stress, dan agresi. • Negosiasi minimal. • Gaya manajemen konflik kompetisi. • Mengalami krisis. • Menginginkan <i>win & lose solution</i> • Merusak hubungan • Menyelamatkan muka.

Sumber : Wirawan (2010:60).

b. Faktor Pemicu dan Resolusi Konflik Konvensional

Wirawan (2010:8) mengatakan “faktor pemicu timbulnya konflik antara lain: keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, saling tergantung atau interdependensi tugas, diferensiasi organisasi, ambiguitas yurisdiksi, system imbalan yang tidak layak, komunikasi yang tidak baik, perlakuan tidak

manusiawi, pribadi orang?”. Untuk lebih jelasnya pendapat Wirawan ini akan dipaparkan dalam paragraf-paragraf selanjutnya.

Keterbatasan sumber-sumber yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia dapat menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik. Dalam suatu organisasi, sumber-sumber yang dimaksud bisa berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan, kesempatan untuk berkariyer, dan sebagainya. Dalam masyarakat, konflik karena keterbatasan sumber kehidupan sering terjadi.

Sumber konflik yang kedua yaitu tujuan berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Wilmot dan Hocker (1978, dalam Wirawan, 2010:8) konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan berbeda. Konflik ini juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik dan bisnis.

Selanjutnya saling ketergantungan atau interdependensi tugas dapat juga menimbulkan konflik karena pihak-pihak yang terlibat memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. Jika saling ketergantungan tinggi, maka biaya resolusi konflik akan tinggi. Jika saling ketergantungan rendah, maka biaya resolusi konflik akan rendah. Jika tidak ada saling ketergantungan, maka konflik ini tidak akan terjadi. Jadi, konflik di antara pihak yang saling berhubungan dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. Jenis ketergantungan dalam hal tugas dapat dibagi menjadi (1)

ketergantungan pol (*pooled interdependence*) yang merupakan bentuk interdependen yang paling lemah, (2) ketergantungan urutan (*sequential interdependence*) yang terjadi karena keluaran suatu unit kerja merupakan masukan bagi unit lainnya. Jika suatu unit kerja terlambat menyelesaikan tugasnya, maka akan menyebabkan keterlambatan unit berikutnya dalam melaksanakan tugasnya. (3) ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*). Ketergantungan jenis ini merupakan ketergantungan tinggi. Di sini, keluaran pekerjaan suatu unit kerja saling dipertukarkan bolak-balik kepada unit kerja lainnya.

Diferensiasi organisasi, salah satu penyebab terjadinya konflik dalam organisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksananya. Unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda formalitas strukturnya (formalitas tinggi versus formalitas rendah); ada unit kerja yang berorientasi pada tugas dan ada yang berorientasi pada hubungan; dan orientasi pada waktu penyelesaian tugas (jangka pendek dan jangka panjang).

Ambiguitas yurisdiksi, pembagian tugas yang tidak definitif akan menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. Dalam waktu yang bersamaan, ada kecenderungan pada unit kerja untuk menambah dan memperluas tugas dan wewenangnya. Keadaan ini sering menimbulkan konflik antar unit kerja atau antar pejabat unit kerja. Konflik jenis ini banyak terjadi pada organisasi yang baru terbentuk, di mana struktur organisasi dan pembagian tugas belum jelas.

Sistem imbalan yang tidak layak misalnya di perusahaan, konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan sering terjadi, di mana manajemen perusahaan menggunakan sistem imbalan yang dianggap tidak adil atau tidak layak oleh karyawan. Hal ini akan memicu konflik dalam bentuk pemogokan yang merugikan karyawan (tidak mendapat upah), merugikan perusahaan (tidak melakukan produksi), merugikan konsumen (tidak mendapatkan produk yang diperlukan), dan merugikan pemerintah (tidak mendapatkan pajak).

Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan tidak bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda seringkali menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja dan bisa menjadi penyebab timbulnya konflik.

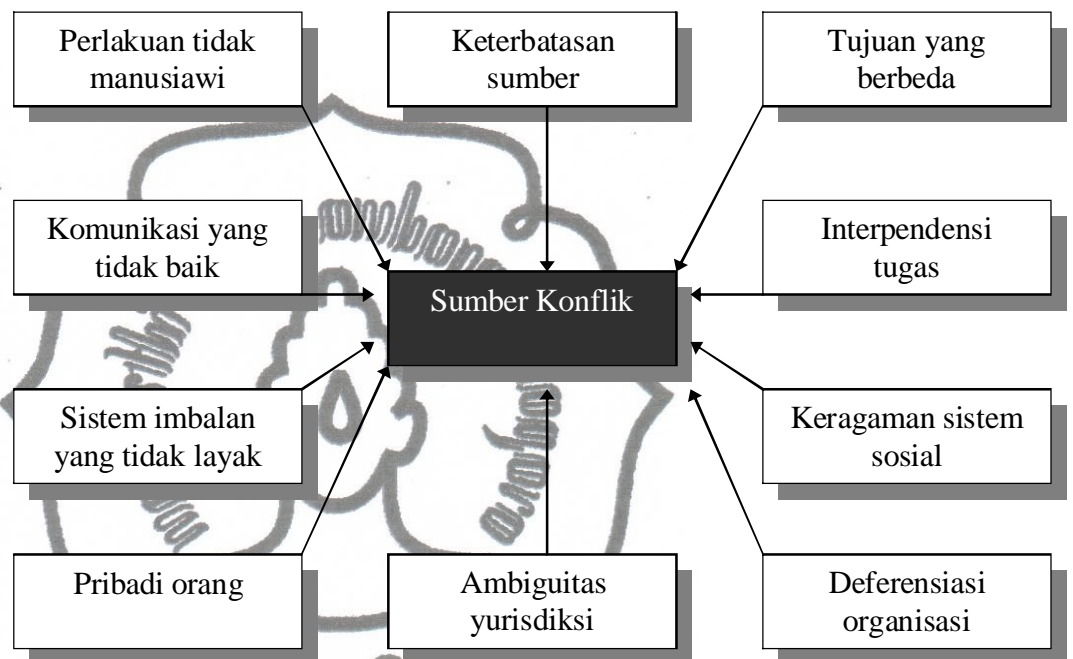
Konflik juga bisa terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum. Belakangan ini, dengan berkembangnya masyarakat madani dan adanya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia, pemahaman dan sensitivitas anggota masyarakat terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum semakin meningkat. Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia di masyarakat dan organisasi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi.

Pribadi orang. Ada banyak orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti saling curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat seperti ini mudah untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat dalam organisasi dengan posisinya sebagai individu atau pribadi. Keadaan ini menimbulkan konflik interes (*conflict of interest*). Ada sekelompok orang yang berfikir fundamentalis atau radikal yang memandang sesuatu hanya hitam putih-tidak menghargai perbedaan. Kelompok fundamentalis mudah terseret dalam konflik.

Di samping penyebab konflik di atas, ada faktor psikologi orang yang mendorong terjadinya konflik. Pertama, persepsi orang mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Orang bisa mempunyai persepsi yang sama mengenai sesuatu, tetapi juga bisa mempunyai persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi mengenai sesuatu sering kali merupakan pemicu terjadinya konflik.

Sumber-sumber konflik di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Sumber-Sumber Konflik



Sumber : Wirawan (2010: 8).

c. Pendekatan dan Implikasi Manajemen Konflik

Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilmann (1974, dalam Wirawan, 2010:140) mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yaitu : kerjasama (*cooperativeness*) dan keasertifan (*assertiveness*). Wirawan (2010:140) mengatakan bahwa “kerjasama atau *cooperativeness* adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik”.

Berdasarkan kedua dimensi ini, Thomas dan Kilmann (dalam Wirawan, 2010:140) mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik.

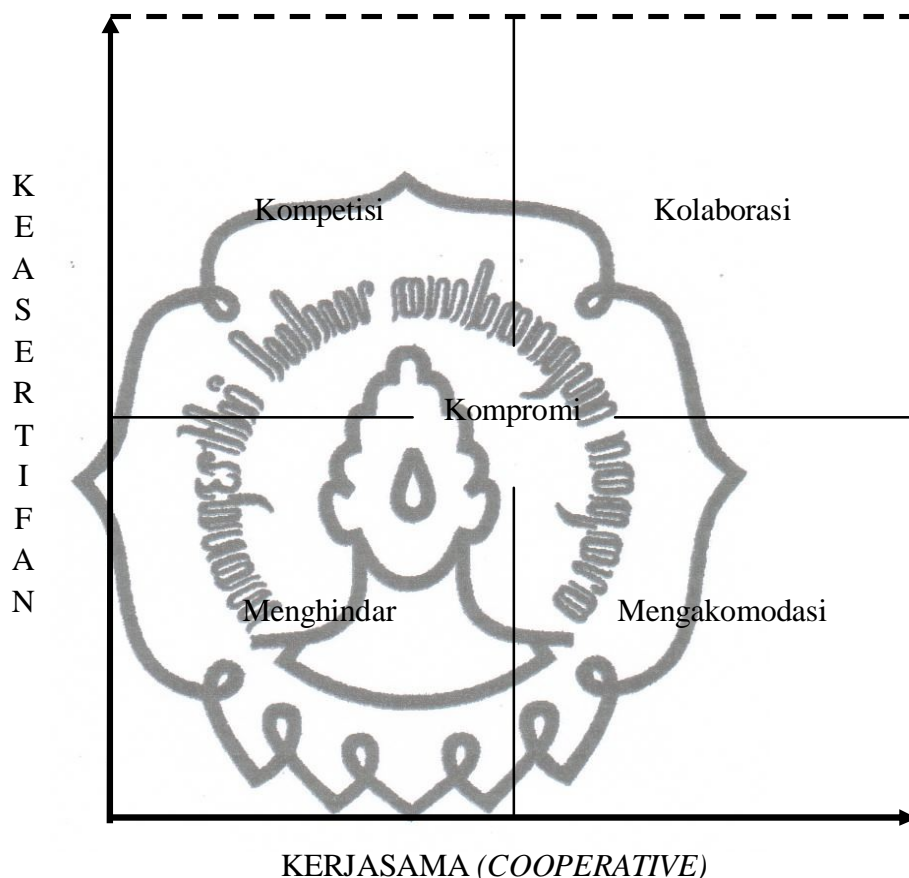
Berikut adalah kelima jenis gaya manajemen konflik tersebut yang disertai dengan pemaparan-pemaparan yang lebih mendalam.

- 1). Kompetisi (*competing*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, dimana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya.
- 2). Kolaborasi (*collaborating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kooperatif atau kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Derr (1975, dalam Wirawan, 2010:140), kolaborasi merupakan gaya manajemen konflik yang paling disukai sebab: (a) mendorong hubungan interpersonal, (b) kekuatan kreatif untuk inovatif dan perbaikan, (c) meningkatkan balikan dan aliran informasi, serta (d) mengembangkan iklim organisasi yang lebih terbuka, percaya, *commit to user* pengambilan resiko dan perasaan baik terhadap integritas.

- 3). Kompromi (*compromising*). Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan menerima (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka. Gaya manajemen konflik kompromi berada di tengah antara gaya kompetisi dan gaya kolaborasi. Dalam keadaan tertentu, kompromi dapat berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsesi untuk mencari titik tengah.
- 4). Menghindar (*avoiding*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilmann bentuk menghindar tersebut bias berupa : (1) menjauhkan diri dari pokok masalah; (2) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat; atau (3) menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.
- 5). Mengakomodasi (*accommodating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.

Gambar 2.4 KERANGKA GAYA MANAJEMEN KONFLIK



Sumber : Thomas dan Kilmann (1974, dalam Wirawan : 2010, 139)

d. Networks dalam Resolusi Konflik

Bagaimana *social capital* dijalankan dalam situasi riil, terutama dalam mengatasi konflik, ia bisa dilakukan melalui berbagai macam interaksi atau *network*, yakni melalui *Bonding, Bridging dan Linking Social Capital* dan kombinasi dari *networks* tersebut. Semua tipe *social capital* ini penting untuk digunakan sebagai alat resolusi konflik, Micaela Trimble dan Fikret Berkes (diakses melalui www.safdec.orth/) mengatakan bahwa “*type of network connection—bonding, bridging, linking*”.

Menurut Liebler dan Ferri (2004:7) ada empat karakteristik *networks* yang bisa meningkatkan kapasitas *social capital*, Ia mengatakan bahwa “*first, network members must be encouraged to “dare to share” (i.e., be confident enough in their work that they are willing to share it with anothers). This sharing can be facilitated by the creation of an open environment in which people are willing to analyze and learn from both successes and mistakes. Second, network members must have the capacity to fully contribute. This can be fostered by creating time and space for learning and reflection. Thirdly, network members must be committed. Strong commitment is naturally fostered when members make the priorities of the network match their own, and they see the network as adding value to their work. Simply raising awareness of the potential that members have in contributing to change in their organizations may help to strengthen commitment. Lastly, networks must possess the generative capacities identified in our framework if they are to be able to build these some capacities in their members*”. Jadi Para anggota *networks* harus didorong untuk “berani berbagi” (yaitu cukup berani dalam aktivitasnya yang mereka inginkan untuk berbagi dengan yang lain). Untuk bisa berani juga perlu difasilitasi dengan menciptakan lingkungan terbuka untuk menganalisis dan belajar keberhasilan dan kegagalan; para anggota *networks* harus memiliki kapasitas untuk sepenuhnya berkontribusi; untuk terciptanya kapasitas berkontribusi perlu diciptakan waktu dan ruang untuk belajar dan refleksi; para anggota *networks* harus punya komitmen; komitmen yang kuat dengan sendirinya bisa dijalankan ketika para anggota *networks* memiliki prioritas dari *network* tersebut yang sesuai dengan prioritas dirinya atau komunitasnya, dan mereka memandang *network* sebagai nilai tambah bagi karyanya atau hal-hal yang dilakukannya; hanya dengan meningkatkan kesadaran potensi inilah para anggota memiliki kontribusi untuk melakukan perubahan bagi kelompoknya (atau organisasinya) yang bisa memperkuat komitmen; *networks* harus memiliki *Generative Capacities* jika mereka mampu membangun kapasitas yang sama dalam diri para anggotanya.

Social capital memiliki arti penting dalam mengatasi konflik seperti yang dikatakan oleh Putnam (1993) “*presents social capital as a solution to the dilemmas of collective action*”. Bagaimana *network social capital* dijalankan, ia bisa dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui *Bonding*, *Bridging* dan *Linking Social Capital*.

Melalui *Bonding social capital*, masyarakat bisa memperkuat hubungan dalam kelompoknya yang cenderung memiliki perilaku, norma-norma, aturan-aturan dan harapan-harapan yang telah diketahui oleh semua anggotanya yang masing-masing anggotanya tersebut berbagi cara pandang. Pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, ide-ide, serta hubungan di antara mereka. Karena jenis *social capital* seperti ini bisa tumbuh dan berkembang di antara masyarakat kelas bawah, menengah maupun atas, maka *networks* ini bisa menjadi elitis, negatif dan destruktif jika aturan dan *networks* digunakan oleh mereka yang kuat untuk mendiskreditkan dan mengabaikan mereka yang lemah jika mereka tidak mengikuti atau menyesuaikan dengan keinginan yang kuat, sehingga *networks* di antara kelompok yang lemah menjadi penting untuk tetap dijalin dan dikembangkan agar tetap memiliki posisi tawar yang kuat. Memang, implikasi dari kuatnya *bonding social capital* dari kaum lemah ini bisa menjadi resistensi bagi adanya perubahan dan sikap mempertahankan status quo, tetapi bagaimanapun, ia menjadi penting peranannya dan efeknya bagi para anggota yang memiliki *networks* dan hubungan yang terintegrasi dengan kuat ini. Hubungan yang kuat terutama penting bagi kaum lemah *commit to user* (*dominated group*) karena mereka tergabung melalui *trust* dan kerjasama yang

pada akhirnya mendorong mereka para individu anggota masyarakat *non-state* untuk mengkaji ulang norma serta aturan yang digunakan *state* dalam mendominasi mereka demi keadilan dan demokrasi dan menjamin terciptanya pembangunan manusia riil, serta membangun solidaritas untuk melindungi dirinya, teman-teman yang tidak diuntungkan karena *personal rule*. Jackson dan Rosberg (1982; dalam Sudarmo, 2011:75) mengatakan bahwa “*personal rule is a system of relations linking rulers... with patrons, clients, supporters, and rivals, who constitute the ‘system’*. *If personal rulers are restrained, it is by the limits of their personal authority and power and by the authority and power of patrons, associates, clients, supporters, and of course – rivals. The system is ‘structured’ ... not by institutions, but by the politicians themselves*” (*personal rule* merupakan sebuah sistem relasi yang menghubungkan para penguasa dengan para patron, klien dan musuh-musuhnya, yang membentuk sebuah system. Jika *personal rule* itu dikendalikan, maka pengendalian tersebut terjadi karena batas-batas otoritas dan kekuasaan dari para patronnya, para temannya, para kliennya, dan tentu saja para musuhnya. Sistem tersebut disusun bukan melalui institusi tetapi oleh para politisi.

Lebih lanjut Sudarmo (2011:217-218) menjelaskan mengenai *bridging social capital* maupun *linking social capital*. Ia mengatakan bahwa “melalui *bridging social capital*, kelompok masyarakat lemah yang sama kondisinya bisa menjalin *networks* dengan kelompok atau *social networks* lainnya. Walaupun jaringan seperti ini yang cenderung sifatnya heterogen sering dipandang lemah jika dibanding dengan mereka yang homogen seperti yang *commit to user*

terjadi dalam *bonding social capital*, jaringan tersebut masih tetap sangat penting karena bisa memberikan mekanisme kritis bagi difusi pengetahuan dan inovasi. Perlu disadari bahwa belum tentu sebuah kelompok akan mendukung kelompok tertentu yang tengah berkonflik dengan kelompok lainnya, mengingat kepentingan mereka sering berbeda, sehingga penguatan *networks* pada masing-masing *bonding* menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar terhadap komunitas lain yang kemungkinan merongrong eksistensinya, termasuk dalam posisi tawar terhadap *state* atau pemerintah”.

Sudarmo (2011:217) juga menambahkan bahwa “dalam konteks *community governance* untuk resolusi konflik, *bridging social capital* bahkan berperan penting untuk memperkuat dan memperbaiki kerjasama di antara kelompok-kelompok sejenis, yang bisa dijalin melalui tingkat lokal, regional maupun nasional bahkan internasional karena *networks* seperti ini bisa menjadi kekuatan penekan bagi dominasi *state* yang pro status quo untuk melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian jika terjadi konflik antar *bonding*, maka *bridging social capital* bisa menjadi alat yang efektif untuk meminimalisir konflik antar kelompok atau komunitas”.

Melalui *linking social capital*, individu dan kelompok masyarakat lemah dalam strata sosial bisa menjalin *networks* dengan mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan kekuasaan serta kekayaan yang lebih besar sehingga melalui jaringan ini mereka bisa memperbaiki kapasitasnya terhadap akses sumberdaya, informasi, serta ide-ide yang dimiliki oleh *state* secara tersembunyi yang selama ini tidak dipunyai oleh

kelompoknya yang lemah tersebut. Lobi dan penguatan *networks* terhadap kelompok-kelompok *powerful* menjadi penting agar kepentingan kaum lemah (termasuk kaum marginal, PKL dan kelompok lemah lainnya) memungkinkan akan terakomodasi kepentingannya sehingga kebijakan yang diimplementasikan sangat dimungkinkan tidak berpengaruh buruk bagi eksistensi kelompok komunitas tersebut (Sudarmo, 2011:217).

Liebler dan Ferri (2004:4) mengatakan bahwa "*network formation can be instigated by external or internal sources, or for practical or value based reasons. Networks can form either from top down or from bottom up. In fact, it is often a combination of all of these things that serves as the impetus for network formation*". Pembuatan *networks* bisa dimulai melalui sumberdaya external atau internal, atau alasan-alasan praktis atau alasan-alasan yang didasarkan pada nilai. *networks* bisa terbentuk dari *atas* atau dari *bawah*. Juga sering terjadi terbentuknya *networks* adalah kombinasi *atas-bawah* dan sebaliknya.

Liebler dan Ferri (2004:4-5) mengatakan bahwa "*if a network no longer meets the needs of its members, participation will drop off, and the network will naturally cease to exist*". Panjang atau pendek jangka waktu *network* yang dibangun bergantung pada waktu dan tujuan dibentuknya *network*. Jika suatu *network* yang dibangun untuk jangka pendek sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para anggotanya maka pada saat itu juga partisipasi dari anggota *network* akan menurun dan *network* yang ada dengan sendirinya bubar. *commit to user*

Networks memberikan sejumlah kemanfaatan bagi para anggotanya: (1) meningkatkan akses terhadap informasi, keahlian dan sumberdaya finansial; (2) meningkatkan efisiensi; (3) multiplier effect yang meningkatkan pencapaian dan dampak bagi para anggota organisasi atau kelompoknya; (4) solidaritas dan dukungan; (5) meningkatkan kecepatan dalam melihat isu-isu, cara-cara tindakan yang terbaik dan keterwakilan bagi organisasi atau kelompoknya; (6) mengurangi resiko, mengurangi keterasingan atau isolasi, dan meningkatkan kredibilitas terutama untuk pengembangan kelompok atau paguyuban atau organisasi Liebler dan Ferri (2004:5) mengatakan “*some of the most commonly cited benefits for network members are : increased access to information, expertise and financial resources, increased efficiency; a multiplier effect, which increases the reach and impact available to member organizations; solidarity and support; and increase visibility of issues, best practices, and underrepresented groups*”.

Juga terdapat resiko yang sangat berarti ketika seseorang masuk dalam *networks* yang berbeda dari *networks* yang melibatkan pihak penguasa atau juga sangat berisiko tinggi ketika seseorang yang tidak memiliki *networks* harus berhadapan atau berkonflik dengan pihak yang memiliki *networks* dan otoritas misalnya (1) diskriminasi oleh kelompok yang kuat; (2) pembatasan akses sumber-sumber ekonomi oleh pihak yang memiliki otoritas; (3) control intensif oleh pihak penguasa (bisa melalui polisi atau militer dan polisi pamong praja atau bahkan preman yang dibiayai oleh pihak otoritas terhadap setiap kegiatannya); dan (4) mudah tergusur dari akses ekonomi informal; (5)

sangat mungkin dilakukan kekerasan fisik oleh pihak penguasa melalui preman yang menjadi aliannya (Sudarmo, 2011:218).

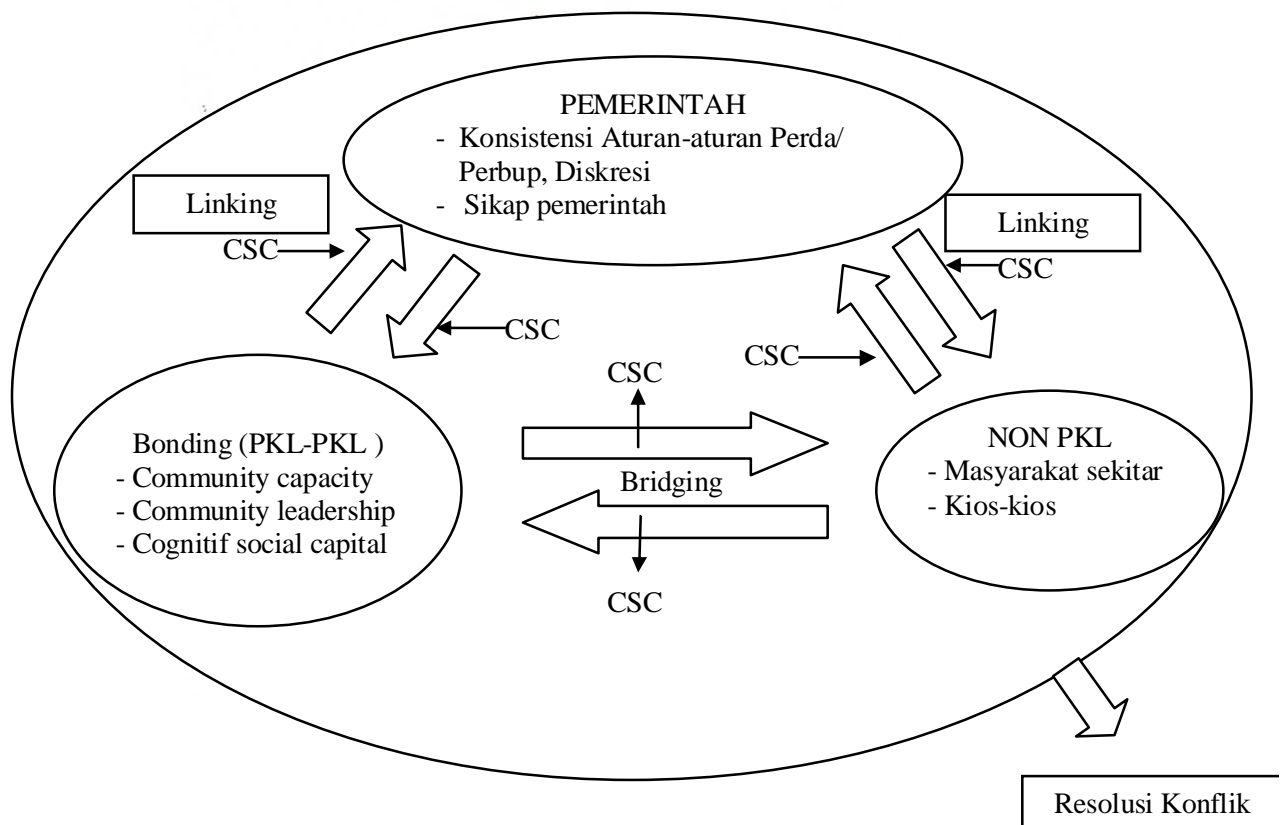
7. Penelitian Terdahulu

- ❖ Rahmawati (Tesis S2 UI) meneliti tentang implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani PKL termasuk dalam kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternative yang memihak kepada Pedagang Kaki Lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ciputat baik dari aspek komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan *unsuccessful implementation*.
- ❖ Penelitian Sudarmo (2008b) tentang kasus PKL di Kalilarangan Solo memperlihatkan bahwa, tidak ada konflik di kalangan PKL tidak berarti tidak ada kreativitas, karena kondisi yang aman dan tanpa konflik juga bisa meningkatkan rasa kebersamaan secara terus menerus di antara para anggota, antar kelompok pedagang formal dan informal dan antara PKL dengan Pemerintah, dan bisa meningkatkan kesinambungan dalam usaha ekonomi informal.

B. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir

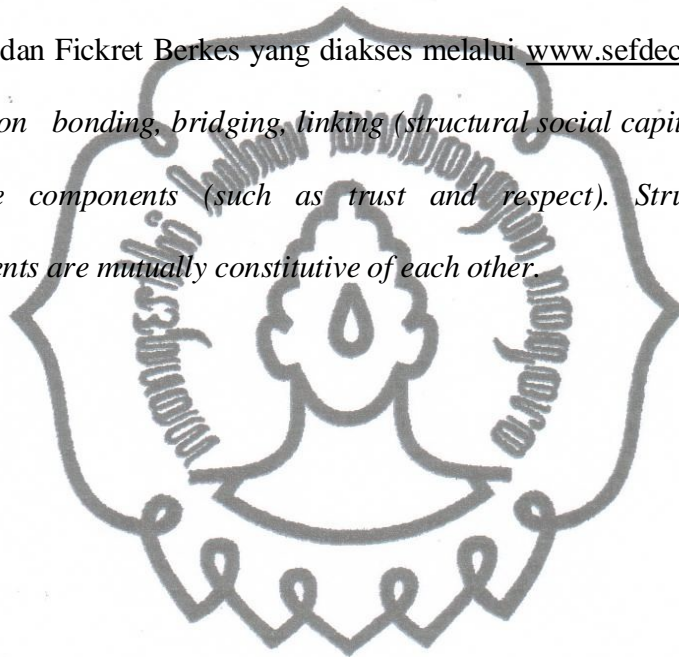
Proses *Social capital* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang)



Ket : CSC= *Cognitif Social Capital*.

Social Capital di dalam kerangka pemikiran di atas ditandai dengan LSC (*linking social capital*), BSC (*bonding social capital*) dan BSC (*bridging social capital*). Ketiganya dihubungkan dengan CSC (*cognitive social capital*) karena *network connection* yang dibangun tidak akan kuat dan efektif dalam mencapai tujuannya tanpa adanya *cognitive social capital*. Bentuk-bentuk interaksi yang ada dalam *social capital* dapat dilihat dari *bonding, bridging, dan linking social capital*.

Bonding melihat hubungan yang ada di dalam komunitas PKL atau antar PKL; *Bridging* merupakan interaksi antara PKL dengan non-PKL seperti masyarakat di sekitarnya; *Linking* merupakan interaksi-interaksi antara PKL dengan Pemerintah maupun masyarakat dengan Pemerintah. Davine and Roberts (2003, dalam Michael Trimble dan Fickret Berkes yang diakses melalui www.sefdec.or.th) *Type of network connection bonding, bridging, linking (structural social capital) should also include cognitive components (such as trust and respect). Structural and cognitive components are mutually constitutive of each other.*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:4, dalam Suyanto dan Sutinah, 2010:166). Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungan PKL Kartini (P3BS) dari sudut perspektif partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang diwawancarai, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006:94, diakses melalui www.damandiri.or.id pada tanggal 19 Januari 2012, Pukul 17.00 Wib.).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai usaha-usaha penguatan organisasi dan resolusi konflik yang dilakukan oleh PKL Kartini Semarang dengan melihat peranan *social capital* yang dibangun dilihat dari interaksi-interaksi internal PKL, interaksi-interaksi antara PKL dengan masyarakat, kelompok, atau komunitas di luar PKL Kartini, dan interaksi-interaksi yang dilakukan PKL Kartini dengan Pemerintah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih oleh Penulis karena pendekatan ini tepat digunakan dalam proses pengumpulan data dan analisis penelitian ini. Alasan penggunaan pendekatan ini karena Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terkait dengan perilaku manusia atau kelompok dalam hal ini adalah PKL Kartini. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami dan memahami makna dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan PKL Kartini dan interaksi-interaksi yang dilakukan oleh mereka.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phainomai*, yang berarti ‘menampak’ dan *phainomenon* merujuk ‘pada yang menampak’ (Widyadana, dalam buku karangan Prof. Dr. Engkus Kuswarno; M.S yang diakses melalui <http://id.shvoong.com/> pada tanggal 19 Januari 2012, Pukul 17.00 Wib). Jadi dapat disimpulkan bahwa fenomenologi berasal dari kata *phainomai* yang berarti sesuatu yang nampak.

Fenomenologi pada awalnya dipelopori oleh Husserl namun dalam penelitian ini, Husserl (dalam Oetomo (Suyanto dan Sutinah, ed.), 2010:178) mengatakan “fenomenologi sebagai pengkajian terhadap cara manusia memerikan benda-benda dan hal-hal di sekitar, dan mengalami melalui indra-indranya. Hanya dengan memperhatikan persepsi dan makna yang menggugah kesadaran kitalah maka kita dapat mengenali apa yang kita alami”.

Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Scutz. Hal ini dikarenakan Scutz adalah orang yang pertama kali menggunakan *commit to user*

fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. “Wilson (diakses melalui <http://informationr.net>) mengatakan bahwa “*phenomenology seeks to understand how persons construct meaning and a key concept is intersubjectivity*”. Fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang mengkonstruksi atau memaknai sesuatu dengan konsep utamanya adalah intersubjektif. Fenomenolog mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep kunci yang intersubjektif. Karena itu, menurut Kuswarno (diakses melalui <http://embakri.wordpress.com>) “...penelitian fenomenologis harus berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala...”.

Schutz (Widyadana, dalam buku karangan Prof. Dr. Engkus Kuswarno; M.S yang diakses melalui <http://id.shvoong.com/> pada tanggal 19 Januari 2012, Pukul 17.00 Wib) mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa “objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas”. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan orang yang diamati, sehingga peneliti bisa masuk ke dalam dunia interpretasi orang yang dijadikan objek penelitian. Pada praktiknya, peneliti mengasumsikan dirinya sebagai orang yang tidak tertarik atau bukan bagian dari dunia orang yang diamati. Peneliti hanya terlibat secara kogniti dengan orang yang diamati.

Rahardjo (2010, diakses melalui <http://mudjiarahardjo.com/>) mengatakan istilah fenomenologi memiliki tiga konsep. *Pertama*, ia merupakan salah satu nama teori sosial mikro yang secara garis besar konsepnya adalah setiap gejala

atau peristiwa apa saja yang muncul tidak pernah berdiri sendirian. Dengan kata lain, selalu ada rangkaian peristiwa lain yang melingkupinya. Selain itu, menurut fenomenologi, yang tampak bukan merupakan fakta atau realitas yang sesungguhnya, sebab ia hanya merupakan pantulan-pantulan yang ada di baliknya. *Kedua*, fenomenologi merupakan jenis paradigma penelitian sebagai kontras dari positivistik. Jika positivistik merupakan akar-akar metode penelitian kuantitatif, maka fenomenologi merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif. Jika positivistik lebih memusatkan perhatian pada data yang empirik dan mencari hubungan antar-variabel, maka fenomenologi sebaliknya berfokus pada data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. *Ketiga*, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Karena itu, subjek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda.

Husserl (Widyadana, dalam buku karangan Prof. Dr. Engkus Kuswarno; M.S yang diakses melalui <http://id.shvoong.com/>) sangat tertarik dengan penemuan makna dan hakikat dari pengalaman. Dia berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara fakta dan esensi dalam fakta, atau dengan kata lain perbedaan antara yang real dan yang tidak.

Berikut adalah komponen konseptual dalam fenomenologi transendental Husserl (Widyadana, dalam buku karangan Prof. Dr. Engkus Kuswarno; M.S yang diakses melalui <http://id.shvoong.com/>):

a. Kesengajaan (*Intentionality*)

Kesengajaan (*intentionality*) adalah orientasi pikiran terhadap suatu objek (sesuatu) yang menurut Husserl, objek atau sesuatu tersebut bisa nyata atau tidak nyata. Objek nyata seperti seongkah kayu yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan kita namakan dengan kursi. Objek yang tidak nyata misalnya konsep tentang tanggung jawab, kesabaran, dan konsep lain yang abstrak atau tidak real. Husserl menyatakan bahwa kesengajaan sangat terkait dengan kesadaran atau pengalaman seseorang dimana kesengajaan atau pengalaman tersebut dipengaruhi oleh faktor kesenangan (minat), penilaian awal, dan harapan terhadap objek. Misalnya minat terhadap bola akan menentukan kesengajaan untuk menonton pertandingan sepak bola.

b. Noema dan Noesis

Noema atau noesis merupakan turunan dari kesengajaan atau *intentionality*. *Intentionality* adalah maksud memahami sesuatu, dimana setiap pengalaman individu memiliki sisi obyektif dan subyektif. Jika akan memahami, maka kedua sisi itu harus dikemukakan. Sisi obyektif fenomena (noema) artinya sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan, atau sekalipun sesuatu yang masih akan dipikirkan (*ide*). Sedangkan sisi subyektif (noesis) adalah tindakan yang dimaksud (*intended act*) seperti merasa, mendengar, memikirkan, dan menilai *ide*. Terdapat kaitan yang erat antara noema dan noesis meskipun keduanya sangat berbeda makna. Noema akan membawa pemikiran kita kepada noesis. Tidak akan ada noesis jika kita tidak mengawalinya dengan noema. *commit to user* Begini mudahnya. Kita tidak akan tahu tentang

bagaimana rasanya menikmati buah durian (noesis karena ada aspek merasakan, sebagai sesuatu atau objek yang abstrak) jika kita sendiri belum mengetahui seperti apa wujud durian (noema karena berkaitan dengan wujud, sebagai sesuatu atau objek yang nyata).

c. Intuisi

Intuisi yang masuk dalam unit analisis Husserl ini dipengaruhi oleh intuisi menurut Descartes yakni kemampuan membedakan “yang murni” dan yang diperhatikan dari *the light of reason alone* (semata-mata alasannya). Intuisilah yang membimbing manusia mendapatkan pengetahuan. Bagi Husserl, intuisilah yang menghubungkan noema dan noesis. Inilah sebabnya fenomenologi Husserl dinamakan fenomenologi transendental, karena terjadi dalam diri individu secara mental (transenden).

d. Intersubjektivitas

Makna intersubjektif ini dijabarkan oleh Schutz. Bahwa makna intersubjektif ini berawal dari konsep ‘sosial’ dan konsep ‘tindakan’. Konsep sosial didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang dan konsep tindakan didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif. Akan tetapi, makna subjektif tersebut bukan berada di dunia privat individu melainkan dimaknai secara sama dan bersama dengan individu lain. Oleh karenanya, sebuah makna subjektif dikatakan intersubjektif karena memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan (*common and shared*).

Dari semua pendapat mengenai fenomenologi di atas maka dapat disimpulkan bahwa fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang digunakan

untuk memahami suatu realitas dari perilaku-perilaku masyarakat karena adanya perbedaan antara fakta dan esensi. Hal ini dikarenakan apa yang nampak dipermukaan merupakan suatu pantulan-pantulan yang kontras dengan kenyataan yang ada. Fenomenologi mencoba mengkonstruksikan dan memandang suatu realitas yang ada berdasarkan interpretasi dari subjek yang diteliti maka pendekatan fenomenologi sering dikatakan sebagai pendekatan intersubjektif.

B. *Setting* dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi atau *setting* di Jalan Kartini (Pasar Burung Kartini) dengan objek penelitian komunitas pedagang burung yang tergabung dalam suatu komunitas yaitu PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS). Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut menarik dan berbeda dengan PKL lainnya yang notabene melakukan kegiatan di pinggir-pinggir jalan ataupun trotoar namun di Jl. Kartini PKL melakukan kegiatan perdagangannya di median jalan. Di dalam paguyuban ini terdapat dinamika-dinamika penting yang penting untuk diteliti karena terdapat interaksi-interaksi yang mereka jalin dalam upaya resolusi konflik.

Tabel 3.1 Penjabaran Fokus Penelitian Mengenai Peranan *Social Capital* Dilihat Dari Interaksi-Interaksi Pada Tataran *Bonding*, *Bridging*, Dan *Linking* Yang Ada Di Lingkungan PKL Kartini Semarang Sebagai Resolusi Konflik.

NO.	PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUMBER	METODE
1	Bagaimana peranan <i>social capital</i> dalam resolusi konflik dilihat dari interaksi-interaksi pada tataran <i>bonding</i> , <i>bridging</i> , dan <i>linking</i> yang ada di lingkungan PKL Kartini Semarang?	a. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>bonding</i> .	Ketua P3BS, Bendahara P3BS.	Observasi dan Wawancara.
		b. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>bridging</i>	Ketua P3BS, Bendahara P3BS, Dewan Penasehat P3BS.	Wawancara, Dokumentasi, dan Interview.
		c. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>linking</i>	Ketua P3BS, Dewan Penasehat P3BS.	Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih subjek yang diteliti menjadi informan dalam penelitian ini. Menurut Hendrarso (dalam Suyanto dan Sutinah, 2010:172) informan dalam penelitian kualitatif meliputi: (1) informan kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Dewan Penasehat P3BS yaitu Bambang Tri Bawono, SH; Beliau dipilih dan dijadikan informan kunci dalam penulisan tesis ini karena dianggap sangat mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. Selain itu, Penulis memilih Dewan Penasehat P3BS (Bambang Tri Bawono, SH) juga dikarenakan Wahyudi (Ketua P3BS) yang mengetahui dan terlibat langsung dalam interaksi sosial di lingkungan P3BS cenderung menghindar dan berbelit-belit dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Penulis. Penulis juga mengorek informasi yang berkenaan dengan masalah keuangan dan penggalian potensi PKL dengan menggali informasi dari Bendahara P3BS (Mbak Inul) sebagai informan tambahan. Dari pihak Pemerintah, Kabid PKL (Drs. Satrio Imam, M.Si) merupakan informan tambahan karena mengetahui informasi mengenai PKL Kartini meskipun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial di lingkungan PKL Kartini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam penulisan tesis ini, Penulis menggunakan *purposive sampling* (Wahyudi sebagai ketua P3BS dan Bambang Tri Bawono, SH. Sebagai Dewan Penasehat P3BS). Menurut Riduwan (2010:63) “*purposive sampling* atau yang dikenal juga dengan *sampling pertimbangan* ialah teknik *sampling* yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu”.

Penulis juga menggunakan *snowball sampling*, Bendahara P3BS (Mbak Inul) dan Kabid PKL Dinas Pasar Pemkot Semarang (Drs. Satrio Imam, M.Si.). Riduwan (2010:64) mengatakan “*snowball sampling* adalah teknik sampling yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sample mengajak para sahabatnya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel makin membengkak jumlahnya seperti (bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar)”.

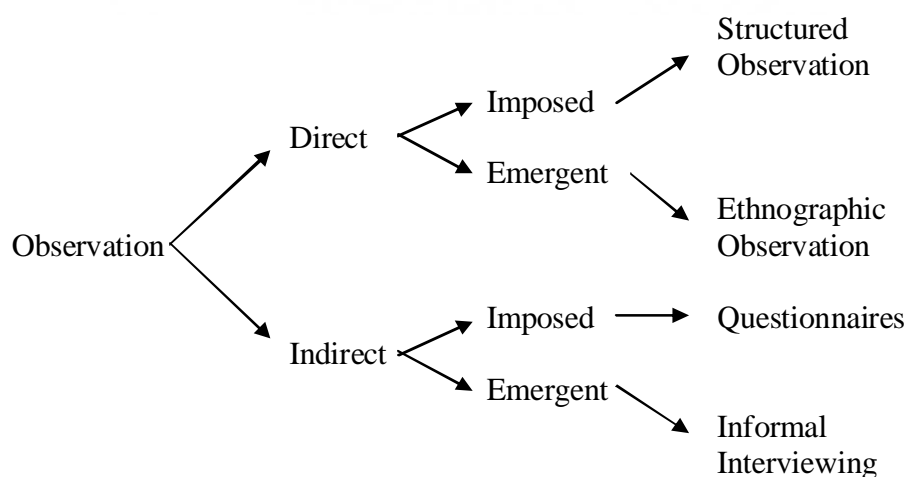
D.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wilson (2002:6) mengatakan bahwa “*To state one's methodological position is to describe one's view of the nature of reality: for the positivist, the methodological position is that the facts of the world represent real objects, while for the phenomenologist, the world (or at least the world s/he chooses to explore) is one of intersubjectively constructed meanings. Within phenomenology, with its emphasis on understanding the person's experience of the world and his/her situation, the research methods are the methods of philosophy*”. Metodologi merupakan sesuatu yang harus ditentukan sebelum penelitian karena hal ini merupakan sesuatu yang lebih fundamental. Metodologi digunakan untuk menggambarkan suatu pandangan mengenai sifat dasar dari suatu realitas: positivis melihat metodologi sebagai fakta-fakta yang ada sebagai objek yang nyata sedangkan fenomenologi dalam memaknai realitas yang ada dari pemaknaan yang dikonstruksikan secara intersubjektif.

Dalam pendekatan fenomenologi juga digunakan observasi dalam pengumpulan datanya. Wilson (2002:7) mengatakan bahwa “*observation is the commit to user fundamental method of data collection, and that this may be divided into direct*

observation by the researcher and 'indirect' observation, where the researcher collects self-observations from respondents. Either of these modes may have structure imposed on the data collection by the researcher, or s/he may allow structure to 'emerge' in the process of analysis". Observasi merupakan metode utama untuk mengumpulkan data dalam metode fenomenologi. Observasi dibagi menjadi *direct observation* dan *indirect observation*. *Direct observation* merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan dalam *indirect observation*, Peneliti memperoleh informasi hanya dari responden tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Untuk lebih jelasnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan fenomenologi adalah berikut ini.



Gambar. 3.1. Kerangka Konsep Pengumpulan Data Dalam Metode Fenomenologi

Dilihat dari kerangka di atas dapat dijabarkan bahwa observasi dibagi menjadi dua yaitu *direct* dan *indirect*. Dalam observation secara *direct* Peneliti harus terjun langsung dan terlibat dalam objek yang diteliti dengan menggunakan *ethnographic observation* dan meninggalkan observasi terstruktur (*structured observation*) karena dapat mengganggu jalannya pengamatan secara langsung. Sedangkan *indirect observation*, aspek penting yang dilakukan adalah *informal interviewing* dan menghindari pemakaian *questionnaires*.

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan mengenai interaksi-interaksi sosial dan perilaku PKL sejak November 2007 sampai sekarang sehingga Penulis mendapatkan informasi-informasi secara umum mengenai PKL Kartini. Namun, pengamatan secara intensif baru dilakukan sejak Maret 2011 karena Penulis ingin mendalami perilaku PKL dalam upaya mempertahankan diri untuk tetap dapat berjualan di Jalan Kartini. Observasi yang dilakukan Penulis merupakan observasi non partisipan dan observasi tidak terstruktur. Menurut Riduwan (2009:166) “observasi non partisipan merupakan peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diteliti dan hanya sebagai pengamat independen”. Kemudian Riduwan (2009:167) juga mengatakan bahwa “observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi”.

Rahardjo (diakses melalui <http://mudjiarahardjo.com>) mengatakan bahwa “teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada metode fenomenologi adalah lewat wawancara yang mendalam, peneliti fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya *“human behaviour is a reflection of human mind”*. Yang membedakan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain, fenomenologi

menggunakan orang sebagai subjek kajian, bukan teks atau organisasi, dsb.”. Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada berbagai pihak baik yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial di lingkungan PKL Kartini maupun tidak secara langsung terlibat. Penulis melakukan interview secara mendalam kepada Wahyudi selaku Ketua P3BS untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Namun, karena Wahyudi cenderung menghindar dan berbelit-belit dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Penulis melengkapi kekurangan informasi dengan melakukan wawancara mendalam kepada Dewan Penasehat P3BS yaitu Bambang Tri Bawono, SH. Untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan PKL, Penulis melakukan interview secara mendalam kepada Bendahara P3BS yaitu Mbak Inul. Informasi ini dianggap penting karena berhubungan dengan penggalan potensi dan kemandirian PKL. Penulis melakukan interview secara mendalam kepada Kabid PKL Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang untuk mendapatkan informasi mengenai sikap Pemerintah dan kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap PKL Kartini khususnya. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis termasuk ke dalam wawancara tidak terstruktur karena Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Riduwan (2009:160) mengatakan “wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”.

commit to user

Wilson (2002:7) mengatakan “*observation and qualitative interviewing are widely used, as is documentary analysis*”. Jadi dalam metode fenomenologi, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan *interview*. Observasi dan hasil wawancara digunakan sebagai dokumen analisis. Wilson juga mengatakan bahwa dalam metode fenomenologi, untuk mengumpulkan data atau informasi, penggunaan dokumen atau *textbook* harus dihindari.

E. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data yang telah dicatat dan dikumpulkan, Penulis menggunakan triangulasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari pengolahan data yang sudah diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). Adapun macam-macam triangulasi menurut Denzin (1978, dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori yang Penulis sitir dari Moleong, 2006:330-331 dapat dijabarkan berikut ini:

1. Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).
2. Triangulasi dengan *metode*, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan *teori*, menurut Lincoln dan Guba (1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Triangulasi yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi *sumber* dilakukan Penulis dengan cara mengumpulkan data sejenis dengan sumber berbeda melalui kroscek agar data yang diperoleh benar-benar valid. Misalnya, dalam penelitian, Penulis melakukan interview dengan Ketua PKL (Wahyudi) mengenai apa saja yang dilakukan untuk membangun *network* agar tetap eksis. Jawaban yang diperoleh Penulis dari Wahyudi kurang memuaskan karena Wahyudi cenderung menghindari dan terkesan takut untuk memberikan jawaban. Oleh karena itu, Penulis menggali informasi dari Dewan Penasehat P3BS (Bambang Tri Bawono, SH). Selain itu, Penulis juga menggunakan triangulasi *metode* yaitu dengan menggunakan metode berbeda untuk mengumpulkan data yang sama. Penulis mengkroscek hasil interview dengan data-data yang berasal dari dokumen sehingga metode wawancara dikroscek kembali dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai kroscek adalah ADRT P3BS, Peraturan Daerah

(Perda) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan atau Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), serta jurnal-jurnal ilmiah dan data dari internet maupun informasi yang menunjang penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar teruji kesahihannya.

5.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982, dalam Moleong, 2006:248) adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam analisis data, Penulis menggunakan teknik interpretative dan intersubjektive “*Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) is an approach to psychological qualitative research with an idiographic focus, which means that it aims to offer insights into how a given person, in a given context, makes sense of a given phenomenon. Usually these phenomena relate to experiences of some personal significance - such as a major life event, or the development of an important relationship*” (<http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretativephenomenologicalanalysis>).

Analisis data melalui interpretasi dalam pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan secara psikologis dalam penelitian kualitatif dengan *idiographic focus* yang berarti bahwa analisis ini bertujuan untuk masuk dan memahami fenomena yang

ada dilingkungan manusia dilihat dari konteks dan *sense* dari fenomena yang ada. Biasanya fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang memiliki arti penting bagi *personals* – pengalaman-pengalaman atau fenomena-fenomena itu dapat berupa peristiwa-peristiwa yang bersifat umum atau membangun hubungan atau kerjasama yang penting.

Adapun tahap-tahap analisis data secara interpretatif yang penulis kutip dari (http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretative_phenomenological_analysis) adalah seperti berikut ini:

- *Transcripts are coded in considerable detail, with the focus shifting back and forth from the key claims of the participant, to the researcher's interpretation of the meaning of those claims.* Tahapan pertama yang dilakukan dalam analisis adalah dengan cara membuat “kode” pada transkrip secara detail mengenai fokus mengubah dan keluar dari interpretasi dari Peneliti melainkan mengikuti interpretasi dari orang yang diteliti.
- *Analysis in IPA is said to be 'bottom-up.' This means that the researcher generates codes from the data, rather than using a pre-existing theory to identify codes that might be applied to the data.* Analisis interpretative merupakan analisis *bottom-up*. Ini berarti bahwa Peneliti menggeneralisasi kode-kode dari data daripada menggunakan atau menerapkan teori dalam mengidentifikasi kode-kode dari data yang diperoleh.
- *After transcribing the data, the researcher works closely and intensively with the text, annotating it closely ('coding') for insights into the participants' experience*
commit to user
and perspective on their world. As the analysis develops, the researcher

catalogues the emerging codes, and subsequently begins to look for patterns in the codes. These patterns are called 'themes'. Themes are recurring patterns of meaning (ideas, thoughts, feelings) throughout the text. Themes are likely to identify both something that matters to the participants (i.e. an object of concern, topic of some import) and also convey something of the meaning of that thing, for the participants. E.g. in a study of the experiences of young people learning to drive, we might find themes like 'Driving as a rite of passage' (where one key psychosocial understanding of the meaning of learning to drive, is that it marks a cultural threshold between adolescence and adulthood). Setelah menggambarkan data, Peneliti bekerja secara intensif dengan tes, memberikan catatan mengenai pemahaman dan perspektif para partisipan mengenai dunia mereka dengan memberi 'kode'. Untuk mengembangkan analisis, Peneliti menandai dan menyusun daftar fakta-fakta yang muncul dengan memberi kode, kemudian Peneliti melanjutkan dengan menyusun pola dalam kode-kode. Susunan kode-kode tersebut biasa disebut "tema". Tema merupakan susunan makna yang berulang kali muncul (ide-ide, perasaan-perasaan, pikiran atau gagasan) yang ada dalam teks. Tema digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang terjadi pada partisipan dan menyampaikan pemahaman atau persepsi dari partisipan mengenai suatu objek atau realitas tertentu.

- *The final set of themes are typically summarised and placed into a table or similar structure where evidence from the text is given to back up the themes produced by a quote from the text.* Tahapan terakhir dalam analisis interpretatif adalah menyusun tema-tema dengan membuat rangkuman dan menyusunnya ke *commit to user*

dalam tabel atau seperti struktur yang menunjukkan fakta-fakta yang diberikan teks untuk *memback-up* tema yang dihasilkan melalui kuotasi dari teks-teks tersebut.

Selain menggunakan analisis interpretative, Penulis juga menggunakan analisis intersubjektif untuk menggambarkan secara mendalam mengenai konstruksi persepsi dari objek yang diteliti. Jadi, pada intinya analisis penelitian ini baik itu interpretative maupun intersubjektive sama-sama mendalami perspektif dari objek yang diteliti. Husserl (Widyadana, dalam buku karangan Prof. Dr. Engkus Kuswarno; M.S yang diakses melalui <http://id.shvoong.com/>) mengatakan “makna intersubjektif ini dijabarkan oleh Schutz. Bahwa makna intersubjektif ini berawal dari konsep ‘sosial’ dan konsep ‘tindakan’. Konsep sosial didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang dan konsep tindakan didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif. Akan tetapi, makna subjektif tersebut bukan berada di dunia privat individu melainkan dimaknai secara sama dan bersama dengan individu lain. Oleh karenanya, sebuah makna subjektif dikatakan intersubjektif karena memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan (*common and shared*)”.

Analisis data pada penelitian fenomenologi oleh Cresswel (1996, diakses melalui <http://embakri.wordpress.com/>) dibagi dalam beberapa langkah penelitian antara lain:

- Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
- Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data *commit to user* yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.

- Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontalization* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).
- Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi
- Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)
- Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut
- Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis.

Dalam analisis penelitian ini, Penulis mencoba mengorganisasikan data mulai dari membuat transkrip dari hasil interview, membaca keseluruhan hasil interview

dari transkrip dan mengolahnya menjadi tema-tema sesuai dengan fokus penelitian serta membuang pernyataan yang tumpang tindih. Tema-tema tersebut disusun secara naratif, dan akhirnya dari tema-tema tersebut disajikan pada paparan-paparan hasil penelitian dan pembahasan. Adapun transkrip dari hasil interview secara mendalam dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. PKL dan Relokasi

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai konflik-konflik yang ada di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang yang merupakan titik awal proses terbangunnya suatu *networking* dan aksi-aksi yang berupa penolakan-penolakan terhadap kebijakan relokasi yang digulirkan Pemerintah terhadap mereka sehingga relokasi selalu menemui kegagalan. PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang membangun suatu *network* dengan berbagai pihak untuk mempertahankan eksistensinya. PKL melakukan *network* atau interaksi-interaksi yang di dalamnya juga terdapat *cognitive social capital* yang ada di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang. *Network* merupakan resolusi konflik yang dipilih dan dilakukan oleh PKL untuk meredam konflik dan mencari titik temu pemecahan konflik yang ada antara PKL dengan Pemerintah Kota Semarang maupun dengan *stakeholder* yang lain.

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang memiliki ketidaksepakatan dan pertentangan dalam hal penggunaan lahan publik untuk lokasi berjualan PKL Kartini. Konflik yang ada di PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang bermula pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 Pukul 03.03 Wib. Polisi Pamong Praja melakukan pengusuran atau relokasi secara paksa terhadap PKL P3BS di Jalan Kartini namun PKL P3BS menolak relokasi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya (www.suamerdeka.com).

Dalam kondisi PKL tertekan oleh penguasa hal atau sikap yang dilakukan oleh PKL pada awalnya mereka melakukan perlawanan seperti yang diberitakan pada media massa Suara Merdeka di atas. Hal ini dikarenakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 pukul 03.03 WIB Polisi Pamong Praja melakukan pengusuran atau relokasi secara paksa. Hal ini menimbulkan kekacauan karena PKL menolak relokasi karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hal pertama yang dilakukan PKL P3BS di Jalan Kartini adalah membentuk suatu Paguyuban karena pada saat mereka dikenai kebijakan untuk relokasi PKL masih berjuang sendiri-sendiri atau secara individu. Pada saat itu mereka dalam posisi *powerless*, menyadari ketidakberdayaannya tersebut PKL lalu membentuk suatu Paguyuban yang diberi nama PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS). Melalui Paguyuban akan mempermudah PKL dalam melakukan koordinasi maupun tindakan secara kolektif untuk mempertahankan diri dan tetap berjualan di lokasi Jalan Kartini, tempat mereka berdagang selama ini. Selain itu, dengan memiliki suatu ‘wadah’ PKL dapat menolak ataupun memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terhadap mereka sehingga melalui Paguyuban ini, PKL mampu dan memiliki *bargaining position* terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Berikut penuturan Wahyudi selaku Ketua P3BS pada saat interview tanggal 4 Maret 2011 mengenai latar belakang berdirinya P3BS:

“Latar belakang berdirinya P3BS yaitu atas dasar akan digusurnya kami para PKL Kartini oleh Pemkot dan tidak ada solusi buat Kami pada saat itu sama sekali. Jadi kami bersama teman-teman PKL sepanjang Jalan Kartini tentunya berupaya untuk bersatu, untuk

maju yaitu bersatu untuk dapat memperjuangkan nasib kami yaitu dimana besar harapan kami untuk dapat memperjuangkan tempat kita untuk mencari nafkah atau berjualan”.

Untuk mengukuhkan legalitas organisasi yang menaungi mereka, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang mendaftarkan organisasi mereka di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Semarang. Secara resmi P3BS terdaftar di Kesbangpolinmas Semarang pada tanggal 5 September 2009 dengan surat keterangan terdaftar nomor 220/30/IX/2009 sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, meskipun P3BS terdaftar di Kesbangpolinmas sebagai organisasi kemasyarakatan namun PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dianggap sebagai organisasi yang ilegal atau diistilahkan ‘liar’ oleh Pemkot Semarang khususnya Dinas Pasar karena meskipun organisasi PKL P3BS di Jalan Kartini legal tetapi tetap saja PKL melanggar penggunaan lahan larangan untuk berjualan seperti yang diutarakan oleh Kabid PKL Dinas Pasar Semarang, Bapak Satrio Imam, M.Si pada saat interview pada tanggal 13 April 2011 sebagai berikut:

“Yang jelas keberadaan yang di sini itu terdiri tidak hanya yang diistilahkan PAGUYUBAN PASAR BURUNG. Karena PAGUYUBAN PASAR BURUNG itu yang ada di Karimata. Kalau yang di sini itu ibaratnya, Mereka itu Pedagang campuran; di sana anda bisa mendapatkan burung ada, kemudian ada baju, ada ya berbagai macam. Ya memang 1/3 hampir 1/2 memang mendekati ke Pasar burung. Tapi yang lebih spesifik itu di sini (Karimata). Kemudian keberadaan mereka yang di jalan Kartini adalah liar”.

commit to user

Selain itu, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dikatakan ‘liar’ karena lahan atau tempat PKL berjualan tidak dinaungi dan tercatat dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang tentang penetapan lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kota Semarang (selengkapnya baca lampiran halaman 183). Namun, walaupun PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang berjualan di tempat larangan untuk berjualan tetapi organisasi yang dibentuk yaitu P3BS merupakan organisasi yang legal sehingga mereka tidak dapat dikatakan liar seperti yang diutarakan oleh Dewan penasihat P3BS Bambang Tri Bawonon SH. yang membenarkan P3BS menempati daerah larangan berjualan itu benar, namun Beliau membantah bahwa P3BS itu liar. Hal ini dikarenakan P3BS ternaung dalam suatu organisasi jadi tidak bisa dikatakan liar. Berikut kutipan wawancara pada dengan Beliau pada tanggal 13 April 2011:

“Iya. Tidak disebut PKL liar. Kalau PKL P3BS sudah tidak liar, karena sudah ternaung dalam sebuah organisasi. Kalau dia menggunakan tempat yang memang menggunakan tempat yang bukan diperkenankan untuk Pedagang burungya, memang iya tapi kan bukan liar”.

Hal di atas semakin memperuncing ketidakharmonisan hubungan antara PKL Kartini dengan Dinas Pasar meski lokasi antara PKL dengan Dinas Pasar sangat dekat letaknya yang hanya berjarak beberapa meter saja ditambah lagi dengan penolakan-penolakan PKL untuk direlokasi ke Pasar Waru maupun ke Gunung Pati.

Namun kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka relokasi PKLs Kartini selalu berakhir gagal. Salah satu contoh kegagalan relokasi yang dilakukan terhadap PKL P3BS di Jalan Kartini ke

Pasar Waru. PKL menolak direlokasi ke pasar waru karena akses jalan menuju lokasi yang rusak, tidak ada akses transportasi atau kendaraan angkutan yang menuju pasar sehingga pembeli kesulitan menuju lokasi yang menyebabkan pasar sepi pengunjung sebagai akibatnya PKL yang telah direlokasi ke Pasar Waru kembali lagi berjualan di Jalan Kartini sampai sekarang sehingga Pasar Waru mangkrak seperti yang dikutip oleh Penulis pada harian Suara Merdeka CyberNews pada tanggal 28 Juni 2010 | 14:10 wib berikut ini:

“Kondisi pasar burung di Pasar Waru yang berada di Jalan Sawah Besar, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari saat ini memprihatinkan dan mangkrak hal ini dikarenakan PKL memilih kembali berjualan di Jalan Kartini. Pedagang beralasan di Pasar Waru omzet penjualan mereka terus menurun. Omzet yang terus menurun *hingga* 50% dikarenakan sepi pembeli. Pembeli sulit menjangkau tempat berjualan yang baru karena sulitnya akses transportasi dan kondisi jalan yang rusak (Yulianto, Suara Merdeka, 2010)”. Berita selengkapnya dapat dibaca pada lampiran halaman 153. Penolakan-penolakan relokasi atau penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap mereka (PKL Kartini) merupakan dampak dari dibentuknya Paguyuban Pesona Pedagang Burung Semarang (P3BS). Setelah memiliki wadah, PKL P3BS di Jalan Kartini benar-benar dapat menyampaikan aspirasinya sebagai wujud *bargaining position* terhadap kebijakan yang digelontorkan Pemerintah yang menurut mereka (PKL) dapat merugikan atau bahkan membunuh mata pencaharian mereka. Adapun salah satu wujud bentuk penolakan yang dilakukan PKL Kartini salah satunya adalah *commit to user* aspirasi dari Mbak Inul (Bendahara P3BS) yang mengatakan bahwa alasan PKL

menolak relokasi karena Pedagang Pasar Burung Karimata tidak pindah. Jadi, kunci berhasil atau tidaknya relokasi PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang ke tempat lain adalah Pedagang Karimata. Berikut kutipan hasil interview dengan Bendahara P3BS (pada tanggal 18 September 2011) mengenai alasan PKL menolak relokasi:

“Ya lihat dulu. Tapi kalau Pasar dalam (Karimata) pindah, kita ngikut pindah. Kalau pasar dalam enggak pindah ya kita tidak mau pindah”.

“Ya sini ngikut, tapi kalau sana (Karimata) ndak pindah, sini untuk pindah ya sulit mbak”.

Selain karena hal di atas Wahyudi mengatakan alasan penolakan relokasi karena tempat yang disediakan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PKL. Tempat yang disediakan tidak strategis. Pasar Waru dipandang tidak memiliki nilai jual dan mematikan sumber penghidupan PKL. Hal tersebut dikarenakan Pasar Waru memiliki banyak kekurangan. Pasar ini dinilai tidak kompetitif karena akses jalan menuju lokasi yang sulit, tidak adanya angkutan transportasi, sering banjir rob serta letaknya yang jauh dari pusat kota. Berikut hasil interview dengan Wahyudi (pada tanggal 4 Maret 2011) mengenai penolakan relokasi ke Pasar Waru:

“Kalau Kami itu manut-manut saja yang penting baik dan dimana disitu harus Semuanya benar-benar membuat kami yang lebih baik dan maju. Kami yakin dan percaya mereka-mereka itu atau Pemkot itu kan manusia yang punya rasa manusiawi yang bisa memberikan yang baik dan terbaik tho? Jadi ndak mungkin memberikan solusi seperti mungkin kemarin itu, mungkin orangnya keblinger atau gimana kurang tahu. Jadi, memberikan tempat solusi kog seperti member tempat pembuangan Jim gitu, ndak mungkin ada pengunjung ke situ. Jadi, seperti Pasar Waru. Jadi, disitu rob banjir setiap hari, aksesnya ndak ada, transportasi ndak ada, jauh dari jangkauan masyarakat kog kami kog mau diberikan relokasi disitu.

Ya ndak mungkin hidup, ndak memberi kehidupan kami, malah mematikan kami. Daripada itu kan kami tetap memberontak itu tadi. Nah sebelum kami memberontak, kami kan dapat dukungan dari masyarakat. Carilah solusi yang baik, gak usah membuat gebrakan yang kurang baik. Jadi, kita menjalin hubungan dan kita silaturahmi baik, akhirnya sampai akhir ini baik-baik, nggak ada keributan apa-apa lagi”.

Pernyataan Wahyudi di atas dibenarkan oleh Kabid PKL Dinas Pasar Kota Semarang yang mengatakan bahwa mungkin ketidakberhasilan relokasi yang mengakibatkan PKL kembali lagi ke Kartini setelah direlokasi ke Pasar Waru adalah ketidakstrategisan lokasi. Pak Satrio Imam selaku Kabid PKL pada saat interview tanggal 13 April 2011 mengatakan bahwa:

“Di Pasar Waru sudah kita sediakan lahan lokasi untuk mereka supaya bisa beraktivitas di sana tetapi karena mungkin kondisinya mungkin di lokasi Pasar Waru kurang strategis lokasinya; dari infrastruktur kurang menunjang dan akses marketnya mungkin mereka (PKL) lebih dekat di sini daripada di Pasar Waru, akhirnya mereka kembali lagi ke sini”.

Pada awalnya PKL P3BS menempati Pasar Waru, namun karena di tempat yang baru sepi pengunjung PKL P3BS kembali lagi berjualan di median Jalan Kartini. Hal tersebut dikarenakan di Pasar Waru sepi pengunjung akibat dari lokasi yang kurang strategis; infrastruktur yang tidak memadai dan tidak adanya sarana transportasi menuju Pasar Waru.

2. Networks (*bonding, bridging, dan linking*) Sebagai Resolusi Konflik

Interaksi-interaksi yang dilakukan PKL P3BS di Jalan Kartini berupa *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*. Interaksi-interaksi tersebut merupakan resolusi konflik yang dipilih PKL P3BS terhadap permasalahan (konflik) mengenai larangan berjualan di median jalan

kartini. Melalui interaksi-interaksi (*bonding, bridging, linking*) ini, PKL dapat menyampaikan aspirasinya dan menolak setiap kebijakan penertiban atau relokasi terhadap mereka. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang digelontorkan Pemerintah terhadap mereka selalu gagal diimplementasikan.

Social capital kaitannya dengan *bonding, bridging, dan linking* tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen yang membentuknya. Elemen-elemen yang ada baik itu pada ikatan *bonding, bridging, dan linking* dibentuk dari adanya *social network, norm of trust, dan mutual benefit*. Interaksi-interaksi atau kerjasama antara orang-orang baik secara individu, komunitas dan antar komunitas hanya dapat berjalan jika di dalamnya terdapat norma-norma kepercayaan dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing orang atau komunitas dari kerjasama atau interaksi sosial yang dilakukan. Tanpa adanya *networking* yang di dalamnya terdapat norma-norma kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan maka *social capital* tidak akan terbentuk.

a. Bonding Social Capital (PKL dengan Komunitasnya)

Bonding merupakan suatu interaksi internal PKL, interaksi tersebut dapat diperkuat melalui pembentukan suatu perkumpulan atau paguyuban di antara mereka namun dapat juga berupa interaksi antar paguyuban PKL. Dalam penelitian ini *bonding social capital* mengenai hubungan interaksi PKL dalam sebuah paguyuban tentang apa yang mereka lakukan, mereka rasakan. Namun, hal tersebut tidak cukup karena di dalam *network* harus ada norma-norma kepercayaan dan kerjasama untuk mencapai *mutual benefit*.

Ketiga unsur ini saling melengkapi satu sama lain dan dipaparkan dalam paragraf-paragraf berikut.

1) *Social Network*

Interaksi antara PKL dengan PKL (*bonding*) dapat diperkuat melalui pembentukan suatu paguyuban/organisasi PKL sehingga tercipta suatu pengelolaan komunitas (*local governance*). PKL menata dirinya sendiri dan menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan secara mandiri tanpa bantuan dari Pemerintah kecuali lahan tempat mereka berjualan. Komunitas PKL di pasar Kartini Semarang membentuk suatu Paguyuban yang diberi nama “PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS)” pada tanggal 7 September 2007. Paguyuban ini dibentuk sebagai wadah yang menaungi mereka, tempat mereka membangun kekuatan serta menyampaikan aspirasinya sehingga mereka mampu bertahan dan memiliki *bargaining position* terhadap kebijakan Pemerintah yang kemungkinan merugikan mereka. Meningkatnya *bargaining position* orang miskin terhadap kebijakan yang mungkin merugikan mereka merupakan faktor kunci atau utama keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan hal ini hanya dapat diperoleh jika komunitas orang miskin mau dan mampu mendirikan suatu wadah yang menampung dan mengaktualisasikan apa yang ingin mereka capai. Interaksi-interaksi sosial antara PKL yang ada di Jalan Kartini dalam upaya membangun suatu kesatuan melalui pembentukan Paguyuban untuk

commit to user

melakukan tindakan secara kolektif inilah yang mengawali terbentuknya kerjasama dan rasa kebersamaan diantara PKL.

PKL identik dengan kemiskinan. Suatu komunitas atau mayoritas orang miskin tidak akan mampu keluar dari kemiskinannya jika mereka terisolasi. Dalam hal ini PKL harus mampu masuk atau membangun suatu *network* agar mereka dapat *survive* karena jika PKL atau komunitas tidak dapat membangun suatu jaringan maka pengentasan kemiskinan akan gagal dilakukan. Melalui *network* atau jaringan, PKL akan mudah mengakses informasi maupun berbagi hal yang lain (seperti koordinasi, kolaborasi) yang memudahkan mereka melakukan tindakan secara kolektif. Menyadari kelemahannya tersebut PKL P3BS di Jalan Kartini melalui arahan Pak Bambang Tri Bawono, SH. Selaku Dewan Penasehat P3BS melakukan kerjasama dengan PKL-PKL se-kota Semarang dan melakukan sarasehan antara PKL, saling curhat bagaimana cara agar lekas ditendanisasi serta mengadakan lomba-lomba seperti burung berkicau dan lain-lainnya. Mereka melakukan hal positif itu melalui arahan Beliau untuk menunjukkan dan memberikan citra positif kepada masyarakat dalam rangka bisa dikatakan “ajang cari perhatian kepada pemerintah” dan juga mencari dukungan dari masyarakat untuk pengakuan keberadaan mereka. Pada saat interview tanggal 13 April 2011, Dewan Penasihat P3BS (Bambang Tri Bawono, SH) mengatakan bahwa :

“Ya semua kita lakukan. Jadi gini, konteksnya adalah membantu *sinergisasi* program dengan pemerintah, contohnya adalah lomba burung berkicau. Itu kan sebenarnya program-program Pemerintah dari segi pariwisata, kan bisa

disinergiskan e... atau misalnya menjaga kebersihan bersama itu suatu program bersih-bersih. Karena pada satu sisi teman-teman diperbolehkan dalam tanda kutip “untuk sementara bisa disitu” nah disisi lain ya teman-teman harus bisa bermanfaat, baik itu dari sisi Pemerintah Kota maupun masyarakat sekitar. Yang terpenting itu”.

Dilihat dari segi positifnya, keberadaan PKL dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan dimana PKL dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di saat Pemerintah dirasa kurang memberikan ruang dan peluang pekerjaan untuk mereka maka PKL dapat memberikan jawaban dan solusi bagi pengangguran yang kian meningkat di negeri ini. PKL P3BS di Jalan Kartini sendiri sangat terbuka dengan kehadiran anggota baru sehingga secara otomatis kuantitas mereka meningkat tentu saja kekuatan PKL semakin kokoh sebagaimana dinyatakan oleh Wahyudi pada saat interview tanggal 4 Maret 2011 sebagai berikut:

“Ya. Semisal gini mas, bahkan pengunjung atau penggemar burung itu kan tidak cuma dia hobi burung bahkan dia bisa jadi solusi mencari lapangan kerja. Mulai dari penggemar bahkan langsung mulai jadi tahu harga burung dan akhirnya jadi pedagang burung. Jadi, pedagang di situ kalau berkurang itu tidak mungkin, bertambah... terus. Jadi mulai pedagang kecil sampai besar, yang mulai penggemar ada yang mulai jadi Pedagang; mulai 1,2 dagangan menjadi lebih. Lho, di situ menurut Kami itu salah satu solusi memberi lapangan kerja yang gratis, memberikan lapangan kerja. Jadi, banyak yang ada teman-teman yang saya lihat itu pengunjung pengangguran di situ, akhirnya penggemar burung, akhirnya di situ malah mereka 1,2 yang saya lihat itu bahkan puluhan lebih sudah jadi Pedagang burung di situ. Itu harusnya Pemerintah membuka matanya oh.. iya ternyata Pasar Burung Kartini atau P3BS ini dapat membuka memberikan solusi lapangan kerja buat masyarakat kota Semarang ataupun yang lainnya yang *obertempat* tinggal di kota Semarang ini. Bangga... harusnya itu Mas”.

PKL P3BS di Jalan Kartini merasa bangga karena kehadiran mereka justru membawa dampak positif bagi lingkungannya karena dapat menjadi solusi bagi mereka yang mencari lapangan kerja. Pedagang burung selalu bertambah jumlahnya, hal ini menunjukkan bahwa PKL P3BS di Jalan Kartini memberi peluang atau terbuka terhadap Pedagang baru. Jadi, secara tidak langsung PKL P3BS di Jalan Kartini mampu memberi dan membuka lapangan pekerjaan secara gratis dikala Pemerintah, Market, dan sektor formal dirasa tidak mampu menyerap pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Selain interaksi-interaksi sosial yang dilakukan mampu menyatukan PKL P3BS di Jalan Kartini ke dalam suatu visi dan misi yang sama, *social network* atau interaksi-interaksi sosial dilakukan PKL Kartini untuk membangun kebersamaan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai *civic virtue* seperti solidaritas, toleransi yang didukung oleh saling percaya, tenggang rasa, tepo seliro di antara PKL merupakan unsur yang kuat yang membentuk interaksi *social capital* di lingkungan mereka menjadi kuat. Hal ini mendukung mereka dalam berinteraksi sehingga terciptalah kerukunan di antara mereka. Kerukunan, kebersamaan atau kohesivitas yang terbangun di antara mereka merupakan modal yang sangat besar dibanding apapun, karena PKL cenderung mengerti apa yang mereka butuhkan, mereka rasakan, mereka inginkan dibandingkan dengan pihak-pihak di luar komunitas mereka seperti pemerintah dan swasta. Sebagai wujud *commit to user* tenggang rasa, saling pengertian dan solidaritas untuk memperkuat hubungan silaturahmi di antara PKL maka jika ada anggota yang sakit atau

meninggal dunia serta lainnya mereka saling support dan membantu, mereka juga mengeluarkan kas untuk meringankan beban rekannya baik yang sedang ditimpa musibah maupun yang sedang mempunyai acara seperti adanya anggota yang memiliki anggota keluarga baru. Bendahara P3BS (Mbak Inul) menjabarkan pengeluaran-pengeluaran kas P3BS untuk memperkuat hubungan silaturahmi di antara mereka, berikut kutipan wawancara dengan Bendahara P3BS (Mbak Inul) pada tanggal 18 September 2011 mengenai pengeluaran kas selain untuk dana kebersihan:

“o.. ya itu kita ambil kas 150 ribu”.

“ya sakit, meninggal 150 ribu”.

“kadang kalau ada yang melahirkan kita kasih lebih”.

Selain untuk dana kesehatan, lelayu maupun kebersihan dana atau kas juga dikeluarkan untuk pembuatan atribut PKL seperti kaos dan juga untuk parcel lebaran. Hal ini seperti yang diutarakan Mbak Inul (Bendahara P3BS) pada saat interview tanggal 18 September 2011 berikut ini:

“ya diambil dari kas. Pokoknya kan ini kaos kemarin kan sudah. Tinggal harian-harian, kalau gak ada event-event sisanya masuk bank”.

“ya waktu rapat terakhir itu kan aku kasih tahu kayak gini-gini, terus kan enggak ada kecocokan. Akhirnya kan dilemparkan ke aku. Pas aku ada misi itu. Terus uang ya aku gunakan to. Aku pakai. Aku ambil uang peninggalan yang dulu, ya aku pake. 4,5 juta itu buat parcel, 1,5 juta juga buat parcel. 1,5 juta itu buat yang pengacara atau yang Pembina P3BS, tapi yang 4,5 juta buat temen-temen. Mulai saat itu aku yang pegang uang sampai sekarang selama 2 bulan aku pegang tapi mulai tanggal 13-14 udah aku serahkan ke teman saya”.

Kaos merupakan atribut PKL yang digunakan untuk proses berjualan dan secara resmi digunakan untuk even-even yang ada baik di dalam maupun di luar lingkungan tempat mereka berjualan, mereka mengusung nama Paguyuban mereka. Jadi, kaos dipakai untuk identitas bersama sebagai wujud persatuan di antara PKL. Sedangkan Parsel lebaran dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas jerih payah mereka dalam berjualan sehingga perasaan senasib seperjuangan diantara mereka menjadi kuat. Semua dana untuk kaos dan parsel ini diambil dari kas karena kas merupakan wujud kesukarelaan PKL untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka yang digunakan untuk keberlangsungan Paguyuban tempat mereka bernaung.

2) *Norm of Trust*

Bonding dapat menyelesaikan konflik internal di dalam komunitas PKL itu sendiri. Melalui *cognitive social capital* mereka dapat tetap rukun meski ada konflik di dalam komunitas mereka. Kekuatan utama yang dibangun di dalam suatu komunitas terletak pada *norm of trust* di antara anggota kelompok komunitas itu sendiri. Rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi membuat ikatan yang dibangun semakin kokoh. Ikatan ini lebih kuat dibandingkan dengan ikatan, interaksi maupun bentuk jaringan yang lain. Hal ini dikarenakan dengan moralitas seperti (solidaritas, rasa kebersamaan, sikap saling percaya atau kognitif *social capital*) yang kuat maka dapat dipastikan di lingkungan organisasi yang dibangun akan tumbuh sikap saling pengertian, tenggang rasa, persaudaraan yang erat.

Adapun anggota yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati biasanya mereka mendapatkan sanksi dengan dikucilkan pihak dari lingkungan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa *trust* dalam tataran internal Paguyuban PKL (*bonding*) yang ada di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dapat digunakan sebagai resolusi konflik.

Dalam pengelolaan keuangan bendahara PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang selama 4 (empat tahun) terakhir sudah berganti sebanyak 4 (empat) kali juga. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab dari pelaksana keuangan sehingga banyak ditemukan ketidakjelasan informasi dalam hal pelaporan keuangan, terdapat selisih antara pemasukan dengan jumlah uang yang ditarik perharinya. Dari penemuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam tataran prakteknya *trust* yang ada diantara individu-individu di dalam Paguyuban PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang masih lemah dan rentan menimbulkan konflik. Jika dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin network atau Paguyuban yang dibangun tidak akan berumur panjang. Hal ini tidak lain karena adanya rasa saling curiga diantara anggota Paguyuban. Berikut petikan interview yang dilakukan Penulis terhadap Bendahara P3BS (Mbak Inul) pada tanggal 18 September 2011:

“Bendahara sudah berganti 4 kali. Waktu dulu itu sebelum P3BS dulu. Waktu Paguyuban itu kan yang memegang Mbak Kolifah dan Mas Furqon, terus bisa naik, terus itu kan terus rebut. Terus ganti dengan Paguyuban yang lain. Terus diganti sama yang pegang diganti sama Mbak Kenuk.

“iya pengurusnya ganti. Iya kan dari paguyuban ke P3BS kan ya ganti. Itu yang megang Mbak Kenuk sama sapa aku lupa. Terus yang terakhir Mbak Tun tok. Terus yang terakhir mulai 2009 sampai 2010, ya 2010 lebih lah wong aku baru megang 2 bulan ini”.

Dari uraian di atas terlihat ada ketidakberesan dalam hal keuangan. Peneliti juga diizinkan hanya sekedar untuk melihat laporan keuangan yang ada. Terdapat banyak selisih per hari sekitar 20 ribu rupiah. Jika dihitung 1 bulan maka Paguyuban menderita kerugian sekitar 600 ribu rupiah. Namun karena kuatnya persatuan dan solidaritas yang tinggi di antara PKL maka masalah ini diselesaikan secara musyawarah tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Solidaritas yang tinggi diantara individu ini akan memiliki dampak negative bagi keberlangsungan *network* yang dibangun karena jika hanya mengganti dengan Bendahara baru maka konflik yang ada hanya diredam sementara dan hal ini hanya efektif untuk jangka pendek. Anggota yang lain akan tetap merasa khawatir dan curiga serta takut jika uang yang mereka kumpulkan secara sukarela untuk dana operasional paguyuban justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi sang Bendahara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya rasa curiga dengan kepengurusan keuangan yang lalu meski pengurus keuangan telah diganti dengan yang baru. Selain menimbulkan rasa saling curiga, hal ini juga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Bendahara yang lama dengan Bendahara yang baru. Berikut kutipan hasil interview dengan Mbak Inul selaku Bendahara P3BS pada tanggal 18 September 2011:

commit to user

“ya kadang ya ada, ya kita juga kan gak tahu ya mbak”.

“ya ndak tahu lah. Jadi kayak gini lho mbak, buku dititipke aku. Kan aku gerobak ka nada, dia kan yang bendahara gak ada. Hanya penitipan tapi aku ndak tau, ndak buka. Tapi aku ya ini, ya udah. Aku kan gak mau nuduh orang sembarangan to? Suudzon kan malah dosa aku. Nah dititipi kan aku ndak kroscek. Terus mulai aku, aku mulai pegang baru, ya aku tuh ndak pengen cari wah, tapi aku tuh pengen dibantu tok”.

Oleh karena tidak adanya peraturan yang mengikat baik pertanggungjawaban maupun sanksi secara hukum formal maka konflik seperti di atas yang terjadi di lingkungan PKL sendiri hanya diselesaikan melalui musyawarah. Biasanya dengan mengganti pengurus yang dianggap melakukan penyimpangan dengan pengurus yang baru. Hal ini kurang efektif karena kejadian yang sama dimungkinkan akan berulang secara terus menerus. Nilai-nilai sosial dan moral yang tinggi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Biasanya dikenakan sanksi berupa dikucilkannya mereka yang menyalahi kode etik paguyuban dari lingkungannya hal ini untuk memberi efek jera karena bentuk *punishment* yang ada dan berlaku pada komunitas informal bukan berdasar atas aturan hukum yang tegas seperti ikatan pada institusi formal. Berikut kutipan hasil interview dengan Bendahara P3BS (tanggal 18 September 2011) mengenai pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah yang ada (internal paguyuban) khususnya masalah keuangan:

“ya kita putuskan bersama. Ya ndak ketua. Kalau ketua kan ndak bagiannya mbak. Ya kita kan rapat bersama nanti kita laporkan ke ketua. Ini ganti ini ini ini”.

3) *Mutual Benefit*

Di dalam P3BS terbentuk aturan-aturan informal atau norma-norma yang disepakati bersama, biasanya mereka sebut dengan “kode etik paguyuban” yang disepakati bersama-sama. Untuk kepentingan bersama, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang melakukan kerjasama dalam menggali potensi yang ada melalui penghimpunan dana dan kegiatan secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dana operasional Paguyuban. PKL mengumpulkan uang untuk P3BS berupa kas. Oleh karena PKL selalu diidentikkan dengan kekumuhan maka PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang berusaha untuk lepas dari label itu dengan cara menjaga kebersihan dengan menggali dana dari para diutarakan oleh Wahyudi selaku ketua P3BS pada saat wawancara tanggal 25 Maret 2011 sebagai berikut :

“Ya, fungsinya untuk kebersihan. Kan ndak mungkin kita para Pedagang membersihkan sendiri. Jadi, kita tanam orang yang khusus untuk kebersihan itu tadi kita biayai truk-truk sampah dari Pemerintah yang ngambil di situ kita pun tiap bulan ngasih itu, tiap bulan kita kasih”.

Penulis menelusuri bagaimana teknis penggalan potensi PKL untuk membiayai biaya operasional paguyuban seperti dana kebersihan yang tentu saja dibiayai dari dana kolektif anggota. Adapun penggalan potensi itu berupa pengumpulan kas yang dilakukan Bendahara P3BS. Penulis menggali lebih dalam informasi ini kepada Bendahara P3BS mengenai teknis pengumpulan kas maupun besaran uang kas serta penggunaan kas

tersebut , berikut kutipan hasil *interview* dengan Bendahara P3BS (Mbak Inul) pada tanggal 18 September 2011:

“e...ya kadang ada yang.. penarikan biasa maksudnya yang positif itu 2 ribu, tapi kadang ada yang 1 ribu. Kalau sepi ya kadang kosong. Nggak bayar”.

“ya... tapi maksudnya 2 ribu ya pasti, harus ada yang bayar. Kalau nggak ada yang bayar kan buat bayar sampah, tukang sapu itu kan buat bayar kegiatan itu”.

“beda. Kan yang 80 ribu itu sekalian pasang tali, terus bersih. Kalau ada apa-apa. kan yang 80 ribu itu ndak tau yak an awal dulu udah dikasih segitu, kita cuman tinggal meneruskan. Kalau Ma'e yang nyapu itu kan kalau pagi kan nyapu, seminggu itu kan 25 ribu, tapi kalau sampah truk itu 1 bulan sekali”.

“kalau sampah truk 100 ribu/bulan”.

Penulis menemukan bahwa kas P3BS kaitannya dengan dana untuk kebersihan biasanya dikeluarkan untuk membiayai tukang sapu 2 orang dengan besaran yang berbeda satu sama lainnya. Untuk tukang sapu saja diberi uang jasa 25 ribu rupiah per minggu, tukang sapu sekaligus pasang tali-tali diberi uang jasa 80 ribu per minggu, sedangkan untuk truk pengangkut sampai diberi uang jasa 100 tiap bulan sekali.

Kerjasama dalam menggali potensi yang ada di dalam PKL P3BS masih lemah dan dikhawatirkan rentan akan menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan dalam penarikan kas tidak ada tindakan tegas dengan mewajibkan semua anggota untuk memberikan dana kas yang besarnya sama. Hal ini diperparah dengan dibiarkannya anggota yang tidak *commit to user* memberikan dana kas. Bahkan, dari catatan buku kas yang penulis hanya

diperbolehkan untuk melihat saja, ada PKL yang sama sekali tidak membayar kas secara berturut-turut. Berikut kutipan interview dengan Bendahara P3BS (Mbak Inul) pada tanggal 18 September 2011, pukul 08.30 wib :

“E.. kadang ada yang... penarikan biasa maksudnya yang positif itu 2 ribu, tapi kadang ada yang seribu, kalau sepi kadang kosong, nggak bayar”.

Dari hasil interview di atas menunjukkan adanya inkonsistensi besarnya dana kas yang harus dikumpulkan kepada Bendahara. Dana kas yang dikumpulkan tergantung dari sepi atau tidaknya Pengunjung yang datang ke Pasar Burung di Jalan Kartini Kota Semarang. Jika Pasar ramai maka anggota paguyuban akan membayar kas sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama yaitu 2 ribu rupiah. Namun, jika pasar sepi maka tidak ada paksaan bagi anggota paguyuban untuk membayar kas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penarikan kas di dalam P3BS cenderung kondisional.

b. *Bridging Social Capital* (PKL dengan Masyarakat Sekitar)

Bridging Social Capital merupakan interaksi antara PKL dan kelompok non-PKL tetapi bukan Pemerintah. Interaksi ini biasanya dilakukan dalam upaya memenuhi segala kebutuhannya yang belum diperoleh dari pemerintah maupun tidak dapat mengupayakannya sendiri. Melalui *bridging social capital*, kelompok masyarakat lemah yang sama kondisinya bisa menjalin *networks* dengan kelompok atau *social networks* lainnya. Dalam

konteks *community governance*, *bridging social capital* bahkan berperan penting untuk memperkuat dan memperbaiki kerjasama di antara kelompok-kelompok sejenis, yang bisa dijalin mulai dari tingkat lokal, regional maupun nasional bahkan internasional karena networks seperti ini bisa menjadi kekuatan penekan bagi dominasi negara yang pro status quo untuk melakukan perubahan-perubahan.

1) *Social network*

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menjalin kerjasama dengan persatuan PKL se-kota Semarang, masyarakat sekitar tempat mereka berjualan, dan juga menjalin kerjasama dengan pengelola parkir. Semua dilakukan untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak atau komunitas di luar lingkungan mereka (P3BS). Hal ini dilakukan dengan harapan interaksi-interaksi yang dilakukan dapat memperkuat hubungan dengan kelompok komunitas lain. Dengan membuka diri dan bekerjasama dengan pihak di luar organisasi maka PKL dapat memperoleh akses informasi yang luas untuk optimalisasi paguyuban. PKL yang selalu dihadapkan dengan permasalahan modal yang sedikit. Dengan menjalin kerjasama atau berinteraksi dengan pihak di diluar komunitas mereka dimungkinkan akan mempermudah mereka untuk mendapatkan bantuan permodalan seperti akses kredit.

Namun, dalam tataran prakteknya interaksi-interaksi sosial yang dilakukan oleh PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang memiliki kelemahan karena tidak mampu merangkul Kelompok Pedagang sejenis

yang merupakan Pedagang (Pasar Burung Resmi) Pemerintah Kota Semarang. Hal ini terjadi karena adanya perebutan sumberdaya di lingkungan mereka. Kedua belah pihak saling mengabaikan dan Pemerintah tidak menjembatani komunikasi antar PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dengan Paguyuban Pedagang burung yang ada di sekitar mereka. Padahal, keberhasilan program Pemerintah untuk menjadikan kawasan Jalan Kartini sebagai “city walk” sangat tergantung dengan bersatunya PKL P3BS di Jalan Kartini dan Pihak tersebut. Seperti yang telah dibahas dimuka bahwa PKL Kartini menolak relokasi salah satunya karena sangat bergantung dengan kelompok Pedagang sejenis yang sama-sama melakukan aktivitas perdagangan di Jalan Kartini dan sekitarnya. Jika kelompok Pedagang resmi yang diakui Pemerintah juga direlokasi, maka dapat dipastikan PKL P3BS di Jalan Kartini bersedia untuk direlokasi. Konflik antar *bonding* (PKL P3BS di Jalan Kartini dan Pedagang resmi) tersebut dapat dilihat dari hasil interview dengan Bendahara P3BS (Mbak Inul) pada tanggal 18 September 2011 berikut ini:

O.. Ndak. Ndak, itu lain. Itu yang dalam urusan yang dalam sendiri. Urusan yang diluar, ya di luar. Sini ada dua blok lho Mbak. He’e. ini yang P3BS disini, tapi dari tebu ke lampu merah itu sendiri, sudah lain Paguyuban. Jadi cuma disini yang ada Paguyubannya.

Ya, lihat dulu. Tapi kalau pasar dalam pindah, kita ngikut pindah. Kalau pasar dalam enggak pindah ya kita tidak mau pindah.

Ndak. Memang disini orang luar, bukan orang dalam. Sini kan dulu yang jualan 1 orang, terus tambah terus. Yang dalam itu sendiri.

Lha kan sebelum ada sini, sudah ada Karimata to? Karimata kan dulu kan pertama kan yang ada pasar burungnya. Sini kan hanya penjual tok.

Mau. Tapi kalau yang di luar tok, yang di dalam ndak, ndak.

Di lain pihak Pedagang burung resmi Pemerintah Kota Semarang merasa dirugikan dengan proses jual beli yang dilakukan PKL P3BS di median Jalan Kartini karena mengakibatkan pasar dalam (Kelompok Pedagang resmi) sepi pengunjung. Pedagang resmi tersebut justru mendukung relokasi PKL P3BS di Jalan Kartini ke daerah lain namun mereka (Pedagang resmi Pemerintah) menolak untuk direlokasi bersama-sama dengan PKL P3BS di Jalan Kartini. Hal ini menyebabkan relokasi terhadap PKL P3BS di Jalan Kartini selalu gagal karena baik PKL P3BS maupun Pedagang resmi Pemerintah sama-sama menolak direlokasi padahal PKL P3BS di Jalan Kartini bersedia direlokasi dengan catatan Pedagang resmi Pemerintah juga direlokasi. Berikut kutipan penolakan Pedagang resmi Pemerintah Kota Semarang untuk direlokasi ke daerah lain sebagaimana dilansir Suara Merdeka pada tanggal 12 Juni 2007 sebagai berikut:

“Pedagang burung di Karimata menolak rencana pemindahan ke Gunungpati, karena akan mematikan usaha mereka dilokasi yang baru. Lokasi yang baru dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Selain itu PKL juga mempertanyakan apa motif dibalik rencana Pemerintah merelokasi Pasar burung Karimata karena Pasar tidak menyebabkan kemacetan maupun semrawut (Suara Merdeka, 2007, 12 Juni)”. Adapun informasi selengkapnya dapat dibaca pada harian Suara Merdeka yang terlampir pada halaman 168.

Pedagang resmi yang ada di sekitar Jalan Kartini mengatakan bahwa mereka mendukung relokasi PKL Kartini ke daerah lain. Hal ini dikarenakan PKL Kartini sebagai sumber kemacetan lalu lintas di Jalan kartini dan juga sekaligus mematikan mata pencaharian mereka. Keberadaan PKL Kartini yang berjualan di median Jalan Kartini mengakibatkan Pembeli enggan masuk ke Pasar dalam (Pasar burung resmi Pemkot Semarang) sehingga daya jual Pedagang resmi menjadi rendah. Menanggapi hal ini Wahyudi (Ketua P3BS) dalam sesi wawancara pada tanggal 25 Maret 2011, pukul 23.00 wib mengatakan bahwa :

“Mengatasinya ya kita bareng-bareng. Jadi baik tukang parkir maupun kami para Pedagang P3BS berupaya semaksimal mungkin. Jadi, kerjasama yang baik, kalau toh seperti kemarin di media ada seperti itu kan kecemburuan sesama Pedagang. Kebetulan Pedagang di situ kan seperti kami kan PKL, bias disebut PKL; dan di situ kan juga ada Pedagang. Para Penjual baik burung maupun makanan tapi tidak seperti kami, diluar. Ada tempat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah. Karena menurut mereka itu kan karena adanya kami, para PKL ini kan yang kita gelar di jalan raya dilihatnya itu kan paling ramai sehingga keramaian itu kan para Pedagang yang ada di Pasar induk merasa sepi. Jadi, kecemburuan timbul juga, waktu kemarin ada liputan wartawan ya... bilang seenaknya gitu. Dia tidak memikirkan kepentingan bersama, memikirkan perutnya sendiri berarti. Jadi, seakan-akan Dia menginginkan Kami itu, hilang, lenyap dari sekeliling Pasar induk itu; disekelilingnya itu”.

Konflik antara PKL P3BS di Jalan Kartini dan Pedagang resmi ini dikarenakan perebutan sumberdaya. Kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan dan menolak untuk direlokasi ke tempat lain. PKL P3BS di Jalan Kartini menolak direlokasi ke tempat lain jika Pedagang Karimata tidak direlokasi bersama mereka. Di sisi lain, Pedagang resmi menolak relokasi

dan mendukung Pemerintah untuk merelokasi PKL P3BS di Jalan Kartini. Jadi, keinginan PKL P3BS di Jalan Kartini dan Pedagang Karimata sulit untuk disatukan. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah diharapkan dapat mencari titik tengah dan merumuskan kebijakan yang dapat diterima serta menguntungkan semua *stakeholder* yang terkait.

2) *Norm of Trust*

Salah satu wujud interaksi atau kerjasama dalam tataran *bridging* adalah kerjasama PKL Kartini dengan Pengelola Parkir atau tukang parkir yang ada di Jalan Kartini karena selain identik dengan kumuh, PKL juga identik dengan penyebab kemacetan lalu lintas (*traffic jam*), menghadapi hal ini PKL berusaha menjaga agar jalan tempat mereka berjualan yaitu Jalan Kartini tetap lancar arus lalu lintasnya. PKL menanam orang (begitu istilah mereka) sebagai juru parkir untuk mengurai dan mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan para pembeli di Pasar tersebut. PKL bekerjasama dengan tukang parkir dengan kerjasama yang saling menguntungkan; pembeli banyak maka secara otomatis tukang parkir akan mendapatkan penghasilan yang banyak juga; dilain pihak, parkir rapi maka lalu lintas lancar dan pembeli merasa aman dan nyaman untuk melihat-lihat atau bertransaksi jual-beli karena kendaraannya ada yang menjaga dan mengawasi. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Wahyudi selaku ketua P3BS pada interview tanggal 25 Maret 2011, pukul 23.00 wib berikut ini:

commit to user

“o.. ndak. Kita perparkiran itu MOU atau kerjasamanya ya saling menguntungkan. Perparkiran rapi nanti kan otomatis para yang punya kendaraan atau pun mobil parkir di tempatnya dan juga nyaman dan hasil perparkirannya tambah banyak dan ditambah lagi secara tidak langsung para tukang parkir membantu kita, arus lalu lintas lancar dan tidak membikin macet tentunya begitu”.

Trust merupakan unsur utama kerjasama antara PKL Kartini dengan Pengelola dan Juru Parkir karena hanya dengan *trust* yang kuat ini kerjasama yang dibangun dapat berjalan dan saling menguntungkan. PKL P3BS di Jalan Kartini mempercayakan masalah kelancaran lalu lintas kepada Juru Parkir dan demikian halnya dengan Pembeli; mereka mempercayakan kendaraan mereka kepada Parkir. Pengelola dan Juru Parkir diuntungkan karena selain mereka tidak dimintai dana bagi hasil dari hasil parkir tetapi juga meraup keuntungan dari keberadaan PKL P3BS di Jalan Kartini. Keberadaan PKL memberi mereka (Pengelola dan Juru Parkir) penghasilan.

3) *Mutual Benefit*

Keberadaan PKL P3BS di Jalan Kartini sangat menguntungkan pengusaha non formal di sekitar mereka Masyarakat sekitar merasa terbantu dengan adanya aktivitas berjualan di jalan Kartini karena keberadaan PKL membuat usaha yang mereka jalankan menjadi berkembang. Label “pasar Kartini” menjadi “*trade market*’ bagi usaha-usaha yang mereka dirikan seperti yang diutarakan Wahyudi pada saat interview tanggal 4 Maret 2011 berikut ini:

“Ya akhirnya kan itu dan bahkan dari PT, CV yang ada disitu kan akhirnya malah pada laris-laris itu karena banyaknya pengunjung di Kartini ini. Lihat sana sini akhirnya tahu, oh disini ada ini, Pabrik LPG besar, tour travel, akhirnya kan pada ramai sekali itu. Malah pada senang.

Interaksi bridging merupakan suatu jalan keluar atau solusi di saat Pemerintah menelurkan kebijakan yang merugikan PKL seperti kebijakan Pemerintah yang menerapkan suatu aturan agar PKL tidak berjualan lagi di lahan larangan untuk berjualan. *Bridging* merupakan suatu jalan keluar pemecahan masalah tanpa harus melanggar aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Interaksi antar *bonding* ini sangat efektif dalam resolusi konflik karena bisa menjadi suatu kekuatan yang *powerful* dimana didalamnya terdapat individu atau komunitas yang sama-sama *powerless* bergabung menjadi satu membangun suatu kekuatan untuk bertahan dan memperjuangkan nasib mereka. Mereka bersatu atas dasar rasa senasib sepenanggungan sehingga ikatan di antara mereka sangat kuat. Lebih lanjut Wahyudi mengatakan bahwa ia juga melakukan kerja sama antar PKL untuk memperkuat pondasi organisasi mereka dalam menuntut pengakuan dan dalam upaya mencapai keinginan mereka untuk segera ditandanisasi. Berikut pernyataan Wahyudi selaku ketua P3BS pada saat interview tanggal 4 Maret 2011:

“Ya kalau kami dengan pedagang lainnya ya hubungan baik aja. Jadi, tidak cuma Pedagang, Masyarakat keseluruhan itu sudah mencakup PKL dan Pedagang. Jadi, kami itu menjalin hubungan dengan keseluruhan, tidak tebang pilih. Semuanya dari Pemkot ada bahkan ada teman Satpol PP bahkan Kasaob Satpol PP dulu itu yang pernah menggusur Kami gitu tetap kami hubungan baik. Enggak ada yang kami tebang pilih.

Jadi, semuanya dimana mereka atau Beliau mau dekat hubungan dengan kami, kami sangat senang hati apalagi kami ikut diperjuangkan nasib kami yaitu tetap dapat berjualan disitu”.

PKL P3BS di Jalan Kartini membangun kerjasama dengan semua pihak tanpa tebang pilih. PKL P3BS di Jalan Kartini menjalin kerjasama dari mulai sesama Pedagang, Masyarakat, Pemkot, Satpol PP dan bahkan Kasaob satpol PP. kerjasama yang dilakukan dengan tujuan agar PKL dapat diterima dan didukung agar tetap dapat berjualan di Jalan Kartini, Semarang.

P3BS juga menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat serta menjadi donatur tetap pada saat Kelurahan di tempat mereka berjualan mengadakan event-event seperti HUT RI maka mereka pasti memberikan sumbangan tergantung dari apa yang diminta oleh pihak kelurahan. Berikut pernyataan Mbak Inul (Bendahara P3BS) pada saat interview tanggal 18 September 2011:

“ya donatur ya.. ya.. kalau ndak uang ya sepeda. Kelurahan kalau ada event-event ya seperti 17 an nanti umpamanya, pas ada halal bihalal kayak kemarin kita juga keluar uang gitu”.



Gambar 4.1 Foto P3BS membangun kebersamaan dan kerjasama dengan masyarakat sekitar pada saat perayaan HUT RI

Dengan terlibat secara aktif dan langsung dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan atau masyarakat di sekitarnya secara tidak langsung PKL P3BS di Jalan Kartini telah berhasil merangkul masyarakat sekitar untuk mendukung dan mengakui kontribusi mereka terhadap lingkungan mereka dan eksistensi mereka. Penerimaan masyarakat di sekitar tempat berjualan para PKL P3BS di Jalan Kartini memiliki dampak yang positif bagi keberlangsungan kegiatan jual-beli di Jalan Kartini karena dengan kekuatan *bridging* ini PKL mendapat dukungan dan support dari masyarakat di sekitarnya dan dapat diterima di lingkungannya sehingga apabila diperlukan pada saat PKL menemui masalah maka masyarakat di sekitarnya pun akan membantu mereka dan menolak relokasi terhadap mereka.

c. *Linking Social Capital*

Linking Social Capital merupakan suatu interaksi antara PKL dengan Pemerintah baik yang langsung bersinggungan maupun wujud interaksi yang disebabkan adanya hubungan dengan pihak lain sehingga PKL akan berinteraksi dengan pihak Pemerintah. Interaksi yang dilakukan dikarenakan adanya suatu aturan yang ditetapkan Pemerintah maupun karena adanya suatu konflik yang dihadapi PKL yang membutuhkan campur tangan Pemerintah dalam upaya menemukan jalan temu pemecahan masalah. Dengan kata lain, PKL menggunakan lahan publik untuk melakukan aktivitas berjualan sehingga PKL akan selalu berinteraksi dengan Pemerintah, mematuhi aturan yang ada serta dapat berlindung terhadap Pemerintah.

Interaksi-interaksi yang dilakukan dalam tataran linking memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak Pemerintah maka resolusi konflik dalam tataran atau tingkatan yang lebih rendah dapat di atasi. Pemerintah sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat krusial dalam masyarakat karena tanpa adanya campur tangan Pemerintah, konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat akan menjadi besar dan tak terkendali sehingga Pemerintah bertindak sebagai penengah dari konflik-konflik yang ada di masyarakat.

1) *Social Network*

Interaksi-interaksi yang dilakukan oleh PKL Kartini untuk mengatasi masalah relokasi adalah dengan cara membangun kerjasama

dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perumusan kebijakan publik di Pemerintahan kota Semarang. Hal ini dikarenakan PKL merupakan objek dari setiap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah. Menjalin kerjasama atau memiliki *link* dengan pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan ini sangat menguntungkan bagi PKL Kartini khususnya karena PKL mendapatkan diskresi dari Pemerintah. Konsistensi aturan dan diskresi merupakan suatu hal yang berkebalikan tetapi di suatu waktu keduanya harus diterapkan di dalam menata PKL. Dari beberapa wawancara di atas Pemerintah konsisten terhadap aturan hanya di awal-awal dikeluarkannya suatu aturan serta di momen-momen tertentu yang merupakan program pemerintah seperti Adipura, Pemerintah akan lebih fokus untuk menegakkan aturan maupun menata PKL agar pemerintah mendapatkan Piala Adipura seperti yang diutarakan Wahyudi bahwa pada saat penilaian Adipura PKL P3BS di Jalan Kartini harus libur dan tidak diperbolehkan berjualan di Jalan Kartini serta jika Presiden diperkirakan akan melewati Jalan itu maka PKL juga harus libur berjualan. Hal ini sebenarnya merugikan mereka dalam hal finansial namun mereka tetap patuh. Pernyataan tersebut dinyatakan Wahyudi pada saat interview tanggal 25 Maret 2011 seperti kutipan berikut ini :

“Sangat mendukung, kita ndak usah ada adipura juga selalu menjaga kebersihan. Ya kita kan intinya Pedagang kan serba disibukkan dengan barang dagangannya tapi kita kan upayakan semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban, kebersihan, ya penataan barang atau pun yang lainnya ya kita tetap berupaya semaksimal mungkin”.

PKL P3BS di Jalan Kartini mendukung semua program Pemerintah. Mereka juga mematuhi aturan pelarangan berjualan pada saat penilaian adipura. PKL berharap dengan mendukung semua agenda Pemerintah maka keberadaan mereka di Jalan Kartini tidak terusik. Sinergisasi dengan program-program Pemerintah Kota Semarang sangat diutamakan oleh PKL P3BS di Jalan Kartini sehingga tidak ada bentrokan. Hal ini dikarenakan PKL menyadari posisi mereka yang lemah. Selain itu, aktif dan berpartisipasi dalam setiap even yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan cara untuk meningkatkan citra positif PKL dimata masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang bahwa tidak selamanya PKL itu negatif.

2) *Norms of Trust*

Trust merupakan elemen perekat yang menyatukan orang atau komunitas dalam suatu hubungan kerjasama. Hal ini juga terlihat dari kerjasama yang dibangun antara PKL Kartini dengan LBH GRASI pusat maupun daerah, GERINDRA serta anggota Dewan. PKL Kartini sangat percaya bahwa kerjasama yang dibangun dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan. Pada akhirnya, keinginan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang untuk mendapatkan dukungan dan diperjuangkan nasibnya dari kerjasama yang dibangun dapat tercapai. seperti yang dikutip dari wawancara dengan Wahyudi pada tanggal 4 Maret 2011 sebagai berikut:

“o... Dewan penasehat di P3BS dipilih berdasarkan bukti nyata. Jadi, disitu ada Pak Bambang Tri Bawono, ada Bang Aris dan bahkan dari DPP GRASI itu dari Jakarta Pusat itu ada Bang Gelora Tarigan itu. Kebetulan Pak Bambang Tri

Bawono ini juga ketua DPD GRASI di Jawa Tengah ini. Kami malah sempat hubungan baik dari DPP GRASI maupun DPD GRASI yang diketuai oleh Pak Bambang Tri Bawono sehingga hubungan kami itu berjalan baik sekali. Jadi, dia itu sangat senang memperjuangkan kami tanpa imbalan seperti yang prosedur sudah biasa ada, biasanya kan kita minta bantuan LBH atau yang lainnya kan pasti ada uang pasti jalan, ndak ada uang ndak jalan, gitu. Tapi atas dasar ini tadi, rasa manusiawi; rasa hubungan erat sekali persaudaraan ini kami bisa menjalin hubungan dan kami bisa diperjuangkan semaksimal mungkin oleh Beliau semua”.



Gambar 4.2 Foto Ketua P3BS dengan Ketua DPP GRASI Pusat pada saat pengurus P3BS bersilaturahmi ke kantor DPP GRASI, Jakarta

Dari gambar di atas terlihat dengan jelas kedekatan PKL Kartini melalui Pengurusnya dengan Ketua DPP GRASI Pusat, Jakarta. Pada akhirnya dibentuk juga LBH GRASI di Semarang. Dengan menjalin *network* atau kerjasama ini PKL berharap dapat mempermudah urusan mereka terutama yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga dapat berkonsultasi mengenai masalah hukum. PKL P3BS di Jalan Kartini melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya

LBH GRASI baik Pusat maupun Daerah, Anggota Dewan, dan lain-lainnya dengan tujuan agar mereka tidak diintimidasi oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau tidak senang dengan keberadaan mereka di Jalan Kartini, Semarang. Hal tersebut seperti yang diutarakan Wahyudi dalam interview tanggal 4 Maret 2011 berikut ini:

“Yang ingin dicapai ya itu hubungan kekeluargaan yang baik. Jadi kalau melalui hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, ya harapan kami ya semuanya akan bisa baik-baik saja. Semisal kami tetap berjualan disitu kog enak ya, syukur-syukur sampai kapanpun ya diberi disitu, kalau ndak dapat disitu ya bareng-bareng mungkin tetap dipikirkan yang baik, tidak diarogani lagi”.

Keinginan Wahyudi (selaku Ketua P3BS) di atas bukan tanpa alasan. Wahyudi mengatakan hal demikian dikarenakan sebelum mempunyai *link* dengan orang-orang atau Lembaga-Lembaga yang memiliki *power*, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang pernah diintimidasi dan ditarik uang keamanan oleh preman-preman pasar maupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan “uang keamanan”. Hal inilah yang melatarbelakangi berdirinya P3BS, seperti yang telah dibahas pada awal bab pembahasan ini.

Keberadaan PKL P3BS di Jalan Kartini juga dihadapkan pada persoalan penertiban. Sebagian PKL ketika keberadaannya terancam dengan adanya penertiban mereka yang mempunyai *link* atau dapat bekerjasama dengan pihak lain dapat tetap eksis bertahan berjualan meskipun itu daerah larangan berjualan seperti di Jl. Kartini Semarang.

Hal yang dilakukan salah satunya dengan membangun kerjasama melalui *network* yang berupa *link* dengan penguasa. Dalam hal ini Wahyudi selaku ketua PKL Kartini melalui arahan Dewan Penasehatnya membangun suatu *network* berupa *link* dengan Walikota agar eksistensi dari PKL dapat diberi keleluasaan dalam hal berjualan tanpa melanggar peraturan yang ada serta dapat berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintahan kota Semarang sebagaimana diutarakan Dewan Penasehat P3BS Bambang Tri Bawono, SH pada saat interview tanggal 13 April 2011 berikut:

“E... kalau kita banyak sih sebetulnya yang di link-kan, ya cuma yang memang sangat terkait dengan masalah ini kan Walikota ya. Kalau dulu pernah diaudiensi dengan anggota dewan juga pernah dan tampaknya juga menghasilkan sesuatu yang positif”.

Pihak yang memiliki hubungan atau berpengaruh dalam perumusan dan pembuatan kebijakan adalah pihak yang memegang otoritas tertinggi di suatu wilayah. Di kota Semarang, orang yang paling berpengaruh adalah Walikota Semarang yaitu Sumarmo. Oleh karena itu, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menjalin kerjasama dan melakukan interaksi yang utama adalah dengan Sumarmo. Diharapkan melalui link ini maka kebijakan-kebijakan yang digulirkan Pemerintah Kota Semarang adalah kebijakan yang pro terhadap nasib PKL yang salah satunya adalah PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang.

3) *Mutual Benefit*

PKL Kartini *commit to user* memiliki hubungan yang dekat dengan Walikota Semarang. Kedekatan ini membuat pemegang otoritas tertinggi di

pemerintahan kota Semarang memberikan diskresi atau kelonggaran berupa ijin berjualan di Jalan Kartini sampai waktu yang tidak ditentukan. Diskresi ini sangat menguntungkan bagi PKL karena di dalam ADRT P3BS mereka boleh berjualan sampai Jembatan penghubung ke Masjid Agung selesai dibangun namun pada kenyataannya mereka dapat berjualan di Kartini sampai sekarang. Penulis mengutip isi keputusan Wali kota pada masa itu (Sukawi Sutarip) dan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang yang ada di dalam ADRT P3BS sebagai berikut :

- a) Para pedagang selalu menyetujui program pembangunan dan penataan kota dari pemerintah.
- b) Diizinkannya berjualan lagi sampai dengan pembangunan jembatan tersebut di atas selesai.
- c) Sudah tersedianya tempat relokasi yang layak, ada daya jual dan lengkap dengan fasilitas pasar dari pemerintah.
- d) Mematuhi peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah tentang Kebersihan, Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima juga ketidakpermanenan bangunan.
- e) Tidak menimbulkan kesan negative apalagi meresahkan masyarakat sekitar.

Ikatan kerjasama PKL Kartini dengan Sukawi sangat erat bahkan pada saat peresmian Jembatan Kartini, PKL mendapat undangan dari Wali kota yang menjabat pada saat itu (Sukawi Sutarip). Dapat dilihat kedekatan hubungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dengan Sukawi Sutarip selaku Walikota Semarang dari foto berikut ini :



Gambar 4.3 Foto Wahyudi bersama Sukawi Sutarip pada saat menyampaikan permasalahan PKL terkait dengan kepastian relokasi di acara tasyakuran peresmian Jembatan Kartini.

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang merasa resah karena pihak Pemkot meresmikan Jembatan Kartini, ada seorang oknum Pemkot yang mengintimidasi PKL untuk segera pindah ke tempat lain pada Januari 2010. Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan tempat relokasi karena selama ini PKL selalu menanyakan masalah kejelasan tempat relokasi namun tidak pernah mendapat jawaban. Berikut kutipan pernyataan Wahyudi selaku ketua P3BS pada harian Kedaulatan Rakyat Jogja pada tanggal 10 Januari 2010 yang mengatakan bahwa :

“para pedagang merasa resah karena selain belum memperoleh kejelasan tempat relokasi, juga mendapat intimidasi dari salah seorang oknum Pemkot untuk segera pindah pada Januari 2010 dari tempat mereka berjualan saat ini (KRjogja.com)”. Berita selengkapnya dapat dibaca pada lampiran halaman 180.

Hal yang disayangkan dari intimidasi di atas adalah karena Walikota pada saat itu, pada saat peresmian Jembatan Kartini Beliau tidak memberikan jawaban konkret ketika dimintai informasi oleh PKL mengenai kejelasan tempat relokasi. Akibatnya sampai masa pemerintahan Sukawi berakhir dan digantikan dengan Walikota yang baru, PKL masih terkatung-katung mengenai kejelasan nasib mereka apakah direlokasi atau tidak.

Selain itu, sebelum berubah menjadi P3BS, P3BS selalu membayar iuran sebesar Rp. 3.000,- sebagai uang jaminan agar tetap dapat berjualan di jalan Kartini. PKL mengatakan uang tersebut sebagai uang keamanan. Wahyudi mengatakan adanya banyak pungli dari preman dan pungutan yang tidak bertanggung jawab, berikut kutipan hasil interview dengan Wahyudi selaku ketua P3BS pada tanggal 4 Maret 2011:

“Yang utama memang itu, terus yang lainnya memang ada seperti pungli atau banyaknya namanya kita jualan di tengah kota banyaknya pungli dari preman dan pungutan yang tidak bertanggung jawab itu ada. Tapi yang utama itu kan kita dari pihak Pemkot tidak lagi diperbolehkan berjualan di situ, itu yang utama dasar dibentuknya P3BS. Bahkan, sudah digusur, bukan akan digusur tapi sudah digusur, baru kami bentuk P3BS. Dengan berbagai macam upaya-upaya itulah kami dan minta bantuan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengalaman kami diarahkan untuk membentuk suatu paguyuban untuk kami tentunya yaitu kami beri nama P3BS”.

Selanjutnya Penulis juga menemukan adanya informasi mengenai pemungutan dana seperti yang disebutkan di atas pada harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2007 yang membantah penarikan uang dari PKL sebagai uang jaminan keamanan dan diperbolehkan tetap berjualan di

Jalan Kartini. Hal ini sangat merugikan PKL karena mereka hanya berusaha untuk bertahan berjualan dengan mematuhi dan membayar setiap pungutan-pungutan yang diwajibkan untuk dibayar tanpa tahu pungutan-pungutan itu untuk apa. Berikut hasil kutipan dari Suara Merdeka : “LSM Gemas membantah penarikan dana Rp. 3000,- per hari untuk uang keamanan seperti yang diutarakan Sabartini (PKL P3BS di Jalan Kartini) itu tidak benar. LSM mengatakan setiap anggota diwajibkan membayar uang tersebut untuk administrasi dan kepentingan pedagang (Suara Merdeka, 2007, 27 Mei)”. Berita selengkapnya dapat dibaca pada lampiran halaman 181.

Namun, setelah menjadi Paguyuban (P3BS) PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang banyak mendapatkan diskresi lain berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pemerintah berupa adanya tenggang rasa dari Walikota untuk tidak membayar retribusi seperti yang dinyatakan oleh Dewan Penasehat P3BS (Bambang Tri Bawono, SH) pada saat interview tanggal 13 April 2011 sebagai berikut :

“Ya memang setelah Kita bisa ketemu dengan Pak Walikota waktu itu memang karena belum ada alternative tempat dan sedang dicarikan alternative tempat untuk dagang bagi kawan-kawan yang tergabung dalam P3BS. Karena belum ada alternatif tempat, jadi untuk sementara diberi tenggang rasa oleh Bapak Walikota untuk bisa berdagang di situ”.

“Iya itu karena sebenarnya itu bukan daerah yang diperkenankan untuk berdagang maka tidak boleh ditarik retribusi”

Hal di atas dibenarkan oleh Kabid PKL Bapak Satrio Imam, M.Si yang mengatakan hal senada pada saat interview tanggal 13 April 2011 mengatakan bahwa :

“Tidak ada. Keberadaan PKL ini (PKL Jalan Kartini) tidak diakomodir dalam pesan SK Walikota tentang penetapan lahan lokasi PKL”.

Beliau menambahkan :

“Maksudnya hubungan politik? Jangankan yang ada di Jl. Kartini yang keberadaannya liar. Kalau keberadaan mereka tidak diakomodir dalam SK Walikota mungkin misalkan di Jl. Mataram itu ada PKL, keberadaan mereka juga liar dan tidak dipungut. Kalau kita pungut, mereka akan berasumsi bahwa keberadaan mereka diakui”.

“Iya keberadaan mereka itu tidak diakui gitu, jadi tidak ada hubungan politik. Mereka tidak ada dalam SK Walikota ya sudah sehingga sewaktu-waktu Pemerintah Kota merelokasi Mereka harus siap”.

Karena lemahnya kekuatan hukum yang ada pada PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membangun link dengan penguasa pemegang otoritas tertinggi di Pemerintahan Kota Semarang. Dengan *interpersonal partnership* yang dibangun melalui komunikasi persuasif Dewan Penasihat menjembatani komunikasi antara PKL dengan Walikota sehingga keputusan Walikota untuk melakukan tindakan relokasi dapat ditunda sampai lokasi yang disediakan benar-benar sesuai dengan harapan PKL dan dapat meningkatkan pendapatan PKL. Pak Bambang Tri Bawono, SH. pada saat interview tanggal 13 April 2011 mengatakan bahwa :

“Masukan-masukan itu ya kalau Pak Walikota mau melakukan relokasi ya tentunya mohon dicarikan tempat yang representatif, disiapkan sarana prasarana. Karena bagaimanapun PKL itu kan asset dari pendapatan daerah. Jadi, bisa ditata, jadi itu bisa menghasilkan baik bagi masyarakat itu sendiri maupun Pemerintah”.

Karena kedekatan itu maka walaupun secara teknis tidak namun secara persuasif keberadaan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. PKL dapat memberi masukan-masukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang terkait dengan masalah PKL melalui kedekatan hubungan yang ada.

PKL P3BS di Jalan Kartini menjalin hubungan dekat dengan Walikota Kota Semarang mulai dari Sukawi Sutarip hingga Wali kota sekarang yaitu Pak Marmo. PKL Kartini dekat dengan Pemerintah, utamanya Ketua P3BS karena dikenalkan oleh Dewan Penasehatnya kepada Walikota, berikut pernyataan Dewan Penasehat P3BS, Bambang Tri Bawono, SH. pada saat interview tanggal 13 April 2011 :

“jadi gini, Mas Wahyudi memang atau ya kawan-kawan itu setelah kita beri bimbingan organisasi, kita arahkan menjadi suatu organisasi, kita arahkan untuk mengelola organisasi, melakukan kemandirian dalam organisasi terus kita coba link-kan dengan pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Ya kebetulan waktu itu memang hubungan yang dibangun itu bagus. Baik dengan Walikota sebelumnya Pak Sukawi Sutarip dan sesudahnya Pak Marmo. Dan setelah Mereka berkomunikasi ya kita masih sering mengarahkan”.

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang pada saat mengalami tekanan dan akan direlokasi selalu dibantu oleh Pak Marmo yang pada saat Sukawi Sutarip menjabat sebagai Wali Kota, Pak Marmo menjabat sebagai

Sekretaris Daerah (Sekda). Pak Marmo selalu mengarahkan PKL agar tetap eksis dan dapat berjualan di Jalan Kartini atau dengan kata lain Beliau selalu memperjuangkan nasib PKL P3BS di Jalan Kartini atau pro terhadap kelompok orang miskin dan termarginalkan. Sebagai wujud ucapan terima kasih maka PKL P3BS di Jalan Kartini terjun ke dunia politik sebagai tim Kampanye untuk pemenangan Pak Marmo sebagai Walikota Semarang seperti yang diutarakan oleh Wahyudi selaku ketua P3BS sebagai berikut :

“ya begitulah. Kami kan kerjasamanya dan berupaya apa... balas jasa begitu. Jadi, tidak melalui uang ataupun yang lainnya. Jadi kita kan rasa manusiawi lagi ini. Jadi dimana kami pernah diberi maka kita kalau bisa berupaya untuk dapat member seperti dulu kami kan misal Walikota sekarang Pak Sumarmo itu kan dulu sewaktu masih menjabat Sekda, Beliau seringkali ikut memperjuangkan nasib kami atau peduli sama kami. Nah.. minim kami itu kenal, jadi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai Walikota Kami memperjuangkan Beliau atau MAR-HEN itu bisa menang. Keluarga besar P3BS itu tidak cuma Pedagang saja. Jadi, banyak masyarakat kota Semarang atau yang lainnya itu suka dan (simpatisan) P3BS. Kalau nyebut P3BS ya tau, Pedagang Burung juga tahu, keseluruhannya. Jadi, pada saat itu Kami bersama Dewan Penasehat Pak Bambang Tri Bawono dan yang lainnya ini juga ikut mensosialisasikan Beliau, Pak Marmo ini. Bahkan ndak pandang pagi, siang, malam itu berapa titik itu Kami datangi itu. Itupun sukarela, bener itu. Padahal, Kami memperjuangkan itu bahkan mengeluarkan uang. Bahkan, Pak Bambang Tri Bawono ini, Dewan Penasehat Kami ini juga mengeluarkan uang. Jadi kesana kemari diantar jemput pake mobil minim bensin juga ada keluar to, itu pun tidak minta ganti sama Pak Marmo”.



Gambar 4.4 Foto P3BS dengan Walikota Semarang dalam rangka buka puasa di rumah dinas Wali Kota Semarang.

Foto di atas menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara PKL dengan Walikota Semarang. Terlihat keakraban di antara mereka dengan diundangnya PKL Kartini yang tergabung di dalam P3BS untuk berbuka puasa bersama dengan Pak Marmo (walikota) di rumah dinas Wali kota Semarang. PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang mampu menjalin hubungan yang erat dengan Pemerintah (Walikota Semarang) yang merupakan wujud dari *linking social capital*. Hal ini akan membawa dampak positif bagi organisasi P3BS karena dengan *interpersonal relationship* yang dibangun maka PKL memiliki *bargaining position* yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah terhadap mereka sehingga PKL dapat memberi masukan terhadap kebijakan yang dibuat maupun menolak kebijakan yang akan merugikan mereka.

commit to user

Hal yang diinginkan PKL adalah dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan PKL karena PKL merupakan salah satu *stakeholder* yang utama dan terkena setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan maupun penertiban PKL. Seperti yang diutarakan pak Bambang Tri Bawono, SH. Selaku Dewan Penasehat P3BS pada saat interview tanggal 13 April 2011 sebagai berikut :

“iya supaya kuat dan supaya proses pembuatan undang-undang kebijakan setingkat Perda itu atau kebijakan yang lain melibatkan stakeholder yang ada”.

Lebih lanjut Beliau mengutarakan bahwa :

“Mestinya begitu, PKL-PKL yang sudah ternaungi dalam organisasi katakana begitu, yang sudah bisa menata dirinya sendiri itu diajak bicara. Karena ada beberapa stakeholder yang harus diajak bicara. Ada civitas akademis, ada Pemkot sendiri, Dewan, ada masyarakat juga yang menggunakan jasa itu, seperti PKL itu. Lha mestinya duduk bersama, membuat suatu aturan yang mereka hormati bersama, yang mengikat semua. Selama ini kan Perda yang dibuatkan hanya top down”.

Selama ini kebijakan yang dibuat dan digelontorkan oleh Pemerintah cenderung top-down. Hal ini dikarenakan stakeholder yang terkait dengan kebijakan yang dibuat tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan sehingga terkadang kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat dalam hal ini PKL. Oleh karena itu, Pemerintah kota khususnya diharapkan dapat memberikan ruang maupun peluang kepada PKL untuk berpartisipasi menyuarkan aspirasi mereka dalam perumusan kebijakan sehingga PKL maupun Pemerintah dapat membuat kebijakan yang saling *commit to user* menguntungkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya

kebijakan yang dibuat bersama tersebut dapat dihormati dan dapat diimplementasikan. Dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat ini, hak-hak mendasar PKL sebagai manusia dan warga negara tidak diabaikan.

Satu hal yang belum terselesaikan dan masih belum ada kejelasan adalah belum jelasnya nasib PKL P3BS di Jalan Kartini mengenai kejelasan relokasi atau tidak dari tempat mereka berjualan di Jalan Kartini saat ini. Ketidakjelasan ini membuat nasib PKL P3BS di Jalan Kartini terombang-ambing. PKL P3BS di Jalan Kartini dapat bertahan berjualan di Jalan Kartini sampai sekarang tidak lain karena memiliki kedekatan dengan Walikota Semarang. Namun, dikhawatirkan jika pada pemerintahan kota Semarang selanjutnya PKL tidak dapat menjalin interaksi dengan Walikota Semarang berikutnya maka keberadaan PKL akan terancam. Hal ini sangat merugikan PKL Kartini, sehingga kejelasan akan adanya relokasi ataupun tempat relokasi sangat dibutuhkan oleh PKL P3BS di Jalan Kartini.

Selain itu, hubungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang yang dekat dengan pihak-pihak yang memiliki *power* mengakibatkan kepentingan Pedagang sejenis menjadi terkesan dinomorduakan. Interaksi-interaksi sosial yang sangat dekat sangat rentan dengan menomorsatukan kepentingan kelompok atau pendukungnya dan mengabaikan kepentingan pihak lain yang juga terkait dengan sumberdaya yang sama yaitu Pedagang Karimata. Hal tersebut dapat dilihat dari kecurigaan Pedagang Karimata terhadap Pemerintah mengenai motif dibalik rencana relokasi terhadap
commit to user

mereka dan PKL Kartini seperti dilansir oleh Suara Merdeka pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 yang dikutip Penulis berikut ini:

“Sukardi (Pembina Paguyuban Pedagang Karimata) mempertanyakan apa motif dibalik rencana pemindahan Pasar Burung Karimata. Jika pasar itu dikatakan sudah tidak lagi memadai, semrawut, dan menyebabkan kemacetan, dia menolak keras. Kondisi pasar, menurut Sukardi baik-baik saja”.

Pedagang Karimata merasa curiga mengenai motif rencana pemindahan Pasar Burung Karimata ke daerah lain. Kecemburuan sesama Pedagang ini mengakibatkan konflik antara PKL Kartini dan Karimata menjadi sulit untuk dicari titik temu nya agar dapat berjalan berdampingan dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian di lapangan, tidak semua interaksi-interaksi yang dilakukan dapat mengatasi konflik. Sebaliknya, dari hasil penelitian di lapangan banyak ditemukan interaksi-interaksi yang dapat memicu konflik.

1. Bonding

Interaksi-interaksi yang ada di lingkungan PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi adalah dengan cara mengumpulkan dana yang ditarik setiap hari oleh Bendahara P3BS (Mbak Inul). Kas Paguyuban digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk dana kebersihan dan operasional paguyuban serta dana sosial untuk merekatkan *commit to user* hubungan kekeluargaan di antara PKL sebagai wujud tenggang rasa. Jadi, sudah

sewajarnya jika kas dikumpulkan secara bersama-sama. Dana yang dikumpulkan per harinya sebesar Rp. 2.000,-. Dari hasil penelitian di lapangan, anggota paguyuban tidak semuanya mengumpulkan dana kas sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PKL. Hal ini terlihat dari adanya anggota yang mengumpulkan uang Rp. 1.000,- atau bahkan tidak membayar kas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembayaran kas cenderung kondisional. Penarikan uang didasarkan pada ramai atau tidaknya pengunjung. Jika sepi pengunjung maka ada toleransi untuk tidak membayar kas. Namun, menurut Mbak Inul (Bendahara P3BS) meskipun ada toleransi namun setiap harinya harus ada anggota paguyuban yang membayar kas senilai Rp. 2000,-. Tetapi hal ini sistematisnya tidak jelas. Apakah bagian untuk membayarnya bergantian atau tidak.

Melihat fenomena di atas jika dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan menimbulkan atau memicu konflik. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran anggota untuk memenuhi kewajiban mereka membayar kas. Oleh karena itu, koordinasi dan ketegasan peraturan perlu dilakukan oleh Pengurus P3BS khususnya.

Selain kesadaran yang rendah dalam membayar kas, norma-norma kepercayaan di dalam kepengurusan keuangan P3BS sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari sering terjadinya pergantian Bendahara. Selama kurun waktu 4 tahun berdiri, Bendahara P3BS juga sudah berganti selama 4 kali. Hal tersebut dikarenakan rendahnya *trust* yang ada di dalam paguyuban ini. Pergantian pengurus keuangan ini lebih dikarenakan manajemen keuangan yang semrawut

dan tidak transparan. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa saling curiga dan cemas terhadap uang yang mereka kumpulkan, Norma-norma kepercayaan ini sangat *resistence* bagi kelangsungan *network* yang dibangun. *Trust* merupakan pondasi utama yang merekatkan PKL untuk bersatu, jika *trust* diantara PKL goyah maka dapat dipastikan organisasi yang mereka bangun akan runtuh. Jadi, dari hasil temuan ini dapat dilihat ada keterkaitan yang sangat erat antara pergantian Bendahara yang berulang kali dilakukan dengan *trust* yang rendah. Manajemen keuangan yang semrawut ini perlu dibenahi karena rawan akan konflik dan mempengaruhi kelangsungan organisasi yang dibangun.

Dari temuan di lapangan ini, dapat disimpulkan bahwa pada tataran bonding, ikatan yang dibangun sangat lemah. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran anggota paguyuban untuk membayar kas yang menimbulkan rasa ketidakadilan karena ada anggota yang membayar dan ada yang tidak membayar kas. Anggota yang tidak membayar diuntungkan, sementara anggota yang membayar merasa dirugikan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang jelas dan Bendahara yang tidak tegas dalam melakukan penarikan kas; selain itu, faktor yang dapat memicu konflik dan sangat berpotensi mempengaruhi keberlangsungan *network* yang dibangun adalah faktor rendahnya *trust* diantara anggota paguyuban dan kepengurusan keuangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dan pertanggungjawaban keuangan, yang diperparah dengan adanya indikasi penyelewengan dana oleh pengurus keuangan paguyuban.

Dengan melihat temuan-temuan di atas maka kerjasama yang dilandasi *commit to user* dengan norma-norma kepercayaan dilingkungan PKL Kartini sangat rendah. Hal

tersebut berdampak pada *mutual benefit* diantara mereka. Paguyuban P3BS mampu dan tetap bertahan sampai sekarang dikarenakan solidaritas yang tinggi di antara mereka. Konflik-konflik yang ada seperti rendahnya kesadaran membayar kas dan rendahnya kepercayaan terhadap kepengurusan keuangan ini, ditindaklanjuti dengan jalan musyawarah. Solidaritas yang tinggi merupakan faktor utama yang membuat PKL Kartini dapat mengatasi semua masalah internal paguyuban.

2. *Bridging*

Interaksi-interaksi yang dilakukan dengan kelompok atau komunitas lain di luar P3BS dilakukan untuk penguatan organisasi serta informasi *sharing*. Dengan terbuka pada kelompok komunitas lain maka banyak keuntungan yang diperoleh PKL contohnya akses kredit maupun akses informasi untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi.

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang melakukan interaksi-interaksi dengan masyarakat di sekitarnya dengan interaksi yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Untuk menghilangkan label penyebab kemacetan lalu lintas, usaha yang dilakukan oleh PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan Pengelola Parkir yang didasari oleh *trust* yang kuat. PKL mempercayakan kendaraan pelanggannya dan masalah lalu lintas kepada Parkir dan tukang parkir mendapatkan keuntungan dari para pengunjung pasar burung di median Jalan Kartini ini.

Selain itu, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang bekerjasama dengan masyarakat sekitar dengan menjadi donator pada setiap even-even yang dibuat

oleh masyarakat di sekitar tempat PKL berjualan. Hal ini membawa dampak yang positif bagi PKL, yaitu berupa penerimaan masyarakat terhadap keberadaan PKL di sekitar mereka.

Namun, dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan ada suatu hal yang dapat memicu konflik. Lemahnya atau tidak adanya ikatan, kerjasama, atau interaksi antara PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang dengan Pedagang resmi yang ada di sekitar Jalan Kartini menyebabkan konflik. Hal ini dikarenakan adanya perebutan sumberdaya di antara mereka. Padahal, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang hanya mau direlokasi ke daerah lain dengan catatan Pedagang resmi tersebut mau direlokasi bersama PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang. Sayangnya, Pedagang resmi menolak direlokasi bersama PKL P3BS di Jalan Kartini dan justru mendukung rencana Pemerintah untuk merelokasi PKL P3BS di Jalan Kartini ke Pasar Waru atau ke daerah Gunung Pati. Akibatnya, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menolak direlokasi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang ke daerah lain menjadi sulit diimplementasikan atau gagal diimplementasikan.

Dapat disimpulkan, pada tataran bridging, ikatan yang dibangun saling menguntungkan. Meskipun masih ada hal yang dapat memicu konflik yaitu masalah relokasi. Kejelasan relokasi dan tempat relokasi jug memperparah kondisi pada ikatan *bridging* ini. Hal ini dikarenakan posisi PKL menjadi tidak jelas. Semua tergantung pada perumus kebijakan.

commit to user

3. *Linking*

Untuk meresolusi konflik pada tataran bridging, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang membangun kerjasama dengan Pemerintah, rejim politik, dan Lembaga-Lembaga di luar Pemerintah. Semua dilakukan adalah sebagai wujud upaya PKL untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki *power* agar memperhatikan dan ikut memperjuangkan nasib PKL sebagai kaum marginal.

PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menjalin kerjasama dengan GERINDRA. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anggota paguyuban P3BS yang menjadi kader-kader partai tersebut. Alasan utama PKL menjalin kerjasama dengan GERINDRA adalah karena kebetulan ketua Partai Politik (Parpol) tersebut adalah ketua Asosiasi Pedagang Indonesia sehingga kerjasama ini diharapkan membawa PKL ke posisi yang aman atau memiliki *bargaining position*. Anggapan ini muncul dengan melihat latar belakang profesi yaitu kesamaan profesi sebagai Pedagang diharapkan Ketua Parpol tersebut beserta Parpolnya memberikan dukungan kepada PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang sehingga PKL dapat tetap eksis di Jalan Kartini. Hal ini terbukti efektif dengan masih eksisnya PKL Kartini berjualan di median Jalan Kartini sampai sekarang.

Selain itu, PKL P3BS di Jalan Kartini juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu PKL jika dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut masalah hukum. Sebagai konsultan hukum, LBH tersebut memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan kepada PKL agar

dapat berjalan seiring sejalan dengan program-program Pemerintah (sinergisasi). Adanya sinergi antara program Pemerintah dan PKL misalnya PKL berpartisipasi pada upaya-upaya menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang, maka hal ini akan memberikan citra yang positif bagi PKL. Dengan citra positif, PKL berharap dapat dilibatkan pada perumusan kebijakan yang menyangkut hidup mereka dan PKL dapat menyampaikan aspirasi mereka.


PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menjalin kerjasama dengan pihak pemegang otoritas tertinggi di Pemerintahan Kota Semarang dengan cara selalu berperan serta dan mendukung semua program Pemerintah. PKL juga terjun ke politik sebagai wujud balas budi kepada pihak-pihak yang telah memperjuangkan nasib mereka. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan Pemerintah diharapkan memperhatikan nasib PKL. Kerjasama yang dilakukan PKL dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas ini terbukti efektif dengan adanya diskresi berupa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemegang otoritas terhadap PKL. PKL diberikan kelonggaran berupa diizinkan PKL P3BS di Jalan Kartini berjualan di median Jalan Kartini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. PKL juga dilindungi dari ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, PKL P3BS di Jalan Kartini juga selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah baik secara formal maupun informal.

Namun, kerjasama yang saling menguntungkan antara PKL dengan pihak-pihak yang *powerful* dapat menimbulkan konflik. Hal ini terlihat dari adanya *commit to user* kecemburuan sosial dari kelompok komunitas lain yang merasa dinomorduakan

dan diabaikan kepentingan-kepentingannya. Hal ini merupakan wujud sisi negatif dari *social capital* yang kuat karena cenderung mengutamakan kepentingan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan kelompok lain.

Tabel 4.1 Kerangka Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Proses *Social Capital* Dalam Resolusi Konflik Dan Pemicu Konflik Dengan Melihat Interaksi-Interaksi Pada Tataran *Bonding*, *Bridging*, Dan *Linking* Yang Ada Pada Lingkungan PKL P3BS Di Jalan Kartini Kota Semarang.

No	Permasalahan	Indikator	Hasil Penelitian dan Pembahasan
	Bagaimana proses <i>social capital</i> dalam penataan Pedagang Kaki Lima (studi kasus pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang)?	1. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>bonding</i> .	PKL membentuk Paguyuban (P3BS). Resolusi konflik: Solidaritas dan saling pengertian yang kuat dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Pemicu konflik: <i>trust</i> dan kerjasama yang rendah dalam manajemen keuangan dan pengumpulan kas.
		2. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>bridging</i> .	Interaksi-interaksi sosial yang dapat meresolusi konflik: kerjasama yang saling menguntungkan dengan Parkir dan Masyarakat. Adapun faktor yang dapat memicu timbulnya konflik adalah: Tidak adanya kerjasama dengan kelompok Pedagang sejenis (Pedagang Pasar Burung Resmi Pemerintah Kota Semarang)

		<p>3. Interaksi-interaksi dalam tataran <i>linking</i></p>	<p>Resolusi Konflik: berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Semarang sehingga tercipta sinergisasi dan <i>mutual benefit</i>. PKL menjalin <i>interpersonal relationship</i> agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dan tetap eksis di Jalan Kartini. Melalui hubungan ini, PKL mendapatkan diskresi berupa perlindungan dan diizinkan untuk berjualan di Jalan Kartini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, ikatan ini rentan menimbulkan konflik karena adanya rasa kecemburuan sosial dari kelompok Pedagang sejenis yang merasa kepentingannya diabaikan</p>
--	---	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa proses *social capital* dalam penataan Pedagang Kaki Lima (studi kasus pada PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang) dimulai dengan pembentukan suatu paguyuban yang diberi nama PAGUYUBAN PESONA PEDAGANG BURUNG SEMARANG (P3BS). Di dalam paguyuban, hal-hal yang dilakukan untuk membangun modal sosial sebagai sumber kekuatan yang dapat meningkatkan *bargaining position* terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat merugikan PKL adalah dengan melakukan interaksi-interaksi internal PKL (*bonding*), interaksi-interaksi dengan pihak-pihak di luar PKL (*bridging*), dan interaksi-interaksi yang dilakukan dengan Pemerintah (*linking*).

Pada tataran *bonding*, PKL P3BS melakukan kerjasama dengan sesama anggota P3BS dengan cara memperkuat hubungan kekeluargaan; hubungan kekeluargaan dibangun melalui kerjasama untuk memenuhi kebutuhan Paguyuban dan mempererat silaturahmi. Adapun cara-cara yang dilakukan berupa penggalan potensi paguyuban melalui pengumpulan dana kas. Dana ini digunakan untuk dana kebersihan, lelayu, parsel, dan dana operasional PKL P3BS di Jalan Kartini.

Dalam tataran *bridging*, PKL P3BS di Jalan Kartini Kota Semarang menjalin kerja sama dengan para pengacara kondang di Semarang dan menjadikan mereka sebagai Konsultan hukum yang mengarahkan mereka dalam setiap kegiatan. Selain

itu P3BS juga membangun kerja sama dengan masyarakat di sekitar tempat PKL P3BS di Jalan Kartini melakukan aktivitas berjualan.

Pada tataran *linking*, PKL P3BS menjalin kerjasama dengan pihak pemegang otoritas dan pihak-pihak yang powerful serta rejim politik di lingkungan kota Semarang. Ikatan *linking* yang terbentuk antara PKL P3BS dengan pihak-pihak yang memiliki *power* di kota Semarang membuat PKL Kartini tetap *survive* dan mampu mempertahankan eksistensinya di Jalan kartini. Ikatan ini menguntungkan PKL karena melalui ikatan ini PKL P3BS mendapatkan diskresi dari Pemerintah yang berupa kelonggaran untuk tetap dapat berjualan di Jalan Kartini Semarang.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian di lapangan, teori-teori dalam penelitian ini dapat dijadikan dan digunakan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan penanganan PKL. Hal ini dikarenakan jika pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah PKL menggunakan teori-teori dalam penelitian ini maka resolusi konflik akan cenderung mengarah pada *win-win solution* dengan harapan kebijakan yang dirumuskan dapat diterima dan menguntungkan semua pihak.

Secara metodologis, penelitian ini menguras waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini memakan waktu yang lama dalam proses pengumpulan data. Dengan waktu yang lama maka secara otomatis penelitian dan laporan penelitian menjadi terlambat dalam penulisannya.

Perlu adanya strategi dan kebijakan pengembangan PKL yang dapat diterima semua pihak terkait. Kebijakan yang dirumuskan harus mempertimbangkan

keberlangsungan hidup dan mata pencaharian PKL tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain atau merugikan pihak lain.

C. Saran

1. Kaitannya dengan *Bonding Social Capital*

- Interaksi antar PKL dapat diperkuat melalui adanya suatu paguyuban yang menaungi mereka namun karena kurang validnya manajemen pengelolaan keuangan di antara mereka membuat konflik-konflik kecil muncul. Hal ini bisa dibenahi dengan memperbaiki manajemen yang sudah ada menjadi manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Dengan tergabung di dalam paguyuban maka PKL bisa menjadi lebih kuat. Karena dengan tergabung dalam suatu paguyuban maka PKL bisa mempunyai posisi tawar menawar dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan yang telah atau akan ditetapkan. Sehingga diperlukan suatu koordinasi yang menyeluruh di antara PKL, dalam artian PKL dapat dijadikan suatu bentuk usaha yang semi formal sehingga keberadaannya dapat terkontrol yang dikendalikan oleh mereka sendiri bukan dari Pemerintah.
- Penggalan kapasitas dari anggota paguyuban melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta penguatan kapasitas yang telah dimiliki. Dalam hal penarikan dan penguatan finansial di lingkungan mereka perlu adanya aturan yang jelas besaran rupiah yang harus dibayarkan setiap harinya, bukan hanya sekedar dari kesadaran anggota untuk membayar atau tidak semata.

commit to user

2. Kaitannya dengan *Bridging Social Capital*

- Interaksi dengan komunitas lain baik itu PKL se-kota Semarang maupun komunitas lain yang ada di lingkungan PKL Kartini harus ditingkatkan lagi. Interaksi yang hanya dilakukan dengan intensitas rendah atau jika PKL Kartini sedang membutuhkan baru menjalin interaksi tentu saja hasilnya interaksi yang dilakukan tidak efektif. Dengan intensitas interaksi yang tinggi akan semakin memperkokoh kerjasama yang dibangun.
- Dalam rangka memanfaatkan kelangkaan sumberdaya maupun lahan publik yang ada, pemanfaatannya dapat dimusyawarahkan dengan *stakeholder* terkait sehingga tidak terjadi konflik perebutan sumberdaya tersebut. PKL dengan Pedagang burung Karimata maupun Pemerintah dapat merumuskan kembali suatu kebijakan terkait dengan kelangkaan lahan tersebut dalam menyesuaikan kondisi di lapangan sekarang ini.

3. Kaitannya dengan *Linking Social Capital*

- Terkait dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang ini dirasa peraturan yang ada kurang relevan dengan kondisi yang ada, pemerintah harus segera membuat rancangan Perda tentang PKL bersama *stakeholder* terkait agar PKL Kartini tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian.
- Dalam hal interaksi dengan PKL diperlukan adanya suatu desentralisasi terhadap PKL tanpa melepas tanggung jawab terhadap PKL itu sendiri.
- Pemerintah diharapkan lebih responsive dan memberikan jalan keluar terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu kepastian lahan tempat berjualan yang *commit to user*

diizinkan oleh Pemerintah dan juga memenuhi keinginan PKL jika harus direlokasi maka diharapkan semua stakeholder yang terkait dengan urusan jual-beli burung di Jalan Kartini dan sekitarnya untuk direlokasi bersama dan menjadi 1 lahan sehingga konflik-konflik yang pernah ada tidak semakin besar namun berganti dengan kerukunan karena ada rasa kebersamaan dan identitas yang sama yaitu Pedagang burung.

